



Katalog BPS: 9101002

LAPORAN HASIL SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI 2014



BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI 2014

<http://www.bps.go.id>

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Subdirektorat Statistik Transportasi

Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi

Subdirektorat Statistik Keuangan

LAPORAN HASIL SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI 2014

ISSN : 2460-982X
Nomor Publikasi : 06130.1501
Katalog : 9101002
Ukuran Buku : A4 (21cm x 29,7 cm)
Jumlah Halaman : vi + 128 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri
Subdirektorat Statistik Transportasi
Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi, serta
Subdirektorat Statistik Keuangan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri dan
Subdirektorat Statistik Transportasi

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta
Indonesia

KATA PENGANTAR

Publikasi Laporan Hasil Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2014 di 33 provinsi yang terdiri dari: sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, komunikasi dan teknologi informasi, lembaga keuangan, dan keuangan pemerintah daerah merupakan publikasi tahunan dari Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi yang dilakukan pada tahun 2014.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian mengenai indeks nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha pada sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta sektor keuangan yang berkesinambungan (triwulanan).

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan pengguna lainnya. Disamping itu, publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, September 2015

Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. SURYAMIN, M.Sc
NIP. 19560805 197903 1 001

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Survei.....	2
1.3 Cakupan	2
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Ruang Lingkup.....	5
2.2 Desain Sampling	13
2.3 Kerangka Sampel.....	13
2.4 Jumlah dan Alokasi Sampel.....	13
2.5 Metode Pengumpulan Data	15
2.6 Alur Pencacahan	15
2.7 Pelaksanaan Lapangan.....	17
2.8 Konsep dan Definisi	19
2.9 Batasan Penyajian.....	45
BAB III PEMBAHASAN	47
3.1 Perdagangan	47
3.2 Transportasi dan Pergudangan	58
3.3 Informasi.....	74
3.4 Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	83
3.5 Keuangan Pemerintah	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
4.1 Kesimpulan.....	101
4.2 Saran	105
LAMPIRAN	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner STKU-G 2014	109
Lampiran 2. Kuesioner STKU-H 2014	113
Lampiran 3. Kuesioner STKU-J 2014	117
Lampiran 4. Kuesioner STKU-K 2014.....	121
Lampiran 5. Kuesioner STKU-O 2014	125

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional digambarkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) dan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB disusun dalam periode triwulanan dan tahunan.

Penyusunan PDB/PDRB memerlukan data statistik sektoral yang merupakan data dasar dan data pendukung, salah satunya adalah data produksi/indikator produksi. Beberapa sektor yang merupakan sektor jasa dalam penyusunan angka PDB/PDRB tersebut adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

Sektor perdagangan dan jasa semakin berkembang pesat di Indonesia, bukan saja aktifitas perdagangan dalam negeri, perdagangan antar pulau, antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia semakin besar peranannya dalam perekonomian nasional maupun daerah. Begitu pula peran berbagai jenis jasa seperti: jasa transportasi, pergudangan, Informasi dan komunikasi dan jasa keuangan semakin intensif dan membesar kontribusinya.

Dari sisi penyediaan data pada sektor-sektor tersebut, BPS belum memiliki data yang lengkap dan berkesinambungan untuk mendukung penghitungan PDB/PDRB. sementara itu, penyusunan PDB membutuhkan data-data indikator produksi pada sektor-sektor tersebut, yang perlu dipantau perkembangannya secara berkala.

Oleh karena itu, kegiatan usaha yang tercakup dalam sektor-sektor tersebut terus dipantau perkembangannya secara terintegrasi melalui Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU), yang pelaksanaan lapangannya dimulai awal April 2014. STKU Terintegrasi 2014 ini adalah survei yang dirancang untuk memantau perkembangan perusahaan/usaha sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, informasi, lembaga keuangan, dan keuangan pemerintah daerah secara triwulanan.

Untuk sementara survey ini hanya fokus pada pengumpulan data dan informasi di beberapa kegiatan perdagangan dalam negeri dan jasa, yang dapat membantu penyusunan penghitungan PDB/PDRB. Dimasa mendatang akan diperluas dengan kegiatan arus perdagangan dalam negeri dan jasa yang lebih luas.

1.2 Tujuan Survei

Tujuan dilaksanakannya kegiatan STKU Terintegrasi 2014 adalah:

- a. Menyediakan data tentang indeks nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha pada sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, informasi, serta sektor keuangan yang berkesinambungan (triwulanan).
- b. Memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan PDB dan PDRB Triwulanan.
- c. Memperoleh informasi terkini dan tercepat dalam bentuk data kuantitas mengenai indikator produksi triwulanan dan data kualitas sebagai pendukung data kuantitas.

1.3 Cakupan

1.3.1 Cakupan Kegiatan Usaha

Kegiatan yang akan dicakup pada STKU Terintegrasi 2014 adalah:

- a. Perusahaan/usaha pada kegiatan perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta lembaga keuangan bukan bank, untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tertentu yang berskala menengah dan besar, yang mengacu pada UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (UK):
Skala Usaha Menengah : Omset 1 Miliar - 3 Miliar
Skala Usaha Besar : Omset > 3 Miliar
Skala ini digunakan sesuai *frame* hasil Sensus Ekonomi 2006.
- b. Seluruh perusahaan baik perusahaan menengah besar maupun mikro kecil untuk kegiatan informasi untuk KBLI tertentu.
- c. Kegiatan Usaha Keuangan Pemerintah Daerah.

1.3.2 Cakupan Wilayah

STKU Terintegrasi 2014 dilaksanakan di seluruh provinsi, yang meliputi seluruh ibukota provinsi di Indonesia dan beberapa kabupaten/kota di sekitar ibukota provinsi.

1.3.3 Cakupan Variabel

Data dan keterangan yang dikumpulkan dalam pelaksanaan STKU Terintegrasi 2014 diantaranya meliputi:

- a. Nama dan alamat perusahaan,
- b. Kegiatan perusahaan/usaha,
- c. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,
- d. Jumlah pekerja,
- e. Balas jasa pekerja,
- f. Indikator produksi,
- g. Pendapatan usaha, dan
- h. Prospek usaha

<http://www.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Distribusi dan Jasa 2014 dilaksanakan setiap triwulan meliputi sektor perdagangan, transportasi, komunikasi dan teknologi informasi, dan lembaga keuangan yang akan dilaksanakan di seluruh propinsi. Yang meliputi seluruh ibukota provinsi dan beberapa kabupaten/kota disekitar ibukota provinsi yang tercantum dalam tabel 2.1 dan khusus untuk STKU Keuangan Pemerintahan Daerah cakupan kota/kabupaten tercantum dalam tabel 2.1. dan dilaksanakan setiap triwulan.

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan menengah dan besar untuk sektor perdagangan, transportasi dan lembaga keuangan, serta seluruh perusahaan baik perusahaan menengah besar maupun mikro kecil untuk sektor komunikasi dan teknologi informasi untuk KBLI tertentu yang tercantum pada tabel 2.2.

Tabel 2.1 Cakupan Kabupaten/ Kota Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU Perdagangan, STKU Lembaga Keuangan Bukan Bank, STKU Transportasi dan STKU Komunikasi dan Teknologi informasi) 2014 Menurut Provinsi

Kode Prov.	Nama Provinsi	Kabupaten/ Kota Sekitar
(1)	(2)	(3)
11	Aceh	(08) Aceh Besar, (71) Banda Aceh
12	Sumatera Utara	(12) Deli Serdang, (13) Langkat, (75) Medan, (76) Binjai
13	Sumatera Barat	(03) Solok, (06) Padang Pariaman, (71) Padang, (72) Solok
14	Riau	(04) Pelalawan, (06) Kampar, (71) Pekanbaru, (73) Dumai
15	Jambi	(05) Muaro Jambi, (71) Jambi
16	Sumatera Selatan	(07) Banyu Asin, (10) Ogan Ilir, (71) Palembang
17	Bengkulu	(03) Bengkulu Utara, (71) Bengkulu
18	Lampung	(10) Pringsewu , (71) Bandar Lampung
19	Kep. Bangka Belitung	(01) Bangka, (71) Pangkal Pinang
21	Kepulauan Riau	(71) Batam, (72) Tanjung Pinang

Kode Prov.	Nama Provinsi	Kabupaten/ Kota Sekitar
(1)	(2)	(3)
31	DKI Jakarta	(71) Jakarta Selatan, (72) Jakarta Timur, (73) Jakarta Pusat, (74) Jakarta Barat, (75) Jakarta Utara
32	Jawa Barat	(04) Bandung, (05) Garut, (73) Bandung, (75) Bekasi, (77) Cimahi
33	Jawa Tengah	(20) Jepara, (22) Semarang, (24) Kendal, (74) Semarang, (75) (Pekalongan)
34	DI Yogyakarta	(01) Kulon Progo, (2) Bantul, (3) Gunung Kidul, (04) Sleman, (71) Yogyakarta
35	Jawa Timur	(14) Pasuruan, (15) Sidoarjo, (25) Gresik, (76) Mojokerto, (78) Surabaya, (75) Pasuruan
36	Banten	(71) Kota Tangerang, (73) Kota Serang, (72) Cilegon
51	Bali	(03) Badung, (04) Gianyar, (71) Denpasar
52	Nusa Tenggara Barat	(01) Lombok Barat, (08) Lombok Utara (71) Mataram
53	Nusa Tenggara Timur	(03) Kupang, (71) Kota Kupang
61	Kalimantan Barat	(04) Pontianak, (71) Kota Pontianak
62	Kalimantan Tengah	(05) Barito Utara, (07) Lamandau, (08) Seruyan (09) Katingan, (71) Palangka Raya
63	Kalimantan Selatan	(03) Banjar, (04) Barito Kuala, (07) Hulu Sungai Tengah, (08) Hulu Sungai Utara, (71) Banjarmasin
64	Kalimantan Timur	(03) Kutai Kartanegara, (05) Berau, (71) Balikpapan, (72) Samarinda, (73) Tarakan
71	Sulawesi Utara	(02) Minahasa, (71) Manado
72	Sulawesi Tengah	(05) Donggala, (71) Palu
73	Sulawesi Selatan	(06) Gowa, (08) Maros, (71) Makassar
74	Sulawesi Tenggara	(03) Konawe, (71) Kendari
75	Gorontalo	(02) Gorontalo, (71) Kota Gorontalo
76	Sulawesi Barat	(01) Majene, (02) Polewali mandar, (04) Mamuju, (05) Mamuju Utara
81	Maluku	(06) Seram Bagian Barat, (71) Ambon
82	Maluku Utara	(71) Ternate, (72) Tidore Kepulauan
91	Papua Barat	(05) Manokwari, (71) Sorong
94	Papua	(03) Jayapura, (20) Keerom, (71) Kota Jayapura

Tabel 2.1 Cakupan Kabupaten/ Kota Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Keuangan Pemerintah Daerah 2014 Menurut Provinsi

Kode Prov.	Nama Provinsi	Kabupaten/ Kota
(1)	(2)	(3)
11	Aceh	(08) Aceh Besar, (12) Aceh Barat Daya, (71) Banda Aceh, (73) Langsa, (74) Lhoksumawe
12	Sumatera Utara	(06) Toba Samosir, (11) Karo, (19) Batu Bara, (74) Tebing Tinggi, (75) Medan
13	Sumatera Barat	(03) Solok, (06) Padang Pariaman, (08) Lima Puluh Koto, (71) Padang, (72) Solok
14	Riau	(04) Pelalawan, (06) Kampar, (08) Bengkalis, (71) Pekanbaru, (73) Dumai
15	Jambi	(04) Batang Hari, (05) Muaro Jambi, (07) Tanjung Jabung Barat, (08) Tebo, (71) Jambi
16	Sumatera Selatan	(03) Muara Enim, (06) Musi Banyu Asin, (07) Banyu Asin, (10) Ogan Ilir, (71) Palembang
17	Bengkulu	(01) Bengkulu Selatan, (02) Rejang Lebong, (03) Bengkulu Utara, (04) Kaur, (71) Bengkulu
18	Lampung	(04) Lampung Timur, (05) Lampung Tengah, (09) Pesawaran, (10) Pringsewu, (71) Bandar Lampung
19	Kep. Bangka-Belitung	(01) Bangka, (03) Bangka Barat, (04) Bangka Tengah, (05) Bangka Selatan, (71) Pangkal Pinang
21	Kepulauan Riau	(01) Karimun, (02) Kepulauan Riau, (03) Natuna, (71) Batam, (72) Tanjung Pinang
31	DKI Jakarta	-
32	Jawa Barat	(04) Bandung, (05) Garut, (73) Bandung, (75) Bekasi, (77) Cimahi
33	Jawa Tengah	(20) Jepara, (22) Semarang, (24) Kendal, (74) Semarang, (75) Pekalongan
34	DI Yogyakarta	(01) Kulon Progo, (02) Bantul, (03) Gunung Kidul, (04) Sleman, (71) Yogyakarta
35	Jawa Timur	(14) Pasuruan, (15) Sidoarjo, (25) Gresik, (76) Mojokerto, (78) Surabaya, (75) Pasuruan
36	Banten	(04) Serang, (71) Tangerang, (72) Cilegon, (73) Kota Serang, (74) Tangerang Selatan
51	Bali	(02) Tabanan, (03) Badung, (04) Gianyar, (05) Klungkung, (71) Denpasar
52	Nusa Tenggara Barat	(01) Lombok Barat, (02) Lombok Tengah, (06) Bima, (07) Sumbawa, (71) Mataram
53	Nusa Tenggara Timur	(02) Sumba Timur, (03) Kupang, (05) Timor Tengah Utara, (13) Manggarai, (71) Kota Kupang
61	Kalimantan Barat	(04) Pontianak, (05) Sangau, (06) Ketapang, (07) Sintang, (71) Kota Pontianak
62	Kalimantan Tengah	(05) Barito Utara, (07) Lamandau, (08) Seruyan, (09) Katingan, (71) Palangkaraya
63	Kalimantan Selatan	(03) Banjar, (04) Barito Kuala, (05) Tapin, (71) Banjarmasin, (72) Banjar baru
64	Kalimantan Timur	(01) Paser, (03) Kutai Kartanegara, (05) Berau, (71) Balikpapan, (72) samarinda
71	Sulawesi Utara	(01) Bolaang Mongondow, (02) Minahasa, (05) Minahasa Selatan, (71) Manado, (72) Bitung

Kode Prov.	Nama Provinsi	Kabupaten/ Kota
(1)	(2)	(3)
72	Sulawesi Tengah	(02) Banggai, (04) Poso, (05) Donggala, (08) Parigi Moutong, (71) Palu
73	Sulawesi Selatan	(04) Jeneponto, (06) Gowa, (08) Maros, (09) Pangkajene Kepulauan, (71) Makassar
74	Sulawesi Tenggara	(02) Muna, (03) Konawe, (04) Kolaka, (05) Konawe Selatan, (71) Kendari
75	Gorontalo	(01) Boalemo, (02) Gorontalo, (03) Pahuwato, (04) Bone Bolango, (71) Kota Gorontalo
76	Sulawesi Barat	(01) Majene, (02) Polewali Mandar, (03) Mamasa, (04) Mamuju, (05) Mamuju Utara
81	Maluku	(01) Maluku Tenggara Barat, (05) Kepulauan Aru, (02) Maluku Tenggara, (06) Seram Bagian Barat, (71) Ambon
82	Maluku Utara	(03) Kepulauan Sula, (04) Halmahera Selatan, (06) Halmahera Timur, (71) Ternate, (72) Tidore Kepulauan
91	Papua Barat	(02) Kaimana, (04) Teluk Bintuni, (05) Manokwari, (07) Sorong, (71) Sorong
94	Papua	(03) Jayapura, (08) Yapen Waropen, (12) Mimika, (20) Keerom, (71) Kota Jayapura

Tabel 2.2. Cakupan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) 2014 Menurut KBLI

Sektor	No	Rincian	KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perdagangan	1	PB Hasil Pertanian		
		1. PB Padi dan Palawija, PB Beras	46201+ 46311	51211
		2. PB Binatang Hidup	46205	51212
		3. PB Hasil Perikanan	46206	51213
		4. PB Buah-buahan, PB Sayuran, PB Rokok dan Tembakau	46312 + 46313+ (46335)*	51220
		5. PB Buah yang Mengandung Minyak	46202	51211
		6. PB Kopi, Teh, dan Kakao	46314	51220
		7. PB Gula, Coklat, dan Kembang Gula	46331	51220
	2	PE Hasil Pertanian		
		1. PE Padi dan Palawija	47211	52211
		2. PE Buah-buahan	47212	52212
		3. PE Sayuran	47213	52213
		4. PE Hasil Peternakan	47214	52214
		5. PE Hasil Perikanan	47215	52215
		6. PE Beras	47221	52221
	3	PB Kendaraan Bermotor		
		1. PB Mobil Baru, PB Mobil Bekas	45101+ 45102	50101
		2. PB Sepeda Motor Baru, PB Sepeda Motor Bekas	45401 + 45402	50301
	4	PE Kendaraan Bermotor		

Sektor	No	Rincian	KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. PE Mobil Baru, PE Mobil Bekas	45103+ 45104	50102
		2. PE Sepeda Motor Baru, PE Sepeda Motor Bekas	45403+ 45404	50302
	5	SPBU		
		PE Bahan Bakar Kendaraan di SPBU.	47301	50400
	6	PB Hasil Industri Pengolahan		
		1. PB Rokok dan Tembakau	46335	51220
		2. PB Tekstil, PB Pakaian	46411+ 46412	51310
		3. PB Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491	51391
		4. PB Peralatan Telekomunikasi	46523	51900
		5. PB Kertas dan Karton	46695	51900
	7	PE Hasil Industri Pengolahan		
		1. PE Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Supermarket/ Minimarket	47111	52111
		2. PE Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau Bukan di Supermarket/ Minimarket (Tradisional)	47112	52112
		3. PE Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	47191	52191
		4. PE Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Toserba (Department Store)	47192	52192
		5. PE Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	47240	52227
		6. PE Tekstil	47511	52321
		7. PE Pakaian	47711	52322
		8. PE Furniture	47591	52331
		9. PE Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	47420	52332
		10. PE Alat Telekomunikasi	47414	52338
		11. PE Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/ Karton	47650	52361
	8	PB Ekspor	-	531,532,533, 534, 535,539
		1. P Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian	46201, 46206	53211
		2. P Ekspor Binatang Hidup	46205	53212
		3. P Ekspor Hasil Perikanan	46206	53213
		4. P Ekspor Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	46411	53310

Sektor	No	Rincian	KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. P Ekspor Peralatan dan Perleng-kapan Rumah Tangga	46491	53391
	9	PB Impor		
		1. P Impor Bahan Baku Hasil Pertanian	46201, 46206	54211
		2. P Impor Binatang Hidup	46205	54212
		3. P Impor Hasil Perikanan	46206	54213
		4. P Impor Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	46411	54310
		5. P Impor Peralatan dan Perleng-kapan Rumah Tangga	46491	54391
Transportasi	1	Angkutan Bus Penumpang		
		1. Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	49211	60211
		2. Angkutan Bus Perbatasan	49212	60212
		3. Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	49213	60213
		4. Angkutan Bus Kota	49214	60214
		5. Angkutan Bus Lintas Batas Negara	49215	60217
		6. Angkutan Bus Khusus	49221	60216
		7. Angkutan Bus Pariwisata	49222	60223
	2	Angkutan Penumpang Non Bus		
		1. Angkutan Perbatasan Bukan Bus	49411	60212
		2. Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus	49412	60213
		3. Angkutan Perkotaan	49413	60214
		4. Angkutan Perdesaan	49414	60215
		5. Angkutan Taksi	49421	60221
		6. Angkutan Sewa	49422	60222
	3	Angkutan Barang		
		1. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	49431	60231
		2. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	49432	60232
	4	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan		
		1. Angkutan Sungai dan Danau untuk Penumpang Dengan Trayek Tetap dan Teratur	50211	61211
		2. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212	61212
		3. Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk	50213	61213

Sektor	No	Rincian	KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Wisata		
		4. Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Penumpang	50214	61222
		5. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	50215	61223
		6. Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	50216	61224
		7. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	50217	61225
		8. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	50218	61226
		9. Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	50219	61221
		10. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan	50221	61214
		11. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222	61215
		12. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223	61216
		13. Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang	50224	61222
		14. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	50225	61223
		15. Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	50226	61224
		16. Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	50227	61225
		17. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	50228	61226
		18. Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	50229	61221
	5	Pergudangan		
		1. Pergudangan	52101	63210
		2. Jasa <i>Cold Storage</i>	52102	63220
	6	Jasa Penunjang Angkutan Darat		
		1. Jasa Perparkiran di Badan Jalan (<i>On Street Parking</i>)	52214	63351
		2. Jasa Perparkiran di Luar	52215	63352

Sektor	No	Rincian	KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>)		
	7	Penanganan Kargo (Bongkar Muat)	52240	63100
	8	Jasa Penunjang Angkutan Lainnya		
		1. JPT	52291	63510
		2. EMKA & EAD	52292	63520
		3. EMKL	52293	63530
		4. EMPU	52294	63540
	9	Kurir	53200	64130
KTI	1	Penerbit Surat Kabar, Jurnal dan Majalah.		
		1. Penerbit Surat Kabar	58130	22120
	2	Penyiaran Radio .		
		1. Penyiaran Radio Oleh Swasta	60102	92132
Lembaga Keuangan	1	Penyelenggaraan pemerintah Negara dan kesekretariatan Negara .	84112	75112
	2	Perasuransian		
		1. Asuransi Jiwa Konvensional	65111	66010
		2. Asuransi Jiwa Syariah	65112	66010
		3. Asuransi Non Jiwa Konvensional	65121	66030
		4. Asuransi Non Jiwa Syariah	65122	66030
		5. Reasuransi Konvensional	65201	
		6. Reasuransi Syariah	65202	
		7. Adjuster (Jasa Penilai Risiko Dan Kerusakan)	66210	67202
		8. Aktuaria	66291	67203
	3	Dana Pensiun	65300	66020
	4	Koperasi simpan pinjam	64140	65950
	5	Pegadaian	64921	65940
	6	Pedagang Valuta Asing	66197	67191
	7	Pembiayaan		
		1. Perusahaan Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	64910	65910
		2. Perusahaan Anjak Piutang (<i>Factoring</i>)	64992	65921
		3. Usaha Kartu Kredit (<i>Credit Card</i>)	64923	65923
		4. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (<i>Consumer Finance</i>)	64922	65922
	8	Modal Ventura	64991	65930

*) Termasuk hasil industri rokok

2.2 Desain Sampling

Metode sampling yang digunakan dalam STKU 2014 adalah metode sistematis sampling. Perusahaan sampel terpilih akan dicacah selama 4 triwulan.

2.3 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam survei ini adalah

1. Daftar perusahaan/usaha sektor lembaga keuangan, perdagangan dan transportasi hasil SE2006-SS Usaha Menengah Besar (UMB) serta daftar perusahaan/usaha komunikasi dan teknologi informasi hasil Listing SE 2006 untuk KBLI yang telah ditentukan.
2. Updating Direktori perusahaan/usaha
 - a. Komunikasi dan Teknologi Informasi tahun 2009
 - b. Lembaga Keuangan yang dilaksanakan tiap tahun
3. Asosiasi
4. Internet

Pemilihan sampel dilakukan secara independen untuk masing-masing provinsi dan sektor dengan memperhatikan komposisi usaha berdasarkan kegiatan usahanya (misalnya sektor perdagangan dibagi menurut perdagangan mobil, perdagangan sepeda motor, perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, perdagangan eceran bukan mobil dan sepeda motor, perdagangan eceran di swalayan, perdagangan eceran di *department store*). Metode yang digunakan adalah dengan metode sistematis sampling. Untuk kegiatan STKU 2014 ini perusahaan yang terpilih sampel adalah perusahaan yang berhasil dicacah pada STKU 2013 pada TW 1.

2.4 Jumlah dan Alokasi Sampel

Jumlah sampel perusahaan adalah sebanyak 12.068 sampel perusahaan/usaha yang dibagi secara merata kedalam 4 triwulan, sehingga tiap triwulan jumlah sampel adalah 3.017 sampel. Secara lengkap alokasi sampel per triwulan menurut provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Sampel STKU Menurut Provinsi dan Sektor per Triwulan

Provinsi	Lembaga Keuangan		Perdagangan	Transportasi	KTI	Jumlah Sampel
	LKBB	Pemda				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1100 Aceh	3	6	28	11	10	58
1200 Sumatera Utara	38	6	45	40	33	162
1300 Sumatera Barat	43	6	30	20	13	112
1400 Riau	2	6	35	25	20	88
1500 Jambi	3	6	29	15	10	63
1600 Sumatera Selatan	27	6	29	24	10	96
1700 Bengkulu	3	6	22	10	10	51
1800 Lampung	2	6	29	21	10	68
1900 Kep. Bangka Belitung	3	6	20	18	10	57
2100 Kepulauan Riau	3	6	20	11	8	48
3100 DKI Jakarta	71	6	80	60	52	269
3200 Jawa Barat	27	6	84	39	68	224
3300 Jawa Tengah	39	6	92	47	43	227
3400 D.I. Yogyakarta	3	6	29	17	29	84
3500 Jawa Timur	16	6	79	47	47	195
3600 Banten	2	6	20	16	13	57
5100 Bali	39	6	36	40	24	145
5200 Nusa Tenggara Barat	42	6	30	20	7	105
5300 Nusa Tenggara Timur	3	6	25	21	10	65
6100 Kalimantan Barat	3	6	19	23	9	60
6200 Kalimantan Tengah	3	6	25	19	10	63
6300 Kalimantan Selatan	2	6	27	22	10	67
6400 Kalimantan Timur	11	6	24	25	11	77
7100 Sulawesi Utara	3	6	19	18	6	52
7200 Sulawesi Tengah	3	6	30	17	10	66
7300 Sulawesi Selatan	14	6	35	22	7	84
7400 Sulawesi Tenggara	3	6	31	19	9	68
7500 Gorontalo	3	6	20	10	10	49
7600 Sulawesi Barat	3	6	20	10	6	45
8100 Maluku	2	6	18	13	10	49
8200 Maluku Utara	3	6	16	13	10	48
9100 Papua Barat	3	6	20	13	7	49
9400 Papua	2	6	24	24	10	66
Jumlah	427	198	1.090	750	552	3.017

2.5 Metode Pengumpulan Data

Pencacahan perusahaan dilakukan setelah daftar sampel diterima. Pengumpulan data dari perusahaan/usaha yang terpilih sampel dilakukan melalui wawancara. Untuk perusahaan/usaha yang relatif besar, maka kunjungan bisa dilakukan lebih dari satu kali.

2.6 Alur Pencacahan

1. Triwulan I

Pencacahan triwulan I dilaksanakan pada bulan **April 2014**. Berdasarkan STKU14.DSPU, petugas mencacah perusahaan yang terpilih sebagai sampel. Keberadaan perusahaan dituliskan di STKU14.DSPU.

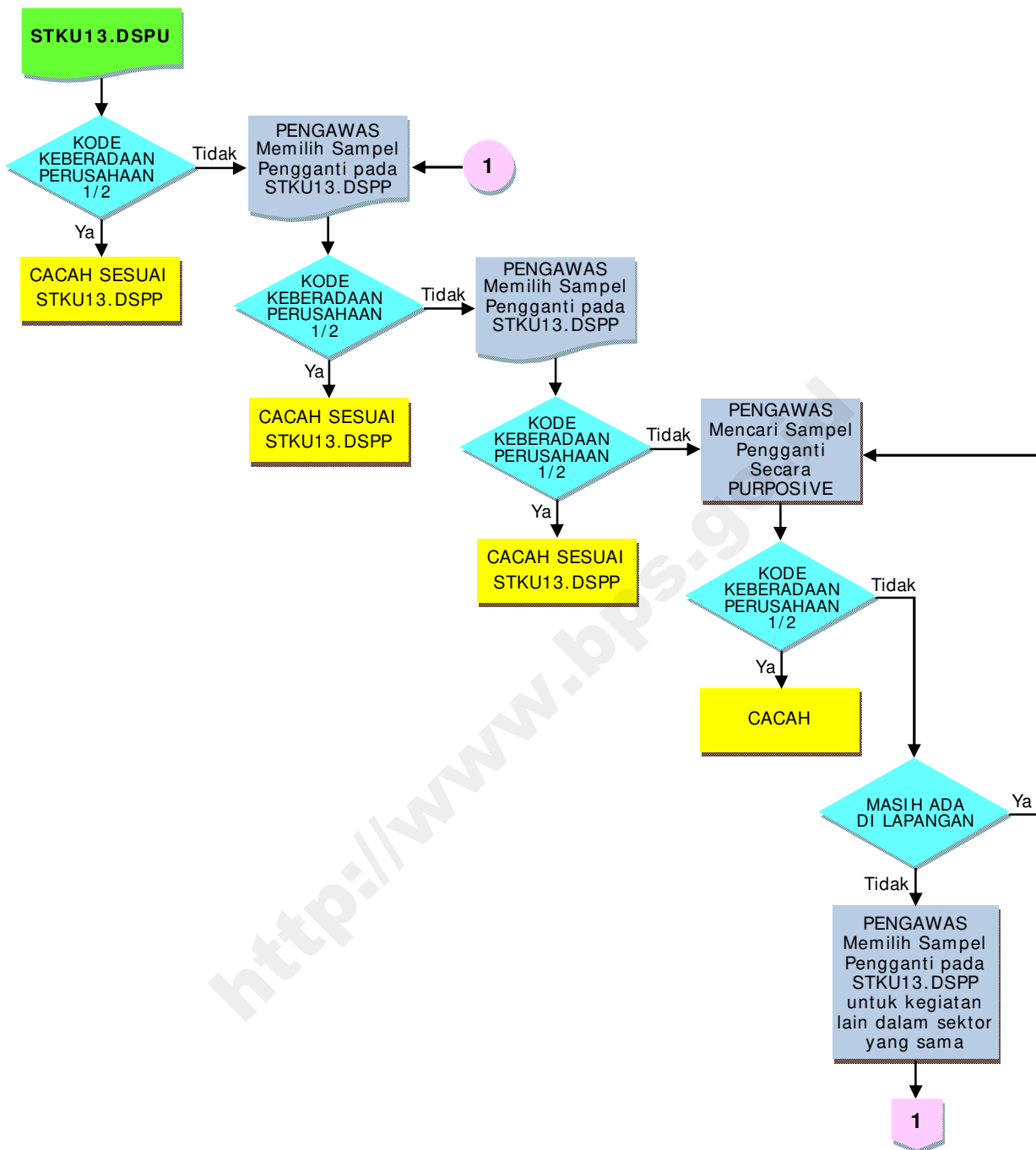
Apabila hasil isian keberadaan perusahaan adalah kode 3 (ditemukan tetapi kegiatan usahanya berubah di luar cakupan KBLI yang diteliti), 4 (pindah dan tidak dapat ditelusuri), 5 (tutup), dan 6 (tidak ditemukan), 7 (ganda/dobel) maka **PENGAWAS** melakukan penggantian sampel yang memiliki kegiatan utama yang sama secara **purposive**.

Apabila sampel yang terpilih adalah sampel *purposive*, maka pemberian nomor urut perusahaan pada kolom (2) dimulai dari nomor 8001 dan seterusnya

2. Triwulan II, III, dan IV

Pencacahan pada triwulan II, III, dan IV dilakukan secara rutin masing-masing pada bulan Juli, Oktober, dan Desember - Januari. Perusahaan sampel yang dikunjungi adalah perusahaan hasil pencacahan triwulan I.

Gambar 1. Diagram Alur Pencacahan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) 2014



2.7 Pelaksanaan Lapangan

1. Organisasi Lapangan

a. Organisasi di Pusat:

- 1) Kegiatan perencanaan dan perumusan konsep dilakukan oleh *subject matter* (Subdit. Stat. PDN, Stat. Transportasi, Stat. KTI dan Stat. Keuangan) bersama-sama dengan direktorat- direktorat yang terkait di Badan Pusat Statistik.
- 2) Kegiatan pengolahan dan tabulasi dilakukan oleh *subject matter* (Subdit. Stat. PDN, Stat. Transportasi, Stat. KTI dan Stat. Keuangan) bersama-sama dengan direktorat-direktorat yang terkait di Badan Pusat Statistik.
- 3) Kegiatan evaluasi hasil dilakukan oleh *subject matter* (Subdit. Stat. PDN, Stat. Transportasi, Stat. KTI dan Stat. Keuangan).

b. Organisasi di Daerah

Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan beban tugas:

- 1) Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab umum kegiatan.
- 2) Kepala Bidang Statistik Distribusi di BPS Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan baik di bidang teknis maupun administrasi.
- 3) Kasie Statistik Niaga dan Jasa dan/atau Kasie Statistik Keuangan dan Harga Pedesaan di BPS Provinsi atau Kasie Statistik Distribusi Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab harian teknis pelaksanaan, pengawasan, dan pengiriman data ke BPS Pusat.
- 4) Staf teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) sebagai tenaga pencacah, dan sekaligus menjadi tenaga pengolah.

2. Jadwal Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan kegiatan STKU Terintegrasi 2014 di BPS RI dan di daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Penanggung Jawab dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Kuesioner	Subdit Stat. PDN, Transportasi, KTI, Keuangan	1 – 15 Februari 2014
2	Penyusunan Buku Pedoman	Subdit Stat. PDN, Transportasi, KTI, Keuangan	14 Februari - 8 Maret 2014
3	Pencetakan dan Pengiriman Kuesioner dan Buku Pedoman	Bagian Penggandaan, Pengadaan, Arsip dan Ekspedisi	11 – 28 Maret 2014
4	Pelaksanaan Lapangan	Bid. Distribusi	
	4.1. Pengumpulan Data	Petugas	
	a. Data Triwulan I 2014		April 2014
	b. Data Triwulan II 2014		Juli 2014
	c. Data Triwulan III 2014		Oktober 2014
	d. Data Triwulan IV 2014		Desember 2014 – Januari 2015
	4.2. Pengawasan dan Pengiriman Hasil Pencacahan Lapangan	Kasi Stat. Niaga & Jasa dan/atau Kasie Stat. Keuangan & Harga Pedesaan, dan Kasie Stat. Distribusi	
	a. Data Triwulan I 2014		April 2014
	b. Data Triwulan II 2014		Juli 2014
	c. Data Triwulan III 2014		Oktober 2014
	d. Data Triwulan IV 2014		Desember 2014 – Januari 2015
5	Pengolahan Hasil Pencacahan	Subdit Stat. PDN, Transportasi, KTI, Keuangan	
	a. Data Triwulan I 2014		April 2014
	b. Data Triwulan II 2014		Juli 2014
	c. Data Triwulan III 2014		Oktober 2014
	d. Data Triwulan IV 2014		Desember 2014– Januari 2015

3. Petugas Lapangan

Petugas lapangan dalam STKU ini terdiri dari:

- a. **Koordinator**; Kepala Bidang Statistik Distribusi di BPS Provinsi atau petugas lain yang ditunjuk.
- b. **Pengawas/ Pemeriksa/ PMS**; Kepala Seksi Niaga & Jasa dan/atau Kepala Seksi Statistik Keuangan dan Harga Pedesaan, Kepala Seksi Statistik Distribusi atau staf BPS Provinsi yang dianggap mampu melakukan pengawasan, memberikan petunjuk dan membantu pemecahan di lapangan.
- c. **Pencacah/ PCS**; Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggap mampu melakukan pencacahan, wawancara serta mengisi kuesioner sebagaimana yang dipersyaratkan. Setiap pencacah akan bertugas setiap triwulanan, dengan beban per triwulan sekitar 10-15 responden yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengawas. Pencacah setelah menerima kuesioner yang sudah terisi dari responden, langsung dientry dan hasil entry diperiksa oleh pemeriksa.

2.8 Konsep dan Definisi

1. Konsep dan Definisi Umum

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan pada setiap kuesioner dalam survei ini antara lain:

- 1) **Perusahaan/ usaha adalah** setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan).
- 2) **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia, yang dirinci menurut kategori. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, badan hukum, formal atau informal. Kode KBLI yang digunakan adalah Peraturan Kepala BPS No.57 tahun 2009 tentang KBLI.
- 3) **Pekerja adalah** semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha. Yang termasuk dalam pekerja adalah pekerja dibayar dan tidak dibayar. Dan juga pekerja tetap, pekerja kontrak dan pekerja tidak tetap.

- 4) **Pekerja dibayar adalah** pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.
- 5) **Pekerja tidak dibayar adalah** pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.
- 6) **Balas jasa adalah** seluruh pengeluaran yang diberikan kepada pekerja/karyawan yang dibayar, seperti: upah/gaji, upah lembur, tunjangan, bonus dan sejenisnya, asuransi, dana pensiun dan lain-lain baik dalam bentuk uang/barang.
- 7) **Upah/ gaji adalah** adalah balas jasa pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan, dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca perusahaan. Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan tetap dimasukkan di rincian upah/gaji.
- 8) **Upah lembur adalah** upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
- 9) **Hadiah adalah** pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja.
- 10) **Tunjangan adalah** pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.
- 11) **Pendapatan adalah** nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha. Termasuk pendapatan lain-lain.

2. Konsep dan Definisi Khusus

a. STKU - PERDAGANGAN (STKU-G) 2013

- 1) **Kegiatan Perdagangan adalah** kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas untuk tujuan penyaluran/pendistribusian **tanpa mengubah bentuk** barang tersebut.
- 2) **Perusahaan/ usaha perdagangan adalah** perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas, yang meliputi perdagangan

besar (distributor, sub distributor, agen, sub agen, grosir, pengumpul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran.

- 3) **Perdagangan besar adalah** penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. (**Buku KBLI 2009**).
- 4) **Perdagangan eceran adalah** penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. (**Buku KBLI 2009**).
- 5) **Jenis komoditi merupakan** uraian lebih lanjut dari kelompok komoditi. Setiap kelompok komoditi diuraikan menjadi satu atau beberapa jenis komoditi.
- 6) **Kelompok komoditi adalah** suatu klasifikasi barang ekonomi perdagangan yang homogen seperti kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, elektronik, furniture, dan lain sebagainya.
- 7) **Kegiatan utama adalah** kegiatan yang mempunyai nilai penjualan paling besar di antara beberapa jenis kegiatan dalam suatu perusahaan/usaha. Misal: Suatu perusahaan/usaha menjual berbagai macam keperluan rumah tangga, disamping itu dia juga menerima barang titipan (konsinyasi) untuk dijual, dimana omset terbesarnya adalah dari penjualan berbagai macam keperluan rumah tangga. Jadi kegiatan utama perusahaan/usaha tersebut adalah perdagangan berbagai macam keperluan rumah tangga. Bila suatu perusahaan/usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan maka jenis kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan utama dari perusahaan/usaha.
- 8) **Nilai penjualan (Omset)** adalah hasil penjualan barang dagangan yang terjual, tidak termasuk barang konsinyasi.
- 9) **Nilai pembelian adalah** uang yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk membeli barang dagangan yang terjual.
- 10) **Margin adalah** selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian barang dagangan yang terjual.

- 11) Pendapatan dari fee/ komisi barang konsinyasi adalah** komisi yang diterima dari barang dagangan titipan yang terjual.

Cakupan **KBLI** pada **STKU-PERDAGANGAN** (STKU-G) 2014 adalah sebagai berikut:

- **PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya (**45101**).

- **PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya (**45102**).

- **PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya (**45103**).

- **PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya (**45104**).

- **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped (**45401**).

- **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped (**45402**).

- **PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped (**45403**).

- **PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped (**45404**).

- **PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, kacang-kacangan dan sebagainya (**46201**).

- **PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit (**46202**).

- **PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya (**46205**).

- **PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok (**46206**).

- **PERDAGANGAN BESAR BERAS**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir (**46311**).

- **PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya (**46312**).

- **PERDAGANGAN BESAR SAYURAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya (**46313**).

- **PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao untuk digunakan sebagai konsumsi akhir (**46314**).

- **PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula (**46331**).

- **PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih (**46335**).

- **PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain (**46411**).

- **PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki (**46412**).

- **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, *wallpaper*, karpet dan sebagainya (**46491**).

- **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi (**46523**).

- **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain (**46638**).

- **PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kertas dan karton (**46695**).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/ MINIMARKET**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/ makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self*

service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket (47111).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/ MINIMARKET (TRADISIONAL)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/ makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok (47112).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA/ DEPARTMENT STORE**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (*department store*), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik (47191).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG BUKAN DI TOSERBA/ DEPARTMENT STORE)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/*department store*. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong (47192).

- **PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong (47211).

- **PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka (47212).

- **PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah (47213).

- **PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas (47214).

- **PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener (benih ikan bandeng), benur (benih udang), benih ikan/ikan hias dan rumput laut (47215).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERAS**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras Saigon dan beras ketan (47221).

- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rokok dan atau tembakau di dalam bangunan seperti rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok kelembak, tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa/papier (47240).

- **PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti *handphone*, pesawat telepon dan perlengkapannya serta usaha jasa penjualan pulsa, baik berupa voucher maupun elektronik, termasuk pula jasa penjualan kartu perdana telepon selular (47414).

- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, *tape*

recorder, audio amplifier dan cassette recorder. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD (**47420**).

- **PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, *cooling products*, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini (**47301**). Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772.

- **PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman (**47511**).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain (**47528**).

- **PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling (**47591**).

- **PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/ KARTON**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (*fiber board*), kertas

pembungkus (*wrapping*), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (*stationary*), stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplikator (**47650**).

- **PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah (**47711**).

b. STKU - TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN (STKU-H) 2013

- 1) **Perusahaan angkutan** adalah usaha angkutan yang diselenggarakan/dikelola secara komersial, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri meliputi biaya, output/omzet, pekerja dan balas jasa pekerja yang digunakan dalam proses usaha. **Catatan:** Kendaraan yang digunakan dalam usaha angkutan dapat kendaraan milik sendiri atau kendaraan milik orang lain.
- 2) **Kegiatan Transportasi dan pergudangan** mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
- 3) **Kegiatan utama** adalah kegiatan yang mempunyai nilai pendapatan paling besar di antara beberapa jenis kegiatan dalam suatu perusahaan/usaha. Bila suatu perusahaan/usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan maka jenis kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan utama dari perusahaan/ usaha.

Cakupan **KBLI STKU–TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN (STKU–H) 2013** adalah sebagai berikut:

- **Angkutan Penumpang(Bus)**
 - **Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)** mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan(**49211**).

- **Angkutan Bus Perbatasan** mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP(49212).
- **Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)** mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan (49213).
- **Angkutan Bus Kota** mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek(49214).
- **Angkutan Bus Lintas Batas Negara** mencakup usaha pengangkutan orang dari satu kota ke kota lain yang melewati batas negara dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek(49215).
- **Angkutan Bus Khusus** mencakup usaha pengangkutan orang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pepadu moda menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang)(49221).
- **Angkutan Bus Pariwisata** mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial, bus wisata. Misalnya White Horse, Blue Bird, Blue Star (49222).
- **Angkutan Penumpang (Bukan Bus)**
 - **Angkutan Perbatasan Bukan Bus** mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP (49411).
 - **Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus** mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan (49412).
 - **Angkutan Perkotaan** mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah

ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan kendaraan bermotor selain bus atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek (**49413**).

- **Angkutan Perdesaan** mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang menghubungkan antar perdesaan dan atau ibukota kabupaten, dengan menggunakan kendaraan bermotor selain bus berdasarkan trayek dan tidak berdasarkan jadwal tertentu (**49414**).
- **Angkutan Taksi**, mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas (**49421**).
- **Angkutan Sewa** mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan (**49422**).
- **Angkutan Barang**
 - **Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum** mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan container (**49431**).
 - **Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus** mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat (**49432**).
- **Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Mencakup angkutan penumpang atau barang pada perairan dalam, termasuk persewaan kapal pesiar dengan kru untuk perairan dalam. ASDP terdiri dari kegiatan:

 - Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tetap Dan Teratur (**50211**)
 - Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur (**50212**)

- Angkutan Sungai Dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Untuk Wisata (**50213**)
- Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Penumpang (**50214**)
- Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang (**50215**)
- Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang (**50216**)
- Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang (**50217**)
- Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota Untuk Penumpang (**50218**)
- Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara (**50219**)
- Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan (**50221**)
- Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus (**50222**)
- Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya (**50223**)
- Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang (**50224**)
- Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang (**50225**)
- Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota Untuk Barang (**50226**)
- Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk Barang (**50227**)
- Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota Untuk Barang (**50228**)
- Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara (**50229**)
- **Pergudangan** mencakup pengusahaan fasilitas penyimpanan dan penggudangan untuk semua jenis barang, seperti gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain). Di sini juga mencakup penggudangan dari barang dalam zona perdagangan luar negeri. Tidak termasuk fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor, pengelolaan fasilitas penyimpanan sendiri dan penyewaan ruang kosong (**52101**)

- **Jasa Cold Storage** mencakup usaha jasa penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. (52102)
- **Perparkiran** mencakup usaha penyelenggaraan parkir yang dilakukan di badan jalan dan penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumahsakit dan jasa perparkiran di luar badan jalan lainnya. (52214 dan 52215)
- **Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)** mencakup: kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal, kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang (52240)
- **Jasa Ekspedisi** mencakup usaha jasa pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar melalui berbagai armada transportasi, seperti:
 - **Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)** mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. (52291)
 - **Jasa Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)** mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat (52292).
 - **Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)** mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut (52293).
 - **Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)** mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara (52294).
- **Kurir** mencakup usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta, seperti TIKI (Titipan Kilat), DHL. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko. Kegiatannya mencakup pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengiriman (*domestic* atau *internasional*) surat pos dan bingkisan (berbentuk surat) dan bungkusan oleh perusahaan yang tidak beroperasi di bawah pelayanan umum. Satu atau lebih moda transportasi mungkin dilibatkan dan aktivitas pengiriman mungkin

dilakukan dengan angkutan pribadi atau angkutan umum. Termasuk pendistribusian dan pengiriman surat dan bingkisan (*parcel*) (**53200**).

c. STKU - INFORMASI (STKU-J) 2014

- 1) **Informasi** adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan.
- 2) **Penerbitan** adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan proses editorial, produksi, dan pemasaran barang-barang, naskah tercetak yang didistribusikan kepada pembaca.
- 3) **Koran** atau **surat kabar** adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut [kertas koran](#), yang berisi [berita-berita](#) terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa even [politik](#), [kriminalitas](#), [olahraga](#), [tajuk rencana](#), [cuaca](#). Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali pada [hari-hari libur](#). Surat kabar sore juga umum di beberapa negara. Selain itu, juga terdapat surat kabar mingguan (tabloid) yang biasanya lebih kecil dan kurang prestisius dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya lebih bersifat hiburan.
- 4) **Tiras/ Oplah** adalah jumlah surat kabar yang diterbitkan menurut periode terbit.
- 5) **Siaran** adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- 6) **Radio** adalah media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio.
- 7) **Penyiaran Radio** adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan, informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- 8) **Durasi** adalah lamanya sesuatu berlangsung/rentang waktu.
- 9) **Iklan/pariwara** adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang

bersangkutan(promosi barang, jasa, perusahaan, ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor).

- 10) **Iklan Komersial** adalah iklan yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- 11) **Iklan Non Komersial/iklan layanan masyarakat** adalah iklan yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Cakupan **KBLI** pada **STKU – INFORMASI** (STKU – J) 2014 adalah sebagai berikut:

- **Penerbitan surat kabar, jurnal, buletin atau majalah** adalah kegiatan yang mencakup usaha penerbitan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, termasuk komik, penerbitan jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet. Dalam kegiatan ini tidak mencakup perdagangan eceran *software*, penerbitan surat kabar periklanan, dan penyediaan *software* secara online (aplikasi hosting dan penyediaan jasa aplikasi). **(58130)**.
- **Penyiaran Radio Oleh Swasta**, mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan siaran radio yang dikelola oleh swasta, seperti penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi pemograman sinyal suara kepada masyarakat atau pendengar; kegiatan jaringan radio, yaitu mengumpulkan dan mengirimkan program sinyal suara untuk pendengar lewat udara, kabel atau satelit; kegiatan penyiaran radio lewat internet (stasiun radio internet); dan penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio. Termasuk juga stasiun relay (pemancar kembali) siaran radio **(60102)**.

d. STKU – LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (STKU-K) 2014

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan di setiap kuesioner dalam survei ini antara lain:

1) **Jenis lapangan usaha** adalah klasifikasi lapangan usaha menurut kegiatan ekonomi. Adapun lapangan usaha yang dicakup dalam survei ini meliputi 16 kelompok, diantaranya adalah:

- a) Asuransi Jiwa Konvensional,
- b) Asuransi Jiwa Syariah,
- c) Asuransi Jiwa Non Konvensional,
- d) Asuransi Jiwa Syariah,
- e) Reasuransi Konvensional,
- f) Reasuransi Syariah,
- g) Dana Pensiun,
- h) Koperasi Simpan Pinjam,
- i) Pedagang Valuta Asing,
- j) Sewa Guna Usaha,
- k) Anjak Piutang,
- l) Kartu Kredit,
- m) Pembiayaan Konsumen,
- n) Manager Investasi,
- o) *Adjuster*, dan
- p) Aktuaris.

Klasifikasi kegiatan usaha yang tercakup dalam survei ini adalah sebagai berikut:

a) **ASURANSI**

Kelompok ini mencakup usaha yang berkaitan dengan asuransi, yakni perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Usaha yang tercakup dalam kelompok ini adalah Asuransi Jiwa Konvensional (65111), Asuransi Jiwa Syariah (65112), Asuransi Jiwa Non Konvensional (65121), Asuransi Jiwa Syariah (65122), Reasuransi Konvensional (65201), dan Reasuransi Syariah (65202).

- ❖ **Asuransi Jiwa:** asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Contoh: PT. AJB Bumiputera 1912, PT. Astra CMG Life.
- ❖ **Asuransi Kerugian:** asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- ❖ **Reasuransi:** asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

b) DANA PENSIUN

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala ataupun sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Termasuk dalam kelompok ini usaha mengumpulkan dan menginvestasikan dana untuk keperluan pembayaran sejumlah uang pada masa pensiun. Yang termasuk ke dalam usaha dana pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja. (65300)

c) KOPERASI SIMPAN PINJAM

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha simpan pinjam bagi para anggotanya. (64140)

d) PEGADAIAN

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan. (64921)

e) PEDAGANG VALUTA ASING

Pedagang valuta asing adalah perusahaan yang memperoleh izin Bank Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli mata uang asing/valuta asing. (66197)

f) PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan ini terdiri dari sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. (64300)

❖ **Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing)** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *Finance Lease* maupun *Operating Lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Contoh: Exim SB Leasing.

❖ **Perusahaan Anjak Piutang (Factoring)** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Contoh: Niaga Factoring.

❖ **Perusahaan Usaha Kartu Kredit (Credit Card):** badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa pemegang kartu kredit. **Contoh:** PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional.

❖ **Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance):** badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/berkala oleh konsumen. Contoh: Adira Dinamika Finance.

g) MODAL VENTURA

Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu (maksimal 10 tahun). Perusahaan Modal Ventura terlibat secara tidak langsung dalam aspek-aspek manajemen, administrasi, pemasaran yang tujuannya untuk

mengembangkan PPU. (64991)

h) JASA PENUNJANG ASURANSI

Jasa penunjang asuransi adalah usaha yang berkaitan dengan jasa penunjang perusahaan asuransi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah broker, penilai kerugian asuransi (*adjuster*), dan aktuaris.

❖ **Adjuster** adalah seseorang atau badan usaha independen yang bertugas memeriksa penyebab, menaksir, dan menghitung kerugian-kerugian yang diderita tertanggung karena suatu musibah, dan memberikan pendapat/pandangannya apakah kerugian tersebut disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin sesuai polis yang dikeluarkan. (66210)

❖ **Aktuaris** adalah kegiatan usaha perseorangan yang menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk menentukan atau menghitung kemungkinan-kemungkinan berdasarkan data-data statistik dalam menyusun atau merancang berbagai jenis program asuransi jiwa, dan menentukan besarnya tarif premi. (66291)

- 2) **Pekerja usaha Dana Pensiun:** Pada usaha Dana Pensiun, pekerja yang dimaksud adalah pengelola usaha Dana Pensiun.
- 3) **Pekerja usaha Koperasi Simpan Pinjam:** Pada usaha Koperasi Simpan Pinjam, pekerja yang dimaksud adalah pengelola usaha Koperasi Simpan Pinjam.
- 4) **Premi yang diterima** adalah uang yang diterima oleh perusahaan asuransi/reasuransi dari pihak tertanggung.
- 5) **Klaim yang dibayarkan** adalah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi/reasuransi kepada tertanggung.
- 6) **Kredit/ pembiayaan yang disalurkan** adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara pihak pemberi kredit dengan penerima kredit.
- 7) **Posisi simpanan yang diterima** adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada koperasi dalam bentuk tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 8) **Nilai penjualan/ Nilai valas yang dijual** adalah seluruh nilai valas yang dijual oleh perusahaan pedagang valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs jual) yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

- 9) **Nilai pembelian/ Nilai Valas yang dibeli:** seluruh nilai valas yang dibeli oleh perusahaan pedagang valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs beli) yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

e. STKU– KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STKU – O) 2014

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam kuesioner STKU-O ini adalah :

- 1) **Pendapatan daerah** adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Dana Perimbangan
- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah

- a) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan atau peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- **Pajak Daerah** adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sedangkan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, lingkungan, dan lain-lain.
- **Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** adalah pendapatan asli daerah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

b) **Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- **Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak**

- **Bagi Hasil Pajak** adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.
- **Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam** adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.
- **Dana Alokasi Khusus (DAK)** adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
 - Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
 - Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.
- Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

c) **Lain-lain Pendapatan yang Sah** adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2) **Belanja Daerah** adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari:

- a) Belanja Tidak Langsung
- b) Belanja Langsung

a) **Belanja Tidak Langsung** adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

- **Belanja Pegawai** adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- **Belanja Bantuan Sosial** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- **Belanja tidak langsung lainnya** adalah belanja yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.
 - **Belanja Bunga** adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - **Belanja Subsidi** adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.
 - **Belanja Hibah** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

- **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa** adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

- **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa** adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

- **Belanja Tidak Terduga** adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b) Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

- **Belanja Pegawai** adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - **Belanja Barang dan Jasa** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan peng-gandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lain-lain belanja barang dan jasa.
 - **Belanja Modal** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset lainnya.
- 3) Penerimaan Pembiayaan Daerah** terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
- 4) Pengeluaran Pembiayaan Daerah** terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

2.9 Batasan Penyajian

Pada hakikatnya kegiatan STKU Terintegrasi 2014 adalah untuk mendapatkan gambaran data secara kontinue (triwulanan) dan komprehensif dari usaha-usaha yang tercakup. STKU Terintegrasi 2014 merupakan panel survei yaitu suatu responden akan dicacah setiap triwulan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan data tersebut adalah beberapa responden memberikan jawaban pada triwulan I, kemudian tidak memberikan jawaban pada triwulan II, III, dan/atau IV (tidak lengkap 4 triwulan). Dengan metode panel survei ada kecenderungan respon responden makin menurun dari triwulan I sampai dengan triwulan IV yang berakibat pada ketidak lengkapan series data dalam satu tahun.

Berdasarkan kondisi data yang diperoleh, maka penyajian data dalam publikasi STKU-Perdagangan (STKU-G) dibatasi hanya menyajikan indeks nilai penjualan, indeks nilai pembelian setiap triwulan dalam satu tahun baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Disamping itu disajikan pula indeks nilai produktivitas tenaga kerja dan prospek kegiatan usaha (omset) pada triwulan mendatang. Karena adanya kendala series data yang tidak lengkap, indeks triwulan IV tahun 2014 terhadap triwulan IV tahun 2013 (year on year index) belum dapat disajikan.

Sebagaimana dalam tujuan survei telah disebutkan bahwa akan diperoleh indeks nilai margin perdagangan dan pengangkutan. Untuk menghitung nilai indeks tersebut diperlukan informasi nilai pembelian dan nilai penjualan untuk barang yang sama dalam suatu periode tertentu seperti triwulanan. Berdasarkan hasil lapangan masih ditemui permasalahan pada data yang diperoleh maka indeks tersebut belum dapat disajikan. Permasalahan pada data tersebut diantaranya pada nilai pembelian barang dagangan yang terjual pada bulan-bulan (triwulan) pencacahan, data yang diperoleh adalah nilai pembelian barang dagangan pada bulan-bulan (triwulan) pencacahan. Akibatnya data pada beberapa responden terjadi nilai pembelian barang dagangan lebih besar dari nilai penjualan.

Pada STKU Transportasi dan Pergudangan (STKU-H), seperti STKU sektor lainnya, dengan metode panel survei yang digunakan akan terjadi kecenderungan respon rate yang semakin menurun dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sehingga penyajian data mengenai kegiatan usaha Transportasi dan Pergudangan dibatasi pula hanya menyajikan indeks (pekerja, balas jasa pekerja, pendapatan, produktivitas pekerja, dan produksi perusahaan) setiap triwulan dalam satu tahun.

Di samping itu, tidak semua kegiatan usaha pada sektor Transportasi dan Pergudangan dicakup dalam STKU Terintegrasi 2014 ini. Hanya delapan kegiatan usaha yang dicakup, yaitu angkutan penumpang, angkutan barang, ASDP-Non PT.ASDP (Persero), pergudangan/cold storage, perparkiran,

bongkar muat, ekspedisi, dan kurir. Sehingga dalam pembahasan hasil, yang dimaksud kegiatan usaha Transportasi dan Pergudangan adalah kegiatan usaha yang menjadi cakupan STKU 2013 yaitu delapan kegiatan usaha tersebut.

STKU-Informasi (STKU-J) dibatasi hanya untuk indeks jumlah pekerja, indeks balas jasa pekerja, indeks pendapatan, dan indeks output setiap triwulan atas dasar harga berlaku. Disamping itu seperti halnya STKU-Perdagangan disajikan pula indeks nilai produktivitas tenaga kerja. Karena adanya kendala series data yang tidak lengkap, indeks triwulan IV tahun 2014 terhadap triwulan IV tahun 2013 (year on year index) belum dapat disajikan.

Penyajian analisis perkembangan kegiatan STKU-K dalam publikasi ini tidak didasarkan pada nilai nominal, namun berdasarkan nilai indeks setiap triwulannya, dikarenakan keterbatasan jumlah sampel dan tingkat respon. Karakteristik yang dicakup dalam survei ini dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu karakteristik perusahaan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus dimana biasanya indikator ini melekat pada suatu jenis usaha, namun tidak dimiliki oleh jenis usaha lain. Karakteristik ataupun indikator umum meliputi; jumlah pekerja/tenaga kerja, balas jasa pegawai (gaji dan lainnya), dan pendapatan usaha.

BAB III

PEMBAHASAN

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) terintegrasi Tahun 2014 mencakup usaha-usaha pada sektor Perdagangan, Transportasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi (KTI) dan Lembaga Keuangan. Analisis dari hasil STKU Tahun 2014 akan disajikan menurut sektor serta karakteristik data masing-masing sektor.

3.1 PERDAGANGAN

Hasil Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Sektor Perdagangan Tahun 2014 di Indonesia yang dilaksanakan di seluruh provinsi, serta melibatkan responden sebanyak 4.360 perusahaan/usaha yang dikategorikan dalam jenis kegiatan usaha Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor, Perdagangan Besar (PB) Selain Mobil dan Sepeda Motor, dan Perdagangan Eceran (PE) Selain Mobil dan Sepeda Motor (Swalayan, *Department Store*, dan PE Lainnya), memperlihatkan terjadinya fluktuasi nilai penjualan, nilai pembelian dan produktivitas, serta variatifnya persepsi tentang prospek perusahaan/usaha perdagangan tersebut.

Tabel 3.1.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Triwulanan di Indonesia, 2014

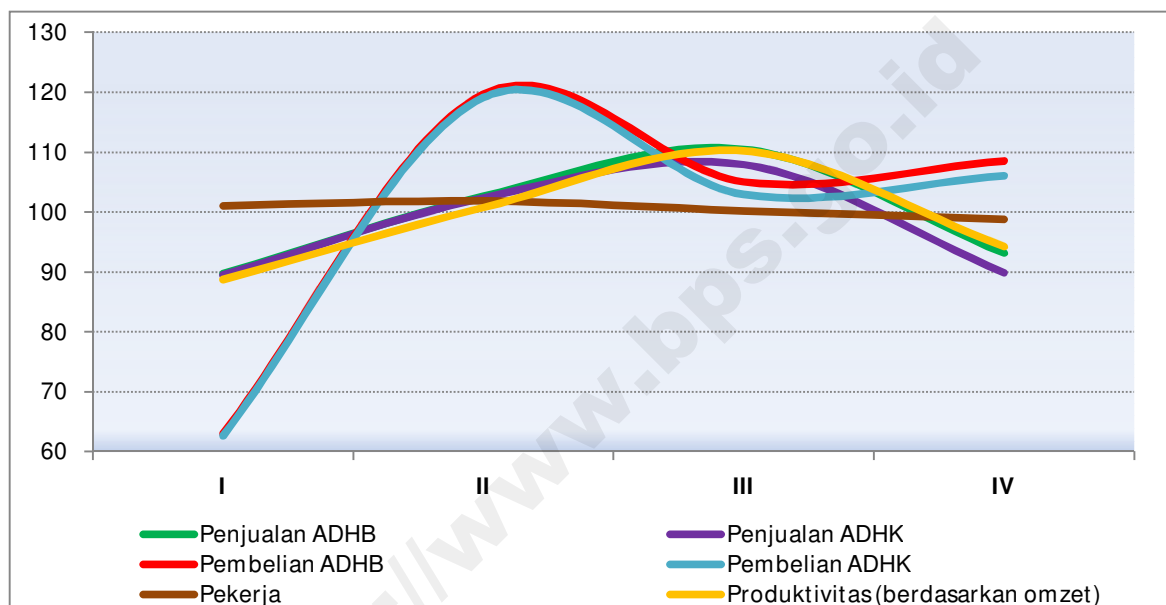
Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	89,67	102,62	110,46	93,14
- Atas Dasar Harga Konstan	89,43	102,31	107,88	89,81
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	62,94	119,62	104,99	108,49
- Atas Dasar Harga Konstan	62,68	119,10	102,92	106,05
3. Pekerja	101,03	101,83	100,22	98,82
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	88,75	100,77	110,22	94,25

Berdasarkan hasil pengamatan STKU 2014, nilai penjualan dan nilai pembelian perusahaan/usaha perdagangan pada triwulan I mengalami penurunan baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Peningkatan indeks penjualan terjadi pada triwulan II dan triwulan III, kemudian mengalami penurunan kembali di triwulan IV. Adapun indeks pembelian terus meningkat dari triwulan II sampai dengan triwulan IV. Peningkatan penjualan tertinggi terjadi

pada triwulan III, sedangkan peningkatan pembelian tertinggi terjadi pada triwulan II dengan masing-masing kenaikan nilai indeks atas harga berlaku sebesar 10,46 persen dan 19,62 persen. Perkembangan penjualan dan pembelian kegiatan perdagangan diperlihatkan oleh Grafik 3.1.1.

Jumlah pekerja pada sektor perdagangan menunjukkan tren meningkat pada triwulan I sampai dengan triwulan III, dengan peningkatan jumlah pekerja tertinggi sebesar 1,83 persen yang terjadi di triwulan II. Adapun di triwulan IV, jumlah pekerja menurun sebesar 1,18 persen.

Grafik 3.1.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Triwulanan di Indonesia, 2014



Selanjutnya, dari Tabel 3.1.1 dan grafik 3.1.1 dapat dilihat pula informasi mengenai perkembangan produktivitas perdagangan. Produktivitas disini dimaksudkan untuk mengukur keseluruhan nilai penjualan yang mampu dihasilkan oleh setiap pekerja. Oleh karena didasarkan pada omzet, pola perkembangan produktivitas perdagangan mirip dengan pola perkembangan nilai penjualan. Produktivitas perdagangan tahun 2014 secara umum menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pada triwulan I produktivitas perdagangan mengalami penurunan sebesar 11,25 persen, kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,77 persen di triwulan II dan 10,22 persen di triwulan III. Pada triwulan IV produktivitas perdagangan mengalami penurunan sebesar 5,75 persen.

3.1.1 Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor

Indeks penjualan dan pembelian kegiatan perdagangan mobil dan sepeda motor tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan secara

umum mempunyai pola yang sama pada setiap triwulannya, yaitu nilai penjualan dan pembelian mengalami penurunan pada dua triwulan pertama dan mengalami peningkatan pada dua triwulan berikutnya. Penurunan penjualan dan pembelian terendah terjadi pada triwulan II dengan penurunan indeks atas dasar harga berlaku masing-masing sebesar 18,56 persen dan 13,69 persen. Adapun peningkatan penjualan dan pembelian mobil dan sepeda motor tertinggi terjadi pada triwulan IV, dengan kenaikan indeks atas dasar harga berlaku masing-masing sebesar 24,86 persen dan 26,94 persen.

Tabel 3.1.2
Indeks Kegiatan Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor
Triwulanan di Indonesia, 2014

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	95,87	81,44	108,22	124,86
- Atas Dasar Harga Konstan	94,16	81,22	108,07	124,79
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	95,60	86,31	119,50	126,94
- Atas Dasar Harga Konstan	93,92	85,98	119,38	126,86
3. Pekerja	106,04	101,8	101,07	100,60
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	90,42	80,00	107,07	124,11

Jumlah pekerja pada kegiatan perdagangan mobil dan sepeda motor pada tahun 2014 menunjukkan tren yang terus meningkat pada setiap triwulannya dengan peningkatan tertinggi pada triwulan I sebesar 6,04 persen dan peningkatan terendah pada triwulan IV sebesar 0,6 persen.

Selanjutnya, dari Tabel 3.1.2 dapat dilihat pula informasi mengenai perkembangan produktivitas perdagangan mobil dan sepeda motor tahun 2014. Produktivitas perdagangan mobil dan sepeda motor secara umum menunjukkan fluktuasi yang sama dengan nilai penjualan dan pembelian. Produktivitas mengalami penurunan pada dua triwulan pertama dan mengalami peningkatan pada dua triwulan akhir. Pada triwulan II produktivitas perdagangan mengalami penurunan terendah yakni sebesar 20 persen dan pada triwulan IV produktivitas mengalami peningkatan tertinggi yakni sebesar 24,11 persen.

3.1.1.1. Perdagangan Mobil

Indeks penjualan dan pembelian kegiatan perdagangan mobil tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan secara umum mempunyai pola yang sama pada setiap triwulannya. Nilai penjualan dan pembelian mengalami penurunan pada triwulan I kemudian mengalami peningkatan pada tiga triwulan berikutnya. Peningkatan nilai penjualan dan pembelian mobil tertinggi terjadi pada triwulan IV, dengan kenaikan indeks atas dasar harga berlaku masing-masing sebesar 23,66 persen dan 22,93 persen.

Tabel 3.1.2.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Mobil
Triwulanan di Indonesia, 2014

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	94,98	103,94	115,19	123,66
- Atas Dasar Harga Konstan	93,12	103,30	115,14	123,63
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	94,85	105,04	119,56	122,93
- Atas Dasar Harga Konstan	93,12	104,34	119,51	122,90
3. Pekerja	107,66	101,94	100,92	101,48
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	88,22	101,96	114,14	121,86

Jumlah pekerja pada kegiatan perdagangan mobil pada tahun 2014 menunjukkan tren meningkat. Pada triwulan I terlihat terjadi peningkatan sebesar 7,66 persen, kemudian meningkat terus sampai dengan triwulan IV yang mengalami peningkatan sebesar 1,48 persen.

Produktivitas perdagangan mobil secara umum menunjukkan fluktuasi yang sama dengan nilai penjualan dan pembelian. Produktivitas mengalami penurunan pada triwulan I kemudian terus meningkat pada tiga triwulan berikutnya. Produktivitas tertinggi terjadi pada triwulan IV yakni sekitar 21,86 persen.

3.1.1.2. Perdagangan Sepeda Motor

Indeks penjualan kegiatan perdagangan sepeda motor tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan fluktuasi yang berbeda. Perbedaan indeks terjadi pada triwulan I dimana indeks atas dasar harga berlaku

menunjukkan peningkatan sekitar 0,34 persen sedangkan indeks atas dasar harga konstan menunjukkan penurunan sekitar 0,64 persen. Perbedaan arah pada kedua indeks nilai penjualan atas dasar harga berlaku dibandingkan dengan harga konstannya mengindikasikan adanya pengaruh kenaikan harga (inflasi) pada aktivitas ini di triwulan tersebut.

Adapun indeks pembelian menunjukkan fluktuasi yang sama pada indeks atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Indeks pembelian atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa pembelian mengalami penurunan pada triwulan I dan II masing-masing sekitar 0,84 persen dan 27,69 persen, kemudian mengalami peningkatan pada triwulan III dan IV masing-masing sekitar 18,82 persen dan 73,54 persen.

Jumlah pekerja pada kegiatan perdagangan sepeda motor pada tahun 2014 meningkat pada tiga triwulan pertama masing-masing sebesar 2,92 persen, 1,50 persen, dan 1,38 persen. Namun kemudian sedikit menurun pada triwulan akhir dengan penurunan sebesar 0,86 persen.

Tabel 3.1.2.2
Indeks Kegiatan Perdagangan Sepeda Motor
Triwulanan di Indonesia, 2014

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	100,34	71,62	72,38	134,57
- Atas Dasar Harga Konstan	99,36	71,58	71,80	134,20
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	99,16	72,31	118,82	173,54
- Atas Dasar Harga Konstan	97,71	72,25	117,96	172,98
3. Pekerja	102,92	101,50	101,38	99,14
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	97,49	70,56	71,40	135,73

Berbanding terbalik dengan jumlah pekerja, produktivitas perdagangan sepeda motor tahun 2014 menunjukan penurunan pada tiga triwulan pertama dengan nilai penurunan masing-masing sekitar 2,51 persen, 29,44 persen, dan 28,60 persen. Sedangkan pada triwulan IV produktivitas pekerja berdasarkan omset penjualan meningkat sebesar 35,73 persen.

3.1.2 Perdagangan Besar Selain Mobil dan Sepeda Motor

Indeks penjualan dan pembelian kegiatan perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun harga

konstan secara umum terlihat mempunyai fluktuasi yang sama pada setiap triwulannya. Nilai penjualan dan pembelian mengalami penurunan pada triwulan I, kemudian meningkat pada triwulan II dan mengalami penurunan kembali pada triwulan III dan IV. Peningkatan nilai penjualan dan pembelian pada triwulan II berdasarkan indeks atas dasar harga berlaku masing-masing adalah sekitar 22,49 persen dan 11,43 persen. Sedangkan penurunan nilai penjualan dan pembelian terendah berdasarkan indeks atas dasar harga berlaku terjadi pada triwulan IV, masing-masing sekitar 27,08 persen dan 30,84 persen.

Jumlah pekerja pada kegiatan perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor pada tahun 2014 menunjukkan tren meningkat. Pada triwulan I terlihat terjadi peningkatan sebesar 0,30 persen, kemudian terus meningkat sampai dengan triwulan IV yang mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen.

Tabel 3.1.3
Indeks Kegiatan Perdagangan Besar Selain Mobil dan Sepeda Motor
Triwulanan di Indonesia, 2014

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	95,28	122,49	84,98	72,92
- Atas Dasar Harga Konstan	94,06	119,53	76,39	71,51
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	95,54	111,43	80,56	69,16
- Atas Dasar Harga Konstan	94,30	108,56	72,13	67,17
3. Pekerja	100,30	100,65	101,23	100,01
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	94,99	121,69	83,95	72,91

Selanjutnya, dari tabel diatas diperoleh informasi mengenai perkembangan produktivitas perdagangan besar selain mobil dan motor. Produktivitas perdagangan besar selain mobil dan motor tahun 2014 secara umum mengikuti fluktuasi nilai penjualan dan pembelian. Pada triwulan I produktivitas perdagangan mengalami penurunan sebesar 5,01 persen, kemudian meningkat 21,69 persen di triwulan II. Pada triwulan III dan triwulan IV produktivitas mengalami penurunan kembali sebesar 16,05 persen dan 27,09 persen.

3.1.3 Perdagangan Eceran Selain Mobil dan Sepeda Motor

Indeks penjualan dan pembelian kegiatan perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan secara umum terlihat mempunyai fluktuasi yang sama pada setiap

triwulannya. Nilai penjualan dan pembelian mengalami penurunan pada triwulan I, kemudian meningkat pada triwulan II dan triwulan III dan mengalami penurunan kembali pada triwulan IV. Perbedaan hanya terjadi pada triwulan III dimana indeks pembelian atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan 0,46 persen sedangkan indeks pembelian atas dasar harga konstan mengalami penurunan 1,86 persen. Perbedaan fluktuasi pada indeks pembelian atas dasar harga berlaku dibandingkan harga konstan, mengindikasikan adanya pengaruh kenaikan harga (inflasi) pada aktivitas ini di triwulan tersebut.

Tabel 3.1.4
Indeks Kegiatan Perdagangan Eceran Selain Mobil dan Sepeda Motor
Triwulanan di Indonesia, 2014

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	89,26	103,59	112,85	63,25
- Atas Dasar Harga Konstan	89,10	103,46	109,98	55,61
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	58,98	128,99	100,46	81,10
- Atas Dasar Harga Konstan	58,87	128,89	98,14	72,12
3. Pekerja	99,00	102,20	99,48	97,65
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	90,16	101,36	113,43	64,77

Jumlah pekerja pada kegiatan perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor pada tahun 2014 secara umum menunjukkan tren menurun meskipun pada triwulan II sempat mengalami peningkatan. Pada triwulan I penurunan jumlah pekerja adalah sekitar 1 persen, kemudian sempat meningkat pada triwulan II sebesar 2,20 persen. Selanjutnya pada triwulan III dan IV jumlah pekerja menurun kembali masing-masing sekitar 0,52 persen dan 2,35 persen.

Tabel 3.1.4 juga memperlihatkan informasi mengenai perkembangan produktivitas perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor. Fluktuasi produktivitas perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor mengikuti pola nilai penjualan, yakni produktivitas mengalami penurunan pada triwulan I, kemudian meningkat pada triwulan II sampai dengan triwulan III dan mengalami penurunan kembali pada triwulan IV.

3.1.4 Swalayan

Indeks penjualan kegiatan swalayan tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan fluktuasi yang berbeda. Perbedaan

indeks terjadi pada triwulan I dimana indeks atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan sebesar 2,78 persen sedangkan indeks atas dasar harga konstan menunjukkan penurunan sekitar 0,99 persen. Perbedaan arah pada kedua indeks tersebut mengindikasikan adanya pengaruh kenaikan harga (inflasi) pada aktivitas ini di triwulan tersebut.

Adapun indeks pembelian menunjukkan fluktuasi yang sama antara indeks atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai indeks atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa pembelian mengalami penurunan sekitar 1,35 persen pada triwulan I, kemudian mengalami peningkatan pada triwulan II, III, dan IV masing-masing sekitar 15,34 persen, 7,19 persen, dan 5,29 persen.

Tabel 3.1.4.1
Indeks Kegiatan Swalayan
Triwulanan di Indonesia, 2014

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	102,78	113,20	132,56	104,46
- Atas Dasar Harga Konstan	99,01	112,77	131,26	104,20
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	98,65	115,34	107,19	105,29
- Atas Dasar Harga Konstan	94,85	114,97	106,15	105,31
3. Pekerja	99,74	99,22	100,18	98,40
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	103,05	114,09	132,32	106,15

Jumlah pekerja pada kegiatan perdagangan swalayan pada tahun 2014 secara umum menunjukkan tren menurun meskipun pada triwulan III sempat mengalami peningkatan. Pada triwulan I dan II penurunan jumlah pekerja adalah sebesar 0,26 persen dan 0,78 persen, kemudian jumlah pekerja meningkat pada triwulan II sebesar 0,18 persen. Pada triwulan IV jumlah pekerja kembali menurun sekitar 1,60 persen.

Produktivitas perdagangan swalayan tahun 2014 menunjukan peningkatan pada setiap triwulannya. Peningkatan produktivitas terbesar terjadi pada triwulan III yakni sebesar 32,32 persen.

3.1.5 Department Store

Indeks penjualan kegiatan *department store* tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan secara umum terlihat mempunyai fluktuasi

yang sama pada setiap triwulannya. Nilai penjualan mengalami penurunan pada triwulan I, kemudian meningkat pada triwulan II dan III, selanjutnya mengalami penurunan kembali pada triwulan IV. Berdasarkan indeks penjualan atas dasar harga berlaku, peningkatan nilai penjualan tertinggi terjadi pada triwulan III dengan peningkatan sekitar 11,47 persen. Sebaliknya penurunan penjualan terendah terjadi pada triwulan IV dengan nilai penurunan sekitar 51,34 persen. Adapun indeks pembelian mengalami penurunan pada triwulan I, kemudian meningkat pada triwulan II dan mengalami penurunan kembali pada triwulan III dan IV. Peningkatan nilai pembelian pada triwulan II berdasarkan indeks atas dasar harga berlaku adalah sekitar 30,96 persen. Sedangkan penurunan nilai pembelian terendah terjadi pada triwulan IV dengan nilai penurunan sekitar 47,86 persen.

Jumlah pekerja pada kegiatan *Department Store* pada tahun 2014 mengikuti fluktuasi nilai pembelian. Pada triwulan I terlihat terjadi penurunan sebesar 2,54 persen, kemudian meningkat pada triwulan II sebesar 6,77 persen. Pada triwulan III dan IV jumlah pekerja mengalami penurunan kembali sebesar 2,24 persen dan 7,10 persen.

Tabel 3.1.4.2
Indeks Kegiatan *Department Store*
Triwulanan di Indonesia, 2014

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	88,37	103,53	111,47	48,66
- Atas Dasar Harga Konstan	88,36	103,51	108,12	42,49
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	56,42	130,96	99,70	52,14
- Atas Dasar Harga Konstan	56,41	130,90	96,58	45,78
3. Pekerja	97,46	106,77	97,76	92,90
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	90,67	96,97	114,02	52,38

Produktivitas kegiatan *Department Store* tahun 2014 secara umum menunjukkan tren yang menurun. Pada triwulan I dan II produktivitas perdagangan mengalami penurunan sebesar 9,33 persen dan 3,03 persen, kemudian mengalami peningkatan 14,02 persen di triwulan III. Selanjutnya produktivitas perdagangan kembali menurun 47,62 persen pada triwulan IV.

3.1.6 Perdagangan Eceran Lainnya

Pada kegiatan perdagangan eceran lainnya, indeks penjualan atas dasar harga berlaku dan harga konstan pada tahun 2014 menunjukkan fluktuasi yang berbeda. Perbedaan indeks terjadi pada triwulan II dan IV dimana indeks atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan sebesar 2,92 persen pada triwulan II dan sebesar 10,02 persen pada triwulan IV, sedangkan indeks atas dasar harga konstan menunjukkan penurunan sekitar 0,28 persen pada triwulan II dan 3,94 persen pada triwulan IV. Perbedaan arah pada kedua indeks nilai penjualan atas dasar harga berlaku dibandingkan dengan harga konstannya mengindikasikan adanya pengaruh kenaikan harga (inflasi) pada aktivitas ini di triwulan tersebut.

Adapun indeks pembelian menunjukkan fluktuasi yang sama antara indeks atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai indeks atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa pembelian mengalami penurunan sekitar 1,04 persen pada triwulan I, kemudian mengalami peningkatan pada triwulan II sebesar 5,35 persen, selanjutnya mengalami penurunan kembali sekitar 20,69 persen, dan kembali meningkat tajam sebesar 54,57 persen pada triwulan IV.

Jumlah pekerja pada kegiatan perdagangan eceran lainnya pada tahun 2014 mengalami penurunan pada triwulan I dan IV dan mengalami peningkatan pada triwulan II dan III. Baik penurunan jumlah pekerja pada triwulan I dan IV maupun peningkatan jumlah pekerja pada triwulan II dan III berkisar dibawah 1 persen.

Tabel 3.1.4.3
Indeks Kegiatan Perdagangan Eceran Lainnya
Triwulanan di Indonesia, 2014

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	112,58	102,92	89,41	110,02
- Atas Dasar Harga Konstan	108,80	99,72	88,37	96,06
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	98,96	105,35	79,31	154,57
- Atas Dasar Harga Konstan	97,99	104,67	78,62	135,93
3. Pekerja	99,76	100,89	100,34	99,62
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	112,85	102,02	89,11	110,44

Produktivitas kegiatan perdagangan eceran lainnya tahun 2014 secara umum menunjukan nilai yang terus meningkat pada setiap triwulannya kecuali pada triwulan III. Pada triwulan I dan II produktivitas perdagangan meningkat masing-masing sebesar 12,85 persen dan 2,02 persen. Penurunan produktivitas

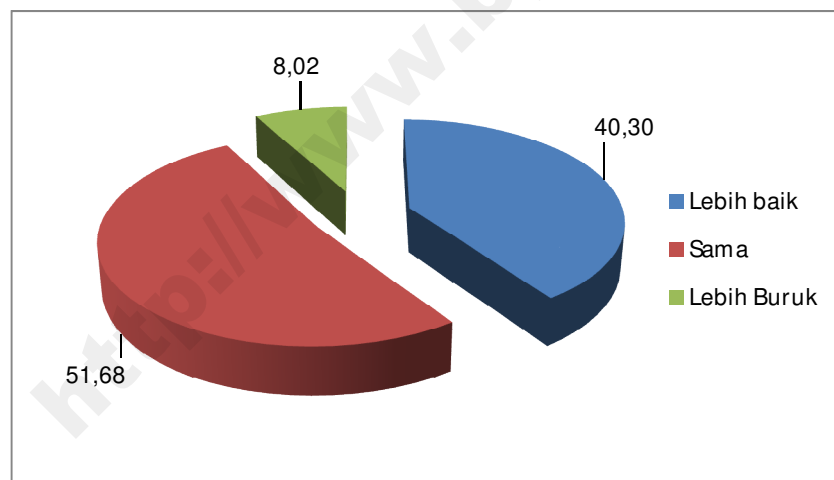
sebesar 10,89 persen terjadi pada triwulan III. Selanjutnya produktivitas kembali meningkat 10,44 persen di triwulan IV.

3.1.7 Prospek Usaha

Berdasarkan hasil survei pada triwulan terakhir pengamatan, yakni triwulan IV 2014, diperoleh informasi bahwa sebanyak 40,30 persen pelaku kegiatan usaha perdagangan merasa optimis dan berkeyakinan bahwa prospek usaha mereka pada triwulan selanjutnya akan menjadi lebih baik. Sementara sebanyak 51,68 persen responden menyatakan bahwa prospek usaha mereka pada awal tahun 2015 akan sama dan tidak mengalami perubahan. Sebagian kecil responden lainnya, yakni sebanyak 8,02 persen responden, merasa pesimis dan menyatakan bahwa prospek usaha di triwulan pertama tahun 2015 akan menjadi lebih buruk jika dibandingkan dengan keadaan pada triwulan terakhir tahun 2014.

Tingkat optimisme terhadap prospek kegiatan usaha perdagangan pada triwulan berikutnya yakni triwulan I 2015, disajikan pada Grafik 3.1.2.

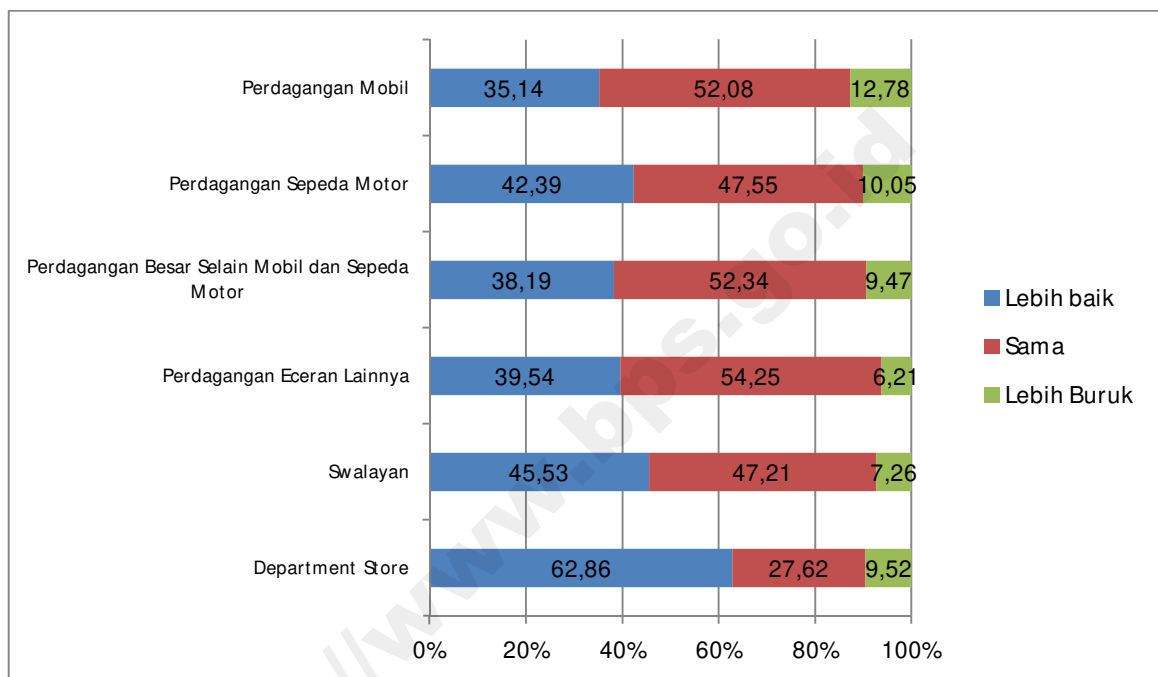
Grafik 3.1.2
Persentase Prospek Usaha Perdagangan pada Triwulan I Tahun 2014 di Indonesia



Prospek usaha perdagangan pada triwulan I tahun 2015 dilihat dari jenis kegiatan perdagangan ditunjukkan pada grafik 3.1.3. Responden pelaku kegiatan *Department Store* yang berkeyakinan bahwa prospek usaha perdagangan pada triwulan mendatang akan menjadi lebih baik adalah sebesar 62,86 persen dan merupakan persentase yang tertinggi dari seluruh jenis kegiatan usaha perdagangan. Tingkat keoptimisan tertinggi kedua terjadi pada usaha swalayan yaitu sebesar 45,53 persen disusul perdagangan sepeda motor 42,39 persen, perdagangan eceran lainnya 39,54 persen, perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor 38,19 persen, dan yang terakhir perdagangan mobil sebesar 35,14 persen.

Persentase responden tertinggi yang berkeyakinan bahwa prospek usaha perdagangan mereka pada triwulan mendatang akan sama saja dengan triwulan sebelumnya terjadi pada kegiatan perdagangan eceran lainnya sebesar 54,25 persen kemudian perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 52,34 persen disusul perdagangan mobil 52,08 persen, sepeda motor 47,55 persen, swalayan 47,21 persen dan yang terakhir *Department Store* sebesar 27,62 persen.

Grafik 3.1.3
Persentase Prospek Usaha Perdagangan pada Triwulan I 2014
Menurut Jenis Kegiatan di Indonesia



Persentase responden tertinggi yang berkeyakinan bahwa prospek usaha perdagangan mereka pada triwulan mendatang akan lebih buruk dari triwulan sebelumnya terjadi pada perdagangan mobil yaitu sebesar 12,78 persen kemudian perdagangan sepeda motor sebesar 10,05 persen, disusul *Department Store* 9,52 persen, perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor sebesar 9,47 persen, swalayan 7,26 persen dan yang terakhir perdagangan eceran lainnya sebesar 6,21 persen.

3.2 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) sektor transportasi dan pergudangan merupakan salah satu survei yang dirancang untuk memantau perkembangan perusahaan/usaha transportasi dan pergudangan setiap tiga bulan. Jenis kegiatan usaha yang disurvei pada STKU Transportasi dan Pergudangan tahun 2014 (STKU-H 2014) meliputi delapan kegiatan utama, yaitu: angkutan penumpang jalan raya, angkutan barang jalan raya, angkutan sungai, danau, dan

penyeberangan [non PT. ASDP (Persero)], pergudangan/cold storage, perparkiran, bongkar muat, ekspedisi, dan kurir.

Secara umum pendapatan delapan kegiatan usaha sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2014 menunjukkan tren yang bervariasi setiap triwulannya. Pada triwulan I kegiatan usaha angkutan penumpang jalan raya, ASDP-Non PT. ASDP (Persero), pergudangan/cold storage dan perparkiran masing-masing mengalami penurunan pendapatan sebesar 11,29 persen; 16,25 persen, 12,44 dan 2,24 persen terhadap triwulan sebelumnya.

Tabel 3.2.a
Indeks Pendapatan Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia 2014

Kegiatan Utama	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkutan Penumpang Jalan Raya	88,71	111,62	110,85	126,14
Angkutan Barang Jalan Raya	136,68	100,02	98,62	98,98
ASDP [Non PT ASDP (Persero)]	83,75	111,25	111,48	107,40
Pergudangan/ <i>Cold Storage</i>	87,56	102,70	120,87	114,58
Perparkiran	97,76	101,41	115,98	100,87
Bongkar Muat	100,33	81,94	114,29	118,58
Ekspedisi	101,68	149,78	100,40	113,53
Kurir	118,47	89,57	103,67	107,27
Transportasi dan Pergudangan	98,37	98,47	110,68	111,19

Pada Triwulan II-2014 semua kegiatan usaha sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan peningkatan pendapatan, kecuali bongkar muat dan kurir mengalami penurunan pendapatan sebesar 18,06 persen dan 10,43 persen terhadap triwulan sebelumnya. Pada Triwulan III-2014, semua kegiatan usaha mengalami peningkatan pendapatan terhadap triwulan sebelumnya kecuali pada angkutan barang jalan raya dengan penurunan sebesar 1,38 persen. Serupa dengan triwulan III pada Triwulan IV-2014 semua kegiatan usaha sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan tren yang meningkat, kecuali kegiatan usaha angkutan barang jalan raya mengalami penurunan pendapatan sebesar 1,02 persen terhadap triwulan sebelumnya.

Demikian halnya dengan produktivitas pekerja atau pendapatan per pekerja menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan angka indeks triwulan I dan II mengalami penurunan 9,68 persen dan 2,02 persen. Kemudian terjadi

peningkatan pada triwulan III dan IV masing-masing sebesar 9,03 persen dan 13,96 persen terhadap triwulan sebelumnya.

Empat dari delapan kegiatan usaha transportasi dan pergudangan (Tabel 3.2.b) yaitu kegiatan angkutan penumpang jalan raya, ASDP-Non PT. ASDP (Persero), pergudangan/cold storage dan ekspedisi menunjukkan peningkatan produktivitas pekerja setiap triwulannya kecuali pada triwulan I. Sementara kegiatan kurir menunjukkan penurunan produktivitas pada triwulan II Tahun 2014.

Pola yang berbeda ditunjukkan pada produktivitas pekerja (Tabel 3.2.b), dimana terjadi tren yang berfluktuasi pada kegiatan angkutan barang jalan raya, perparkiran, dan bongkar muat setiap triwulannya.

Tabel 3.2.b
Indeks Produktivitas Pekerja Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia 2014

Kegiatan Utama	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkutan Penumpang Jalan Raya	85,07	111,67	105,83	135,53
Angkutan Barang Jalan Raya	134,1	99,11	97,49	100,4
ASDP [Non PT ASDP (Persero)]	83,39	110,69	112,83	105,65
Pergudangan/ <i>Cold Storage</i>	84,74	101,60	118,90	113,49
Perparkiran	97,39	100,49	116,06	99,15
Bongkar Muat	67,73	79,52	115,40	119,73
Ekspedisi	93,76	153,50	106,22	109,49
Kurir	101,87	87,13	101,77	106,02
Transportasi dan Pergudangan	90,32	97,98	109,03	113,96

3.2.1 Angkutan Penumpang Jalan Raya

Berdasarkan hasil STKU-H 2014, jumlah pekerja pada angkutan penumpang jalan raya menunjukkan indeks yang berfluktuasi tiap triwulannya. Peningkatan angka indeks berantai terjadi pada triwulan I dan III masing-masing sebesar 104,29 dan 104,74. Sebaliknya penurunan jumlah pekerja terjadi pada triwulan II dan IV dengan angka indeks berantai sebesar 99,96 dan 93,08. Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan III sebesar 4,74 persen, sebaliknya pada triwulan IV terjadi penurunan tertinggi sebesar 6,92 persen.

Berbeda dengan pekerja, balas jasa pekerja kegiatan angkutan penumpang jalan raya mengalami tren yang cenderung meningkat setiap triwulannya. dengan angka indeks triwulan I, II, III dan IV sebesar 147,17 ; 105,16 ; 102,45 dan

101,01. Kenaikan balas jasa tertinggi terjadi pada triwulan I dan kenaikan terendah terjadi pada triwulan IV.

Pendapatan usaha pada kegiatan angkutan penumpang jalan raya mengalami peningkatan tiap triwulannya, kecuali pada triwulan I turun dengan angka indeks sebesar 88,71. Angka indeks berantai pada kegiatan angkutan penumpang jalan raya pada triwulan II sampai triwulan IV masing-masing sebesar 111,42 ; 110,85 ; dan 126,14.

Produktivitas pekerja merupakan perbandingan antara nilai pendapatan dengan jumlah tenaga kerja, atau besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Selama tahun 2014 produktivitas pekerja pada kegiatan angkutan penumpang jalan raya menunjukkan pola yang sama dengan pendapatan dimana terjadi penurunan angka indeks berantai pada triwulan I sebesar 14,93 diikuti peningkatan pada triwulan II, III, dan IV masing-masing sebesar 11,67 persen, 5,83 persen dan 35,53 persen.

Tabel 3.2.1
Indeks Kegiatan Angkutan Penumpang Jalan Raya Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia 2014

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	104,29	99,96	104,74	93,08
2. Balas Jasa Pekerja	147,17	105,16	102,45	101,01
3. Pendapatan	88,71	111,42	110,85	126,14
4. Produktivitas Pekerja	85,07	111,67	105,83	135,53
5. Jumlah Penumpang yang diangkut :	98,86	101,99	98,84	101,67
a. Bus	99,35	102,03	99,43	102,17
b. Mobil Penumpang Umum	100,55	101	94	100,09
6. Jumlah Order Angkutan Taksi	89,19	104,24	104,51	99,81

Jumlah penumpang yang diangkut bus dan mobil penumpang secara keseluruhan cenderung bervariasi. Peningkatan jumlah penumpang terjadi pada triwulan II dan IV masing-masing sebesar 1,99 persen dan 1,67 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebaliknya pada triwulan I dan III terjadi penurunan jumlah penumpang 1,14 persen dan 1,16 persen dari triwulan sebelumnya.

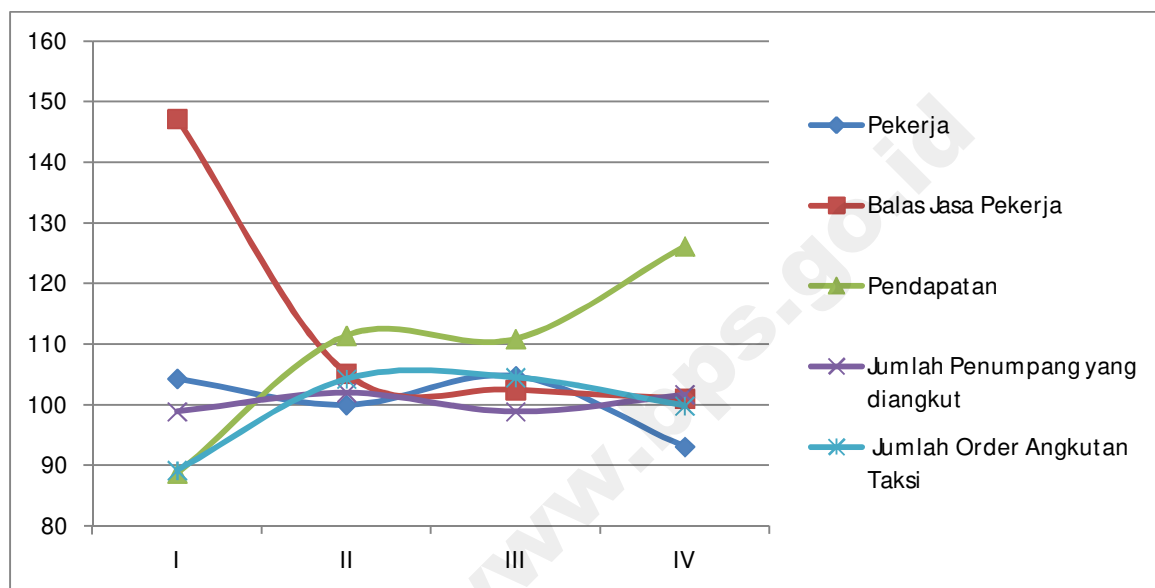
Dirinci menurut jenis moda, jumlah penumpang angkutan bus memperlihatkan tren yang berfluktuasi antar triwulannya. Hal yang berbeda ditunjukkan moda mobil penumpang umum dimana terjadi peningkatan tiap

triwulannya kecuali pada triwulan III angka indeks menunjukkan penurunan sebesar 6 persen.

Pada tabel 3.2.1 menunjukkan pertumbuhan balas jasa pekerja tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah pekerja pada setiap triwulannya. Pola yang sama terjadi pada keterkaitan antara pertumbuhan pendapatan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah penumpang.

Grafik 3.2.1

**Indeks Kegiatan Angkutan Penumpang Jalan Raya Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia 2014**



3.2.2 Angkutan Barang Jalan Raya

Pada tabel 3.2.2 menunjukkan bahwa jumlah pekerja kegiatan angkutan barang jalan raya cenderung meningkat tiap triwulannya, kecuali pada triwulan IV turun dengan angka indeks sebesar 98,59. Angka indeks berantai kegiatan angkutan barang jalan raya pada triwulan I sampai dengan triwulan III masing-masing sebesar 101,92 ; 100,92 ; dan 101,15.

Balas jasa pekerja pada kegiatan angkutan barang jalan raya memiliki pola yang berbeda dengan pekerja. Balas jasa pekerja menunjukkan tren yang berfluktuasi tiap triwulannya. Peningkatan angka indeks balas jasa terjadi pada triwulan I sebesar 112,65, kemudian terjadi penurunan pada triwulan II dan III masing-masing sebesar 93,71 dan 95,15. Akan tetapi angka indeks berantai balas jasa pekerja kembali mengalami peningkatan pada triwulan IV menjadi 100,05.

Pendapatan usaha pada kegiatan angkutan barang jalan raya mengalami peningkatan tren yang berfluktuasi setiap triwulannya. Pada triwulan I dan II angka indeks berantai mengalami peningkatan sebesar 136,68 dan 100,02. Akan

tetapi pada triwulan III dan IV terjadi penurunan angka indeks masing-masing 98,62 dan 98,98.

Produktivitas pekerja pada kegiatan angkutan barang jalan raya menunjukkan tren yang bervariasi tiap triwulannya. Pada triwulan I produktivitas mengalami kenaikan 34,1 persen. Akan tetapi pada triwulan II dan III mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,89 persen dan 2,51 persen. Pada triwulan IV produktivitas pekerja kembali mengalami peningkatan sebesar 35,53 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Indikator produksi kegiatan angkutan barang jalan raya yaitu jumlah order barang yang diangkut. Jika dilihat secara keseluruhan, order barang yang diangkut mengalami tren yang bervariasi setiap triwulannya. Pada triwulan I angka indeks mengalami penurunan 1,06 persen. Akan tetapi pada triwulan II dan III mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,1 persen dan 0,43 persen. Pada triwulan IV produktivitas pekerja kembali turun sebesar 0,9 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel 3.2.2
Indeks Kegiatan Angkutan Barang Jalan Raya Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia 2014

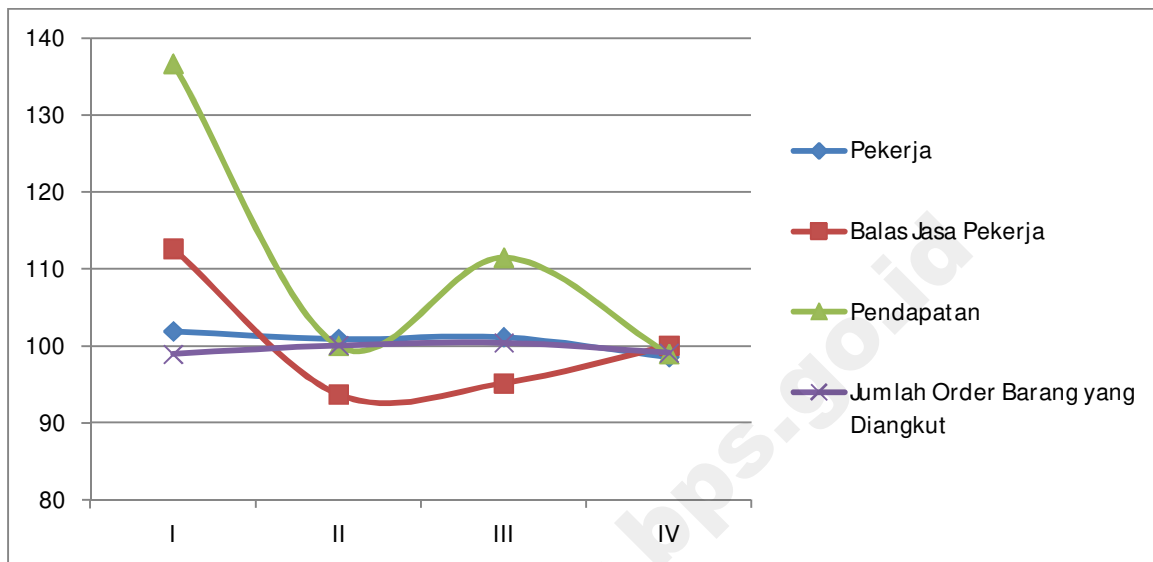
Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	101,92	100,92	101,15	98,59
2. Balas Jasa Pekerja	112,65	93,71	95,15	100,05
3. Pendapatan	136,68	100,02	98,62	98,98
4. Produktivitas Pekerja	134,10	99,11	97,49	135,53
5. Jumlah Order Barang yang Diangkut :	98,94	100,10	100,43	99,10
a. Truk	98,97	100,11	100,40	100,03
b. Pick Up	94,48	99,15	105,83	94,35

Dirinci menurut jenis moda, peningkatan jumlah order barang yang diangkut terjadi pada moda truk pada setiap triwulan kecuali triwulan I turun 1,03 persen. Peningkatan terjadi pada triwulan II, III, dan IV masing-masing 0,11 persen, 0,4 persen, dan 0,03 persen. Berbeda dengan moda truk, pada moda pick up menunjukkan pola menurun antar triwulannya kecuali pada triwulan III. Pada triwulan I dan II terjadi penurunan masing-masing sebesar 5,52 persen dan 0,85 persen. Akan tetapi pada triwulan III terjadi peningkatan sebesar 5,83 persen, kemudian angka indeks kembali turun sebesar 5,65 persen.

Pada tabel 3.2.2 dan grafik 3.2.2 diperlihatkan pertumbuhan balas jasa pekerja tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah pekerja. Hal yang sama keterkaitan antara pertumbuhan pendapatan tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah order barang yang diangkut.

Grafik 3.2.2

**Indeks Kegiatan Angkutan Barang Jalan Raya Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia 2014**



3.2.3 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan [ASDP Non PT. ASDP (Persero)]

Pada kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan non PT. ASDP (Persero), jumlah pekerja memperlihatkan tren yang meningkat pada triwulan I, II dan IV, sedangkan pada triwulan III menurun 1,19 persen. Indeks jumlah pekerja pada triwulan I sebesar 100,44, kemudian naik pada triwulan II menjadi 100,51. Pada triwulan III, indeks ini mengalami penurunan menjadi 98,81. Indeks jumlah pekerja kembali mengalami kenaikan pada triwulan IV, menjadi 101,66.

Balas jasa pekerja pada kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan non PT. ASDP (Persero) memperlihatkan pola yang berbeda dengan jumlah pekerja. Balas jasa pekerja mengalami kenaikan pada triwulan II, dengan indeks sebesar 112,31 dan 115,31, sementara itu terjadi penurunan pada triwulan III dan IV, dengan indeks sebesar 98,48 dan 93,11. Penurunan cukup besar terjadi pada triwulan IV, sebesar 6,89 persen.

Pendapatan usaha pada kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan non PT. ASDP (Persero) mengalami peningkatan setiap triwulannya, kecuali pada triwulan I. Penurunan pendapatan usaha pada triwulan I

sebesar 16,25 persen. Indeks pendapatan usaha pada triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV masing-masing sebesar 111,25; 111,48; dan 107,4.

Produktivitas pekerja pada kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan non PT. ASDP (Persero) menunjukkan pola yang sama dengan pendapatan usaha. Pada triwulan I, produktivitas pekerja turun sebesar 16,61 persen. Sementara itu, peningkatan produktivitas pekerja pada triwulan II, III, dan IV masing-masing sebesar 10,69 persen, 12,83 persen, dan 5,65 persen.

Tabel 3.2.3.
Indeks Kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
[Non PT. ASDP (Persero)] Triwulanan
di Indonesia, 2014

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	100,44	100,51	98,81	101,66
2. Balas Jasa Pekerja	112,31	115,31	98,48	93,11
3. Pendapatan	83,75	111,25	111,48	107,4
4. Produktivitas Pekerja	83,39	110,69	112,83	105,65
5. Jumlah Penumpang Diangkut	90,81	114,32	91,4	98,71
6. Jumlah Barang Diangkut	108,62	103,13	99,3	103,84
7. Jumlah Kendaraan Diangkut	75,57	107,41	134,23	76,07

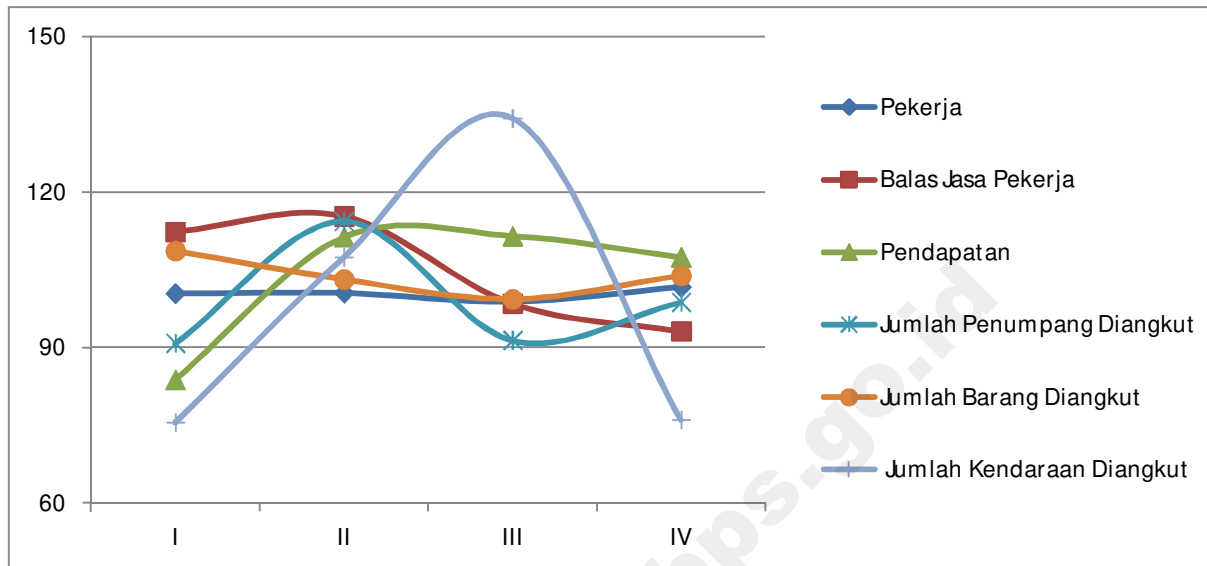
Indeks kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan non PT. ASDP (Persero) juga dirinci menurut jenis indikator produksi perusahaan/usaha yaitu banyaknya penumpang, barang, dan kendaraan diangkut. Jumlah penumpang yang diangkut selalu mengalami penurunan, kecuali triwulan II. Pada triwulan II, jumlah penumpang diangkut mengalami kenaikan dengan indeks sebesar 114,32. Sementara itu, indeks jumlah penumpang yang diangkut pada triwulan I, triwulan III, dan triwulan IV sebesar 90,81; 91,4; dan 98,71.

Berbeda dengan jumlah penumpang yang diangkut, untuk jumlah barang yang diangkut mengalami kenaikan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan IV, dengan indeks sebesar 108,62; 103,13; dan 103,84. Pada triwulan III, jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan, dengan indeks sebesar 99,3.

Untuk jumlah kendaraan yang diangkut, kenaikan terjadi pada triwulan II dan triwulan I, dengan indeks sebesar 107,41 dan 134,23. Sebaliknya, penurunan jumlah kendaraan diangkut terjadi pada triwulan I dan triwulan IV, dengan indeks sebesar 75,57 dan 76,07.

Pada grafik 3.2.3 diperlihatkan pertumbuhan balas jasa pekerja sejalan dengan pertumbuhan jumlah pekerja, kecuali pada triwulan IV.

Grafik 3.2.3
Indeks Kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
[Non PT. ASDP (Persero)] Triwulanan
di Indonesia, 2014



3.2.4 Pergudangan

Jumlah pekerja pada kegiatan pergudangan/*cold storage* selalu meningkat setiap triwulannya. Peningkatan jumlah pekerja yang terjadi pada triwulan I, II, III, dan IV masing-masing sebesar 3,33 persen, 1,08 persen, 1,65 persen, dan 0,96 persen.

Balas jasa pekerja pada kegiatan pergudangan/*cold storage* juga cenderung meningkat kecuali pada triwulan III turun dengan indeks sebesar 99,96. Peningkatan jumlah balas jasa pekerja terjadi pada triwulan I, II, dan IV dengan angka indeks masing-masing sebesar 104,62 ; 100,15 dan 100,02.

Sementara itu, pendapatan usaha pada kegiatan pergudangan/*cold storage* awalnya mengalami penurunan pada triwulan I sebesar 12,44 persen. Sebaliknya pada triwulan II, III dan IV meningkat masing-masing sebesar 2,70 persen, 20,87 persen, dan 14,58 persen dari triwulan sebelumnya.

Produktivitas pekerja pada kegiatan pergudangan/*cold storage* juga memiliki pola yang sama dengan pendapatan usaha. Angka indeks produktivitas tertinggi terjadi pada triwulan III sebesar 118,90 dan terendah terjadi pada triwulan I sebesar 84,74.

Peningkatan volume gudang tertutup/*cold storage* yang disewakan terjadi pada triwulan I, II, dan III sebesar 2,37 persen, 1,96 persen, dan 5,66 persen.

Sedangkan pada triwulan IV turun 1,38 persen dari triwulan sebelumnya. Luas gudang terbuka yang disewakan mengalami peningkatan pada triwulan I, II dan IV masing-masing naik sebesar 24,6 persen, 5,85 persen, dan 4,40 persen dari triwulan sebelumnya.

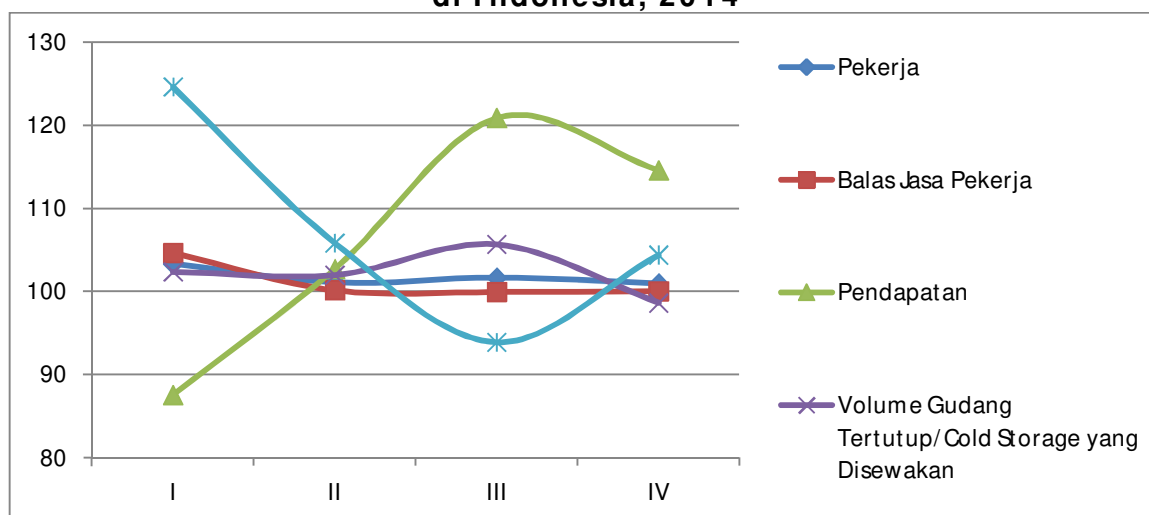
Tabel 3.2.4.
Indeks Kegiatan Pergudangan/ *Cold Storage* Triwulanan
di Indonesia, 2014

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	103,33	101,08	101,65	100,96
2. Balas Jasa Pekerja	104,62	100,15	99,96	100,02
3. Pendapatan	87,56	102,7	120,87	114,58
4. Produktivitas Pekerja	84,74	101,6	118,9	113,49
5. Volume Gudang Tertutup/ <i>Cold Storage</i> yang Disewakan	102,37	101,96	105,66	98,62
6. Luas Gudang Terbuka yang Disewakan	124,6	105,85	93,9	104,4

Dari tabel 3.2.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan balas jasa pekerja sejalan dengan pertumbuhan jumlah pekerja pada triwulan I, II, dan IV, akan tetapi pada triwulan III tidak sejalan. Jumlah pekerja pada triwulan III naik 1,65 persen namun balas jasa pekerja turun 0,04 persen.

Bila dilihat dari keterkaitan antara pertumbuhan pendapatan dengan pertumbuhan volume/luas gudang disewakan, secara umum pertumbuhannya tidak sejalan.

Grafik 3.2.4
Indeks Kegiatan Pergudangan/ *Cold Storage* Triwulanan
di Indonesia, 2014



3.2.5. Perparkiran

Jumlah pekerja kegiatan usaha perparkiran dari hasil STKU-H tahun 2014 mengalami tren yang cenderung meningkat kecuali pada triwulan III turun sebesar 0,07 persen dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan I, II, dan IV jumlah pekerja kegiatan perparkiran naik masing-masing sebesar 0,39 persen, 0,91 persen, dan 0,74 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan jumlah pekerja kegiatan perparkiran, balas jasa pekerja pada kegiatan perparkiran cenderung meningkat antar triwulannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya angka indeks pada triwulan I sampai dengan triwulan IV masing-masing sebesar 100,66; 100,10; 100,92; dan 100,60.

Berbeda dengan balas jasa pekerja, pendapatan usaha pada kegiatan perparkiran pada triwulan I mengalami penurunan sebesar 2,24 persen dibanding triwulan sebelumnya. Akan tetapi pada triwulan berikutnya, yaitu triwulan II, III, dan IV pendapatan usaha mengalami kenaikan masing-masing 1,41 persen, 15,98 persen, dan 0,87 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Produktivitas pekerja memiliki pola yang sama dengan pendapatan pekerja. Pada triwulan I produktivitas pekerja turun sebesar 2,61 persen dari triwulan sebelumnya. Kemudian pada triwulan II, III dan IV naik masing-masing sebesar 0,49 persen dan 16,06 persen dan 0,13 persen.

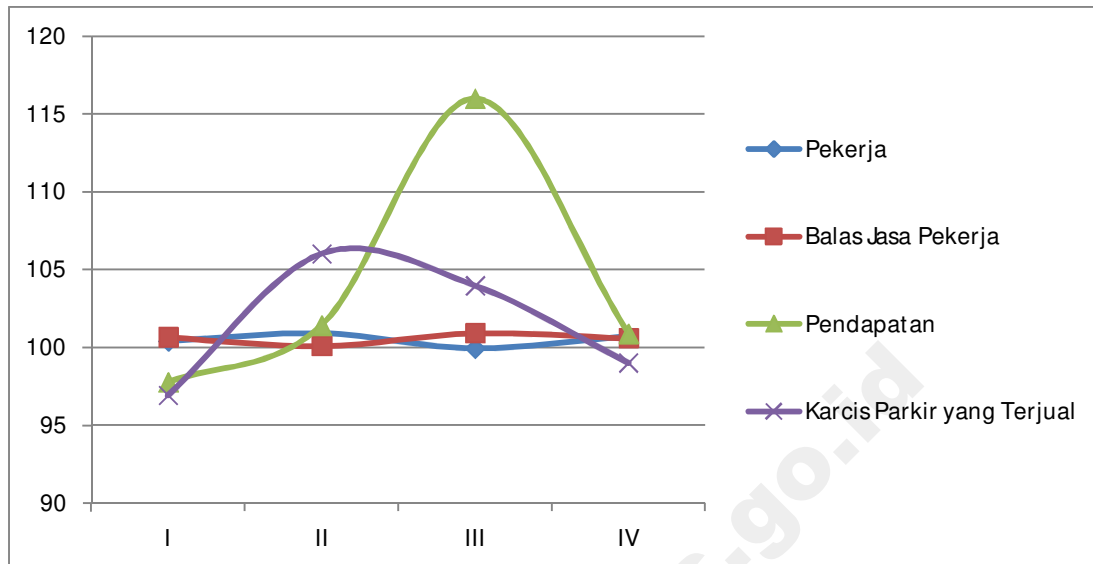
Tabel 3.2.5.
Indeks Kegiatan Perparkiran Triwulanan di Indonesia, 2014

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	100,39	100,91	99,93	100,74
2. Balas Jasa Pekerja	100,66	100,10	100,92	100,60
3. Pendapatan	97,76	101,41	115,98	100,87
4. Produktivitas Pekerja	97,39	100,49	116,06	100,13
5. Karcis Parkir yang Terjual	96,93	106,01	103,97	99,00

Indikator produksi perusahaan pada kegiatan perparkiran yaitu jumlah karcis parkir yang terjual memiliki tren yang berfluktuasi. Jumlah karcis terjual pada triwulan I mengalami penurunan sebesar 3,07 persen kemudian meningkat pada triwulan II dan III masing-masing sebesar 6,01 persen dan 3,97 persen. Akan tetapi pada triwulan IV kembali turun 1,00 persen dibanding triwulan

sebelumnya. Penurunan yang cukup besar ini salah satunya disebabkan karena adanya pengalihan ke model karcis langganan.

Grafik 3.2.5
Indeks Kegiatan Perparkiran Triwulanan di Indonesia, 2014



Pada tabel 3.2.5 dan grafik 3.2.5 menunjukkan secara umum pertumbuhan pendapatan selalu sejalan dengan produktivitas pekerja. Sebaliknya, keterkaitan antara balas jasa pekerja secara umum tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan karcis parkir yang terjual.

3.2.6 Bongkar Muat

Secara keseluruhan jumlah pekerja kegiatan bongkar muat cenderung berfluktuasi setiap triwulannya, pada triwulan I dan II mengalami peningkatan sebesar 0,75 persen dan 1,58 persen dari triwulan sebelumnya. Penurunan terjadi pada triwulan III dan IV masing-masing sebesar 0,97 persen dan 0,96 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Berbeda dengan jumlah pekerja, balas jasa pekerja pada kegiatan bongkar muat mengalami tren yang cenderung meningkat pada tiap triwulannya, kecuali pada triwulan II yang mengalami penurunan sebesar 2,54 persen dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan balas jasa pekerja ditunjukkan dengan angka indeks pada triwulan I, III, dan IV masing masing sebesar 106,50; 120,0; dan 113,81.

Selama tahun 2014, pendapatan usaha pada kegiatan bongkar muat mengalami tren yang cenderung meningkat setiap triwulannya, kecuali pada triwulan II mengalami penurunan sebesar 18,06 persen dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan pendapatan usaha terjadi pada triwulan I, III, dan IV

sebesar 7,13 persen; 14,29 persen; dan 18,58 persen dibanding triwulan sebelumnya.

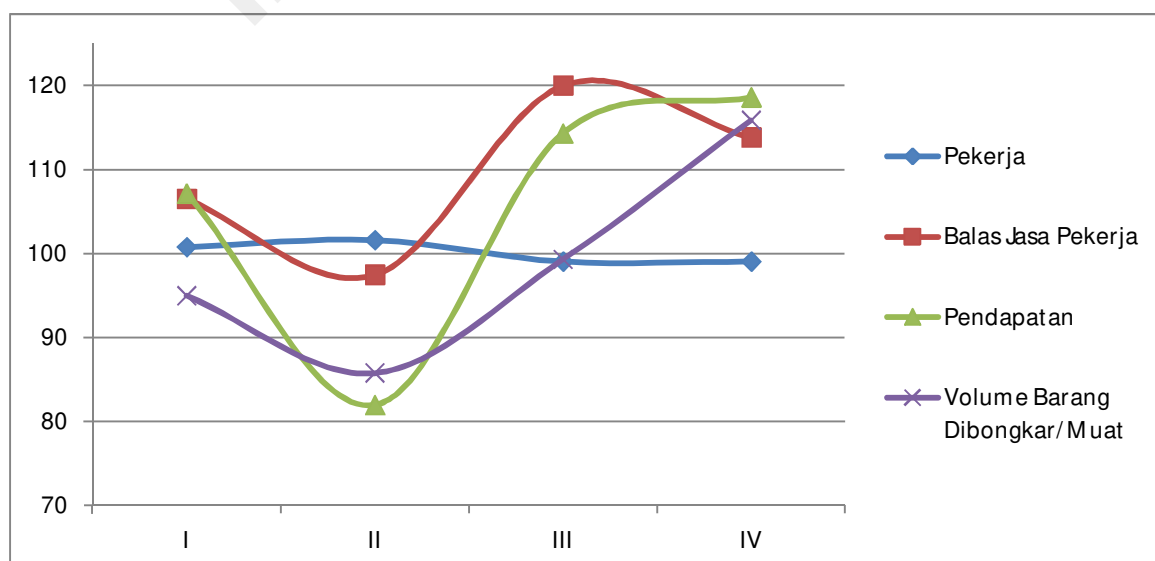
Sejalan dengan pendapatan usaha, produktivitas pekerja pada kegiatan bongkar muat juga meningkat setiap triwulannya kecuali pada triwulan II. Indeks produktivitas pekerja pada triwulan I sampai triwulan IV masing-masing sebesar 106,33; 80,66; 115,40; dan 119,73.

Tabel 3.2.6.
Indeks Kegiatan Bongkar Muat Triwulanan di Indonesia, 2014

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	100,75	101,58	99,03	99,04
2. Balas Jasa Pekerja	106,50	97,46	120,00	113,81
3. Pendapatan	107,13	81,94	114,29	118,58
4. Produktivitas Pekerja	106,33	80,66	115,40	119,73
5. Volume Barang Dibongkar/ Muat	94,98	85,77	99,30	115,87

Indikator produksi perusahaan pada kegiatan bongkar muat yaitu jumlah barang yang dibongkar maupun dimuat. Pada triwulan I, II, III barang yang dibongkar maupun dimuat turun masing-masing sebesar 5,02 persen, 14,23 persen, dan 0,70 persen. Akan tetapi pada triwulan IV barang yang dibongkar maupun dimuat mengalami peningkatan sebesar 15,87 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 3.2.6
Indeks Kegiatan Bongkar Muat Triwulanan
di Indonesia, 2014



Pada grafik 3.2.6 menunjukkan pertumbuhan balas jasa pekerja sejalan dengan produktivitas pekerja. Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan volume barang yang dibongkar muat.

3.2.7 Ekspedisi

Jumlah pekerja pada kegiatan ekspedisi cenderung berfluktuasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka indeks pada triwulan I sampai triwulan IV masing masing sebesar 108,45; 97,57; 94,52; dan 103,69.

Berbeda dengan pekerja, balas jasa pekerja pada kegiatan ekspedisi mengalami peningkatan pada tiap triwulannya, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada triwulan II dengan angka indeks sebesar 143,01. Sedangkan angka indeks pada triwulan I, II, dan IV masing masing sebesar 100,79; 105,90; dan 101,79.

Sejalan dengan balas jasa pekerja, pendapatan usaha pada kegiatan ekspedisi mengalami peningkatan pada tiap triwulannya. Dibanding triwulan sebelumnya, peningkatan pendapatan tertinggi terjadi pada triwulan II sebesar 49,78 persen diikuti triwulan IV sebesar 13,53 persen, triwulan I sebesar 1,68 persen, dan triwulan III sebesar 0,40 persen.

Sama seperti pendapatan usaha, produktivitas pekerja pada kegiatan ekspedisi memiliki indeks yang meningkat pada tiap triwulannya kecuali pada triwulan I mengalami penurunan sebesar 6,24 persen dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada triwulan II sebesar 53,50 persen, peningkatan terendah terjadi pada triwulan III sebesar 6,22 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel 3.2.7.
Indeks Kegiatan Ekspedisi Triwulanan
di Indonesia, 2014

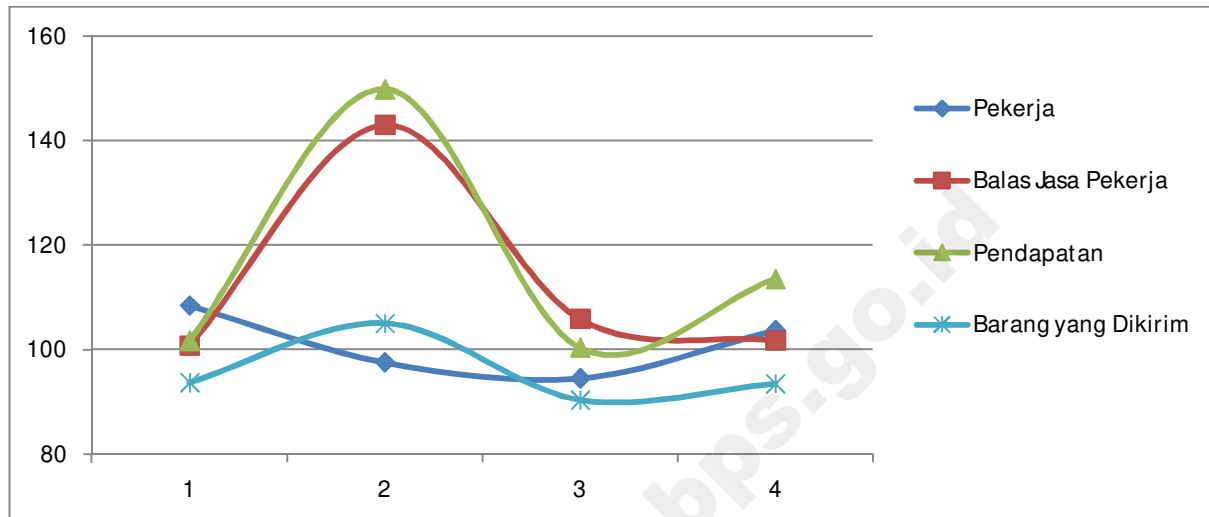
Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	108,45	97,57	94,52	103,69
2. Balas Jasa Pekerja	100,79	143,01	105,90	101,79
3. Pendapatan	101,68	149,78	100,40	113,53
4. Produktivitas Pekerja	93,76	153,50	106,22	109,49
5. Jumlah Barang yang Dikirim	93,68	105,01	90,36	93,44

Jumlah barang yang dikirim selama tahun 2014 jumlahnya cenderung mengalami penurunan, kecuali pada triwulan II terjadi peningkatan sebesar 5,01 persen dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan I, III, dan IV mengalami

penurunan dibanding triwulan sebelumnya, dengan angka indeks masing masing sebesar 93,68; 90,36; dan 93,44.

Dari grafik 3.2.7 menunjukkan pertumbuhan produktivitas pekerja tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah barang yang dikirim, hanya sejalan pada triwulan II.

Grafik 3.2.7
Indeks Kegiatan Ekspedisi Triwulanan di Indonesia, 2014



3.2.8. Kurir

Jumlah pekerja perusahaan kurir selalu meningkat pada tiap triwulan, ditunjukkan dengan angka indeks berantai pada triwulan I sampai triwulan IV, masing-masing 116,29 ; 102,8 ; 101,86 dan 101,18. Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan I dan kenaikan terendah pada triwulan IV.

Sedikit berbeda dengan jumlah pekerja, balas jasa pekerja pada kegiatan kurir pada triwulan I mengalami penurunan sebesar 2,69 persen dibanding triwulan sebelumnya. Akan tetapi pada triwulan berikutnya, yaitu triwulan II, III, dan IV balas jasa pekerja mengalami kenaikan masing-masing 0,09 persen, 4,26 persen, dan 0,28 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pendapatan pekerja pada kegiatan kurir menunjukkan tren yang meningkat antar triwulannya kecuali pada triwulan II. Pada triwulan I pendapatan pada kegiatan kurir meningkat dengan angka indeks sebesar 118,47. Sebaliknya, pada triwulan II angka indeks mengalami penurunan sebesar 89,57. Pada triwulan III dan IV angka indeks pendapatan kembali meningkat masing-masing sebesar 103,67 dan 107,27.

Hal yang sama dengan pendapatan pekerja, selama tahun 2014 produktivitas pekerja pada kegiatan kurir cenderung meningkat kecuali untuk triwulan II.

Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan IV dengan angka indeks 106,02, sedangkan penurunan produktivitas terjadi pada triwulan II dengan angka indeks 87,13.

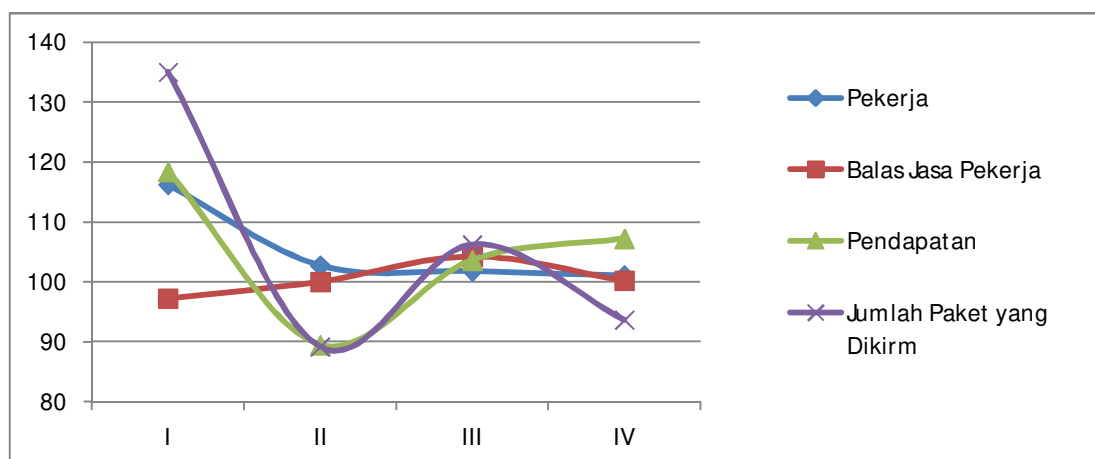
Jumlah paket yang dikirim oleh perusahaan kurir mengalami tren yang berfluktuasi antar triwulannya. Pada triwulan I angka indeks jumlah paket yang dikirim sebesar 135,07, kemudian diiringi dengan penurunan pada triwulan II dengan indeks sebesar 89,22. Selanjutnya pada triwulan III angka indeks kembali meningkat menjadi 106,27. Akan tetapi pada triwulan IV terjadi penurunan angka indeks menjadi 93,71.

Tabel 3.2.8.
Indeks Kegiatan Kurir Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia 2014

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	116,29	102,8	101,86	101,18
2. Balas Jasa Pekerja	97,31	100,09	104,26	100,28
3. Pendapatan	118,47	89,57	103,67	107,27
4. Produktivitas Pekerja	101,87	87,13	101,77	106,02
5. Jumlah Paket yang Dikirim	135,07	89,22	106,27	93,71

Pada tabel 3.2.8 menunjukkan pertumbuhan balas jasa pekerja sejalan dengan pertumbuhan jumlah pekerja pada setiap triwulannya kecuali pada triwulan I. Demikian pula keterkaitan antara pertumbuhan pendapatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah paket yang dikirim.

Grafik 2.2.8
Indeks Triwulanan Kegiatan Kurir Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku di
Indonesia 2014



3.3 INFORMASI

3.3.1 Pekerja

Pekerja yang dimaksud dalam STKU kategori J (Informasi) ini adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha meliputi total pekerja laki-laki dan perempuan, baik pekerja dibayar, pekerja tidak dibayar, pekerja tetap, pekerja tidak tetap, maupun pekerja kontrak pada tahun 2014 di perusahaan penerbitan surat kabar dan penyiaran radio oleh swasta.

Berdasarkan hasil STKU-J Tahun 2014, jumlah pekerja perusahaan/usaha penerbitan surat kabar cenderung konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada setiap triwulan. Pada triwulan I dan triwulan II jumlah pekerja perusahaan/usaha penerbitan surat kabar mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan jumlah pekerja pada triwulan sebelumnya, masing-masing dengan angka indeks 99,62 dan 99,10. Sebaliknya, pada triwulan III dan triwulan IV jumlah pekerja perusahaan/usaha penerbitan surat kabar mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan jumlah pekerja pada triwulan sebelumnya, masing-masing dengan angka indeks 100,78 dan 100,07.

Berdasarkan fenomena di atas, angka indeks pekerja per triwulan mengindikasikan peningkatan jumlah pekerja pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar yang cenderung positif khususnya pada triwulan III dan triwulan IV, masing-masing meningkat 0,78 persen dan 0,07 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 3.3.1
Indeks Pekerja Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014

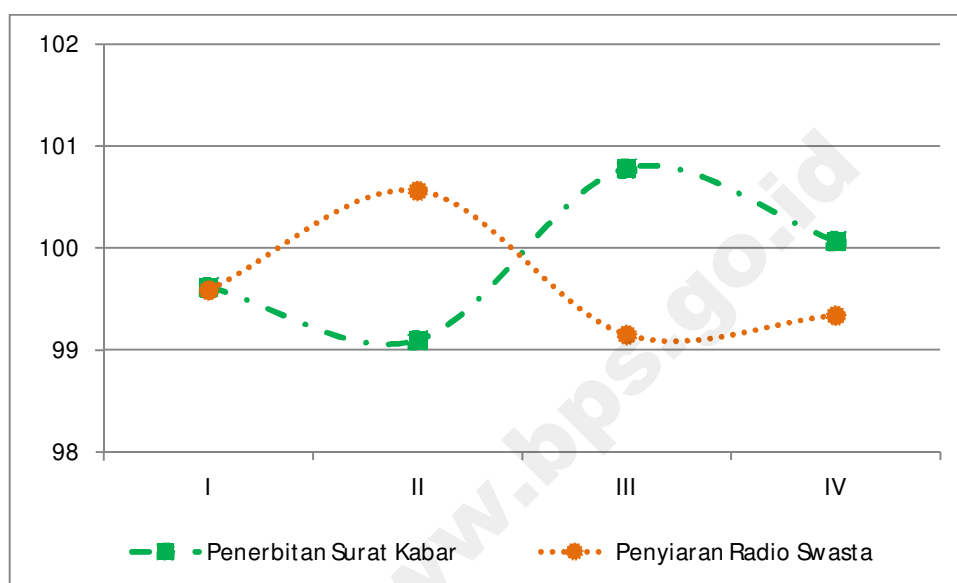
Jenis Kegiatan	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penerbitan Surat Kabar	99,62	99,10	100,78	100,07
2. Penyiaran Radio Swasta	99,59	100,56	99,15	99,34

Tidak berbeda dengan perusahaan/usaha penerbitan surat kabar, jumlah pekerja perusahaan/usaha penyiaran radio swasta juga tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada setiap triwulan. Adapun untuk perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, jumlah pekerja pada triwulan II mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan angka indeks 100,56. Sebaliknya, pada triwulan I, triwulan III, dan triwulan IV

jumlah pekerja perusahaan/usaha penyiaran radio swasta mengalami sedikit penurunan, masing-masing dengan angka indeks 99,59, 99,15, dan 99,34.

Angka indeks pekerja per triwulan pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta mengindikasikan peningkatan jumlah pekerja yang cenderung positif hanya pada triwulan II, yaitu meningkat 0,56 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik 3.3.1
Indeks Pekerja Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014



Jika diilustrasikan dengan grafik, perkembangan indeks pekerja baik pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar perusahaan/usaha penyiaran radio swasta menunjukkan tren yang fluktuatif selama 2014.

3.3.2 Balas Jasa Pekerja

Yang dimaksud balas jasa pekerja di sini adalah seluruh pengeluaran yang diberikan kepada pekerja/karyawan yang dibayar baik untuk pekerja tetap, tidak tetap, maupun kontrak seperti: upah/gaji, upah lembur, tunjangan, bonus dan sejenisnya, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain baik dalam bentuk uang maupun barang. Dengan mengetahui nilai balas jasa pekerja, diharapkan akan didapatkan gambaran tentang perkembangan tingkat kesejahteraan pekerja.

Balas jasa yang diterima oleh pekerja perusahaan penerbitan surat kabar cenderung konstan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan IV, masing-masing dengan angka indeks 101,95 pada triwulan I, 101,52 pada triwulan II, dan 99,82 pada triwulan IV. Adapun pada triwulan III, balas jasa yang diterima oleh pekerja

perusahaan penerbitan surat kabar cenderung meningkat cukup signifikan dengan angka indeks 105,77.

Tabel 3.3.2
Indeks Balas Jasa Pekerja Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014

Jenis Kegiatan	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerbitan Surat Kabar	101,95	101,52	105,77	99,82
2. Penyiaran Radio Swasta	100,44	108,09	104,07	100,45

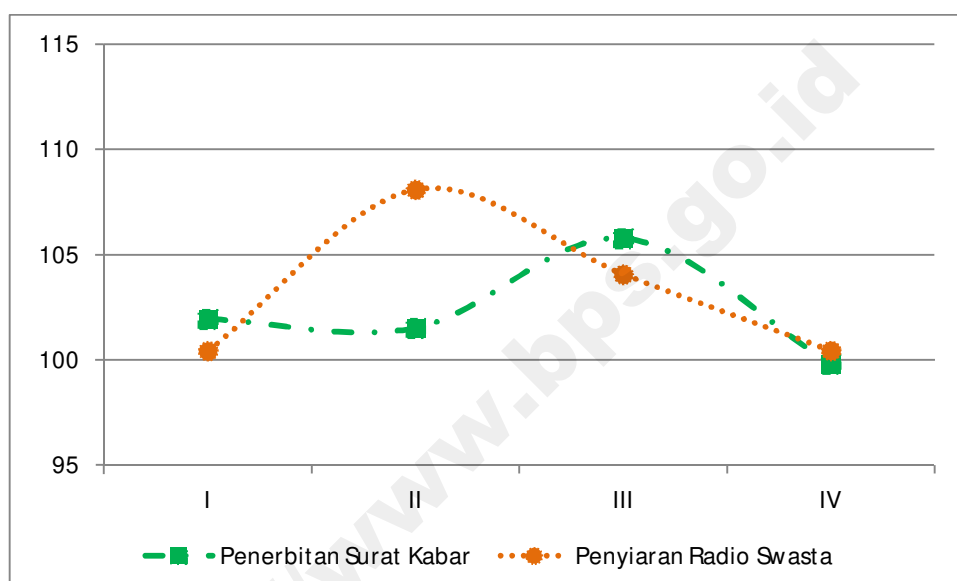
Indeks balas jasa perusahaan penerbitan surat kabar mengindikasikan adanya kecenderungan sedikit kenaikan balas jasa yang diterima oleh pekerja pada triwulan I dan triwulan II, masing-masing meningkat 1,95 persen pada triwulan I dan 1,52 persen pada triwulan II dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan indeks tenaga kerja maka perubahan pada balas jasa yang diterima pekerja relatif tidak terdapat fenomena yang berarti pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan IV. Hal ini dikarenakan angka indeks yang cenderung konstan, baik indeks balas jasa maupun indeks tenaga kerja, sehingga kenaikan/penurunan yang terjadi relatif tidak signifikan. Namun fenomena yang berbeda terjadi pada triwulan III, yaitu kenaikan balas jasa yang diterima pekerja relatif meningkat cukup signifikan sebesar 5,77 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sedangkan jumlah pekerja relatif konstan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kenaikan jumlah balas jasa yang diterima oleh setiap pekerja pada triwulan III.

Pada perusahaan penyiaran radio swasta, balas jasa yang diterima pekerja relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang berarti pada triwulan I dan triwulan IV, masing-masing dengan angka indeks 100,44 pada triwulan I dan 100,45 pada triwulan IV. Sementara itu, pada triwulan II dan triwulan III balas jasa yang diterima oleh pekerja perusahaan penyiaran radio swasta relatif meningkat cukup signifikan dengan angka indeks 108,09 pada triwulan II dan 104,07 pada triwulan III.

Indeks balas jasa perusahaan penyiaran radio swasta mengindikasikan adanya sedikit kenaikan balas jasa yang diterima oleh pekerja, dengan kenaikan 0,44 persen pada triwulan I dan 0,45 persen pada triwulan IV dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan indeks tenaga kerja maka perubahan pada balas jasa yang diterima pekerja relatif tidak terdapat fenomena yang berarti pada triwulan I dan triwulan IV karena angka indeks yang cenderung konstan, baik indeks balas jasa maupun indeks tenaga kerja, sehingga

kenaikan/penurunan yang terjadi relatif tidak signifikan. Fenomena yang berbeda terjadi pada triwulan II dan triwulan III, yaitu kenaikan balas jasa yang diterima pekerja relatif meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II dan III, balas jasa yang diperoleh pekerja meningkat 8,09 persen pada triwulan II dan 4,07 persen pada triwulan III sedangkan jumlah pekerja pada triwulan II dan III relatif konstan. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan jumlah balas jasa yang diterima oleh setiap pekerja pada triwulan II dan III.

Grafik 3.3.2
Indeks Balas Jasa Pekerja Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014



Jika diilustrasikan dengan grafik, perkembangan indeks balas jasa pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar cenderung fluktuatif sedangkan perkembangan indeks balas jasa pada perusahaan penyiaran radio swasta menunjukkan tren yang naik pada triwulan II dan menurun sampai triwulan IV.

3.3.3 Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha yang dimaksud disini adalah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha baik itu sebagai pendapatan utama maupun pendapatan lainnya. Dengan menghitung nilai indeks pendapatan usaha, diharapkan akan memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil STKU-J Tahun 2014, pendapatan perusahaan/usaha penerbitan surat kabar relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada setiap triwulan kecuali triwulan II. Pada triwulan I dan triwulan III terjadi sedikit kenaikan pada perolehan pendapatan perusahaan/usaha penerbitan surat kabar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pada triwulan

sebelumnya, masing-masing dengan angka indeks 100,27 dan 100,70. Sebaliknya, pada triwulan IV perolehan pendapatan perusahaan/usaha penerbitan surat kabar mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan perolehan pendapatan pada triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 98,77. Sementara itu, pada triwulan II pendapatan perusahaan/usaha penerbitan surat kabar cenderung meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan angka indeks 103,87.

Tabel 3.3.3
Indeks Pendapatan Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014

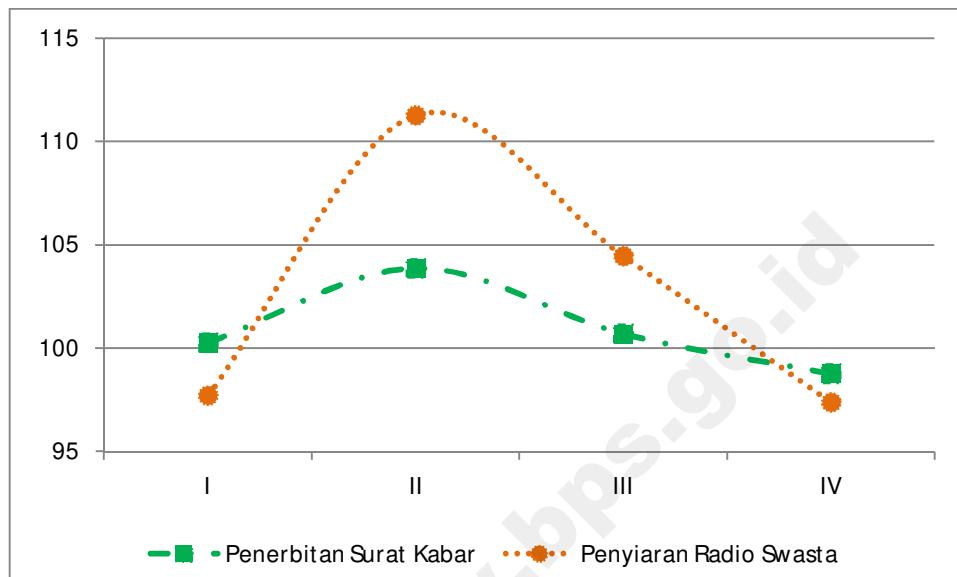
Jenis Kegiatan	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerbitan Surat Kabar	100,27	103,87	100,70	98,77
2. Penyiaran Radio Swasta	97,71	111,26	104,45	97,38

Berbeda dengan pendapatan perusahaan/usaha penerbitan surat kabar yang relatif konstan hampir pada setiap triwulan, pendapatan perusahaan/usaha penyiaran radio swasta menunjukkan kecenderungan perubahan yang cukup berarti pada setiap triwulannya. Pendapatan perusahaan/usaha penyiaran radio swasta menunjukkan kecenderungan yang meningkat cukup tinggi pada triwulan II dan triwulan III, yaitu dengan angka indeks 111,26 dan 104,45. Sebaliknya, pendapatan perusahaan/usaha penyiaran radio swasta relatif menunjukkan kecenderungan menurun dengan cukup signifikan pada triwulan I dan triwulan IV, yaitu dengan angka indeks 97,71 dan 97,38.

Indeks pendapatan perusahaan/usaha mengindikasikan tingkat kinerja perusahaan. Indeks pendapatan per triwulan pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar mengindikasikan adanya peningkatan kinerja khususnya pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III, masing-masing meningkat 0,27 persen, 3,87 persen, dan 0,70 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, indeks pendapatan per triwulan yang mengindikasikan peningkatan kinerja perusahaan terjadi pada triwulan II dan triwulan III, yaitu meningkat 11,26 persen dan 4,45 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kinerja yang relatif signifikan pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar, khususnya pada triwulan II. Sementara itu, pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta terjadi peningkatan kinerja yang relatif signifikan pada triwulan II dan triwulan III.

Jika diilustrasikan dengan grafik, perkembangan indeks pendapatan, baik pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar maupun pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, menunjukkan tren yang meningkat pada triwulan II dan menurun sampai dengan triwulan IV.

Grafik 3.3.3
Indeks Pendapatan Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014



3.3.4 Output

Output adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan. *Output* bisa terdiri dari pendapatan, penjualan, dan lain-lain. Untuk perusahaan penerbitan surat kabar *output*-nya adalah barang yang dihasilkan dari proses produksi yaitu tiras surat kabar (dalam satuan oplah), sedangkan untuk penyiaran radio oleh swasta *output*-nya adalah durasi iklan yang disiarkan dalam satuan spot iklan. *Output* ini menggambarkan indikator produksi perusahaan.

Berdasarkan hasil STKU-J Tahun 2014, produksi perusahaan/usaha penerbitan surat kabar relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada triwulan II dan triwulan III, masing-masing dengan angka indeks 100,12 dan 100,58. Pada triwulan I, produksi perusahaan/usaha penerbitan surat kabar relatif meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan angka indeks 102,33. Sebaliknya, pada triwulan IV produksi perusahaan/usaha penerbitan surat kabar relatif menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dengan angka indeks 97,51.

Indeks output perusahaan penerbitan surat kabar mengindikasikan adanya kecenderungan sedikit kenaikan produksi perusahaan pada triwulan II dan triwulan III, masing-masing meningkat 0,12 persen pada triwulan II dan 0,58

persen pada triwulan III dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I produksi perusahaan cenderung meningkat cukup signifikan dengan kenaikan sebesar 2,33 persen, sedangkan pada triwulan IV cenderung menurun cukup signifikan sebesar 2,49 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 3.3.4
Indeks *Output* Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014

Jenis Kegiatan	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerbitan Surat Kabar (Oplah)	102,33	100,12	100,58	97,51
2. Penyiaran Radio Swasta (Spot)	98,15	105,00	101,68	94,52

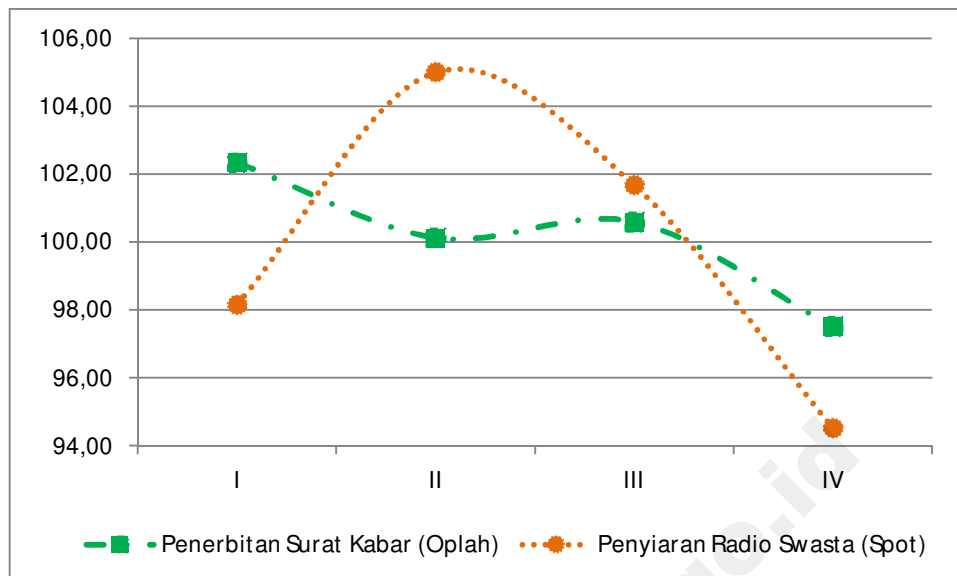
Pada perusahaan penyiaran radio swasta, produksi perusahaan tidak mengalami perubahan yang berarti pada triwulan I dan triwulan III, masing-masing dengan angka indeks 98,15 pada triwulan I dan 101,68 pada triwulan III. Sementara itu, produksi perusahaan penerbitan surat kabar pada triwulan II cenderung meningkat cukup signifikan dengan angka indeks 105,00 dan menurun cukup signifikan pada triwulan IV dengan angka indeks 94,52.

Indeks output perusahaan penyiaran radio swasta pada triwulan III mengindikasikan adanya sedikit kenaikan produksi perusahaan sebesar 1,68 persen sedangkan pada triwulan I mengindikasikan adanya sedikit penurunan sebesar 1,85 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara pada triwulan II, produksi perusahaan cenderung meningkat cukup signifikan dengan kenaikan sebesar 5,00 persen sedangkan pada triwulan IV cenderung menurun cukup signifikan sebesar 5,48 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kecenderungan naik dan turunnya produksi perusahaan, baik pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar maupun perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, sejalan dengan kecenderungan naik dan turunnya pendapatan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi output yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh perusahaan, dan sebaliknya.

Jika diilustrasikan dengan grafik, produksi pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar menunjukkan tren kenaikan pada triwulan II dan menurun sampai dengan triwulan IV. Adapun produksi perusahaan/usaha penyiaran radio swasta menunjukkan tren yang berfluktuatif pada setiap triwulannya.

Grafik 3.3.4
Indeks *Output* Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014



3.3.5 Produktivitas

Pengertian produktivitas dikemukakan dengan menunjukkan rasio *output* dan *input*. Variabel input antara lain biaya produksi dan tenaga kerja. Dengan kata lain produktivitas dapat didefinisikan sebagai rasio efektivitas pencapaian tujuan pada tingkat kualitas tertentu (*output*) dan efisiensi penggunaan sumber daya (*input*). Dengan mengetahui indeks produktivitas, diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya.

Pada ulasan ini pengukuran produktivitas hanya memperhitungkan satu sumber daya sebagai variabel *input* yaitu tenaga kerja, sehingga produktivitas disini merupakan perbandingan antara jumlah *output* dengan pekerja. Hal ini menunjukkan jumlah *output* yang dihasilkan oleh setiap pekerja.

Produktivitas perusahaan/usaha penerbitan surat kabar tidak mengalami perubahan yang berarti pada triwulan II dan triwulan III, dengan angka indeks 98,17 dan 99,80. Sementara itu, pada triwulan I produktivitas perusahaan penyiaran radio swasta relatif mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan angka indeks 102,72, dan pada triwulan IV relatif mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan angka indeks 97,44 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, produktivitas perusahaan relatif konstan pada triwulan I dengan angka indeks 98,56. Kecenderungan kenaikan produktivitas perusahaan yang relatif tinggi terjadi pada triwulan II dan III, masing-masing ditunjukkan dengan angka indeks 104,41 pada triwulan II dan

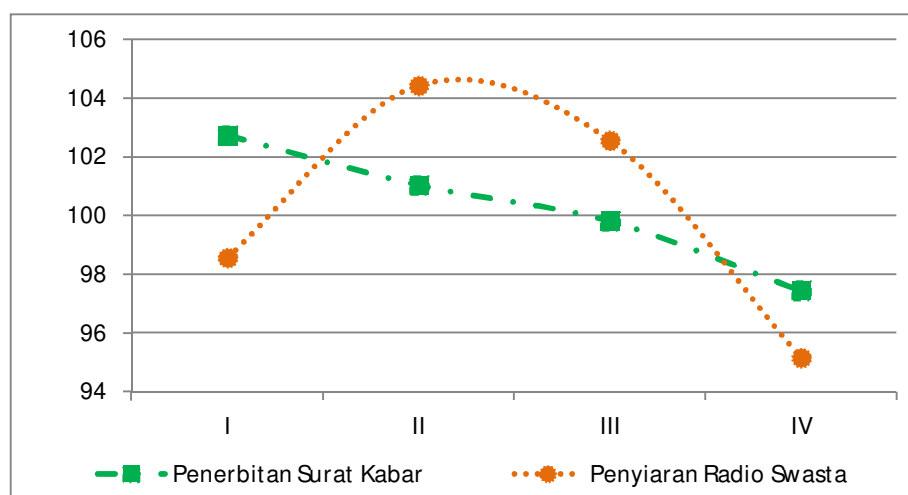
103,01 pada triwulan III. Sebaliknya, pada triwulan IV produktivitas perusahaan/usaha penyiaran radio swasta cenderung mengalami penurunan yang relatif signifikan, ditunjukkan dengan angka indeks 95,15.

Tabel 3.3.5
Indeks Produktivitas Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014

Jenis Kegiatan	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerbitan Surat Kabar	102,72	98,17	99,80	97,44
2. Penyiaran Radio Swasta	98,56	104,41	103,01	95,15

Indeks produktivitas memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. Tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar tampak mengalami penurunan pada tiap triwulan kecuali triwulan I. Pada triwulan I, tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja menunjukkan kecenderungan yang meningkat sebesar 2,72 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sedangkan pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, fenomena positif untuk kenaikan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja tampak terjadi pada triwulan II dan III, masing-masing meningkat sebesar 4,41 persen pada triwulan II dan 3,01 persen pada triwulan III.

Grafik 3.3.5
Indeks Produktivitas Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014



3.4 LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Kegiatan STKU-K pada tahun 2014 mencakup tujuh jenis lembaga keuangan bukan bank di seluruh provinsi di Indonesia dengan target sampel sebanyak 427 usaha/perusahaan per triwulan. Alokasi sampel terbanyak adalah usaha koperasi simpan pinjam (27 persen), diikuti dengan pegadaian (21 persen), asuransi, dana pensiun dan pedagang valuta asing (13 persen), pembiayaan dan modal ventura (11 persen), serta asuransi & penunjang asuransi (2 persen). Sementara itu, rata-rata tingkat respon STKU-K 2014 (78,69 persen) menurun dari tahun 2013 (83,59 persen).

3.4.1. Asuransi

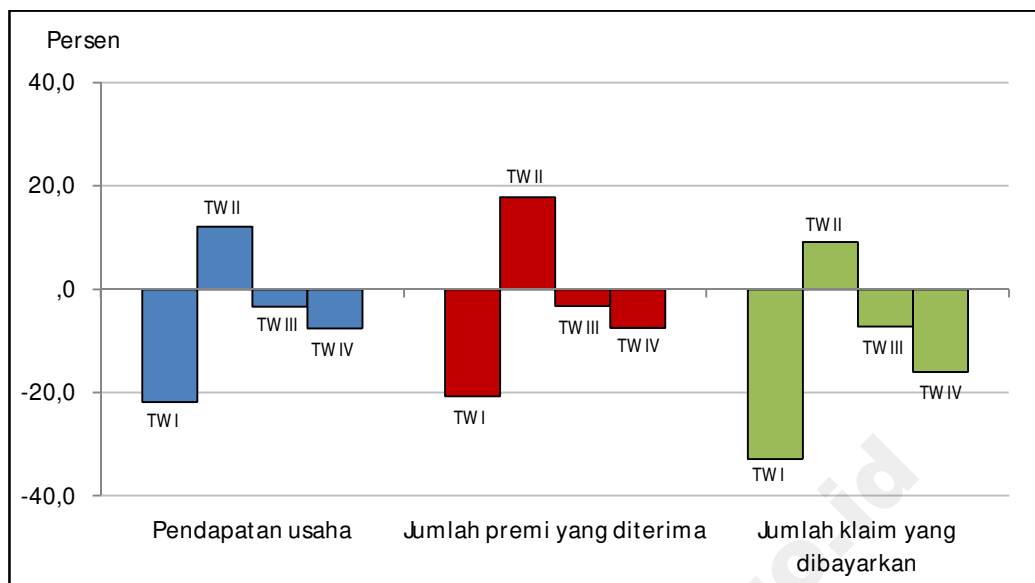
Jumlah pekerja perusahaan asuransi pada tahun 2014 mengalami peningkatan setiap triwulannya. Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan I, yang naik sebesar 9,85 persen dibanding triwulan IV tahun 2013. Demikian juga balas jasa pekerja mengalami peningkatan setiap triwulannya, dimana pada triwulan II mengalami peningkatan tertinggi sebesar 21,53 persen, diikuti triwulan III sebesar 16,23 persen.

Tabel 3.4.1.
Indeks Indikator Usaha Perusahaan Asuransi di Indonesia, 2014

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja	109,85	103,06	101,56	106,62
2.	Balas jasa pekerja	100,70	121,53	116,23	102,10
3.	Pendapatan usaha	78,14	112,10	96,64	92,43
4.	Jumlah peserta asuransi	92,92	108,80	100,40	108,80
5.	Jumlah premi yang diterima	79,29	117,80	96,77	92,52
6.	Jumlah klaim yang dibayarkan	67,05	109,15	92,81	83,99

Dari sisi pendapatan usaha, terlihat bahwa kinerja perusahaan asuransi pada 2014 cukup berfluktuasi, dimana pada triwulan II mengalami peningkatan sebesar 12,10 persen, sedangkan triwulan lainnya mengalami penurunan pendapatan usaha. Namun demikian jumlah peserta asuransi mengalami kenaikan di semua triwulan, kecuali di triwulan I yang turun sebesar 7,08 persen (Tabel 3.4.1). Sementara itu kenaikan jumlah premi yang diterima hanya terjadi pada triwulan II, yaitu sebesar 17,80 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Demikian pula pada jumlah klaim yang dibayarkan, kenaikan hanya terjadi hanya pada triwulan II, yaitu 9,15 persen.

Grafik 3.4.1.
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Perusahaan Asuransi
di Indonesia, 2014



3.4.2. Dana Pensiun

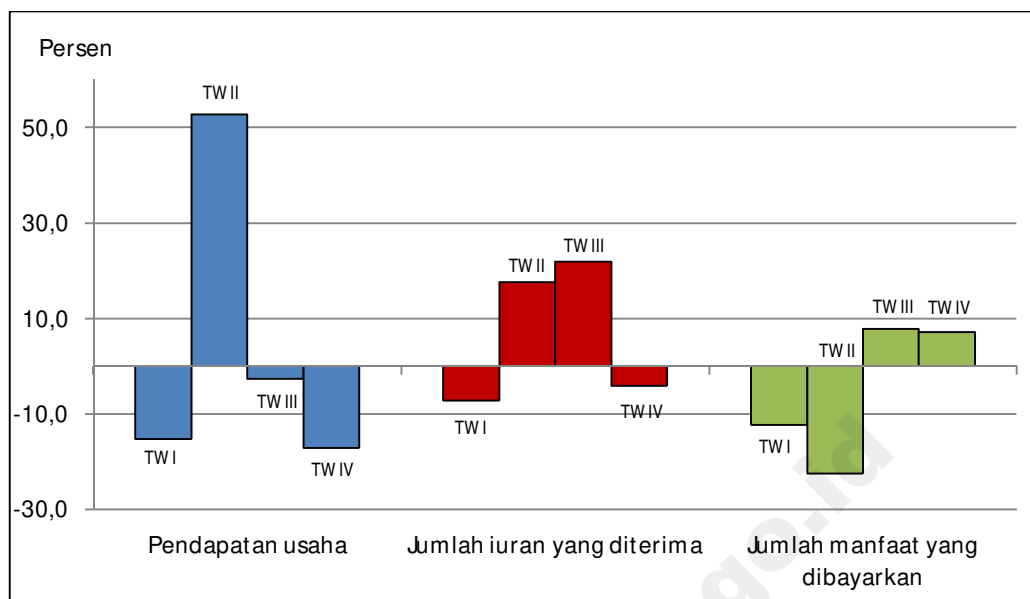
Kinerja perusahaan dana pensiun pada tahun 2014 fluktuatif setiap triwulannya. Hal ini terlihat dari pendapatan usaha yang hanya mengalami peningkatan pada triwulan II sebesar 52,77 persen. Sementara itu jumlah peserta dan jumlah iuran yang diterima dana pensiun di setiap triwulannya meningkat secara moderat sampai dengan triwulan III akan tetapi menurun pada triwulan IV. Sementara itu jumlah manfaat yang dibayarkan mengalami penurunan pada dua triwulan awal dan naik pada triwulan III sebesar 7,80 persen.

Tabel 3.4.2
Indeks Indikator Usaha Perusahaan Dana Pensiun, 2014

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja	101,08	102,16	101,07	99,76
2.	Balas jasa pekerja	73,32	137,69	115,01	119,97
3.	Pendapatan usaha	84,77	152,77	97,40	82,90
4.	Jumlah peserta dana pensiun	94,17	98,47	101,90	82,43
5.	Jumlah iuran yang diterima	92,80	117,63	121,88	95,89
6.	Jumlah manfaat yang dibayarkan	87,66	77,59	107,80	107,17

Jumlah pekerja perusahaan dana pensiun juga meningkat setiap triwulan, kecuali pada triwulan IV yang turun tipis 0,24 persen dari triwulan III. Sementara dari sisi balas jasa pekerja, upah yang dibayarkan ke pegawai juga meningkat dengan peningkatan tertinggi pada triwulan II, yakni sebesar 37,69 persen.

Grafik 3.4.2
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Perusahaan Dana Pensiun
di Indonesia, 2014



3.4.3. Koperasi Simpan Pinjam

Jumlah pekerja koperasi simpan pinjam selama 2014 cenderung sama setiap triwulannya, meskipun mengalami penurunan tipis yang berkisar antara 0,14 persen sampai 1,27 persen. Namun, balas jasa pekerjaannya mengalami kenaikan pada triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV, kecuali triwulan I yang mengalami penurunan sebesar 17,84 persen.

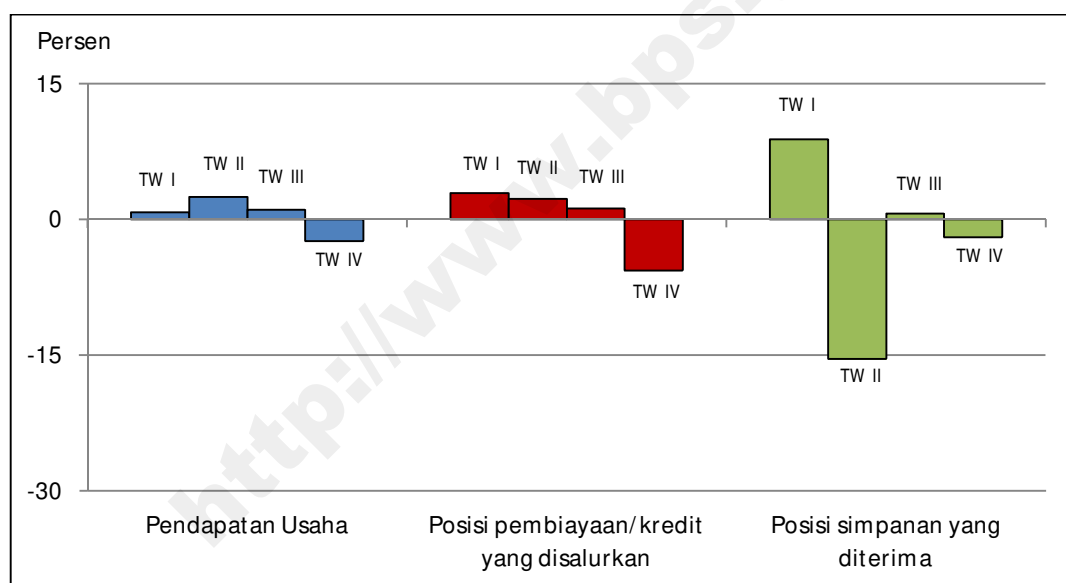
Jumlah anggota koperasi simpan pinjam selama 2014 cenderung mengalami kenaikan, kecuali pada triwulan III yang mengalami penurunan sebesar 6,87 persen. Sementara itu posisi simpanan yang diterima koperasi simpan pinjam pada tahun 2014 cenderung fluktuatif. Pada triwulan I dan triwulan III simpanan yang diterima menunjukkan terjadinya kenaikan masing-masing sebesar 8,83 persen dan 0,66 persen. Sedangkan pada triwulan II dan triwulan IV simpanan yang diterima mengalami penurunan.

Kinerja koperasi simpan pinjam 2014 yang ditunjukkan oleh indikator pendapatan usaha cenderung memperlihatkan tren yang sejalan dengan posisi pembiayaan/kredit yang disalurkan, yaitu naik di tiga triwulan awal dan turun pada triwulan IV. Pada triwulan I sampai triwulan III, pendapatan usaha naik masing-masing sebesar 0,78 persen, 2,50 persen, dan 1,07 persen, sedangkan pada triwulan IV turun sebesar 2,36 persen. Sementara itu posisi pembiayaan/kredit yang disalurkan pada triwulan I sampai triwulan III naik masing-masing sebesar 2,89 persen, 2,28 persen, dan 1,20 persen, sedangkan pada triwulan IV turun sebesar 5,66 persen.

Tabel 3.4.3.
Indeks Indikator Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, 2014

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja (orang)	99.70	98.73	99.69	99.86
2.	Balas jasa pekerja	82.16	108.49	104.95	113.79
3.	Pendapatan usaha	100.78	102.50	101.07	97.64
4.	Jumlah anggota (orang)	104.52	105.57	93.13	104.42
5.	Posisi pembiayaan/kredit yang disalurkan	102.89	102.28	101.20	94.34
6.	Posisi simpanan yang diterima	108.83	84.60	100.66	98.05

Grafik 3.4.3.
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, 2014



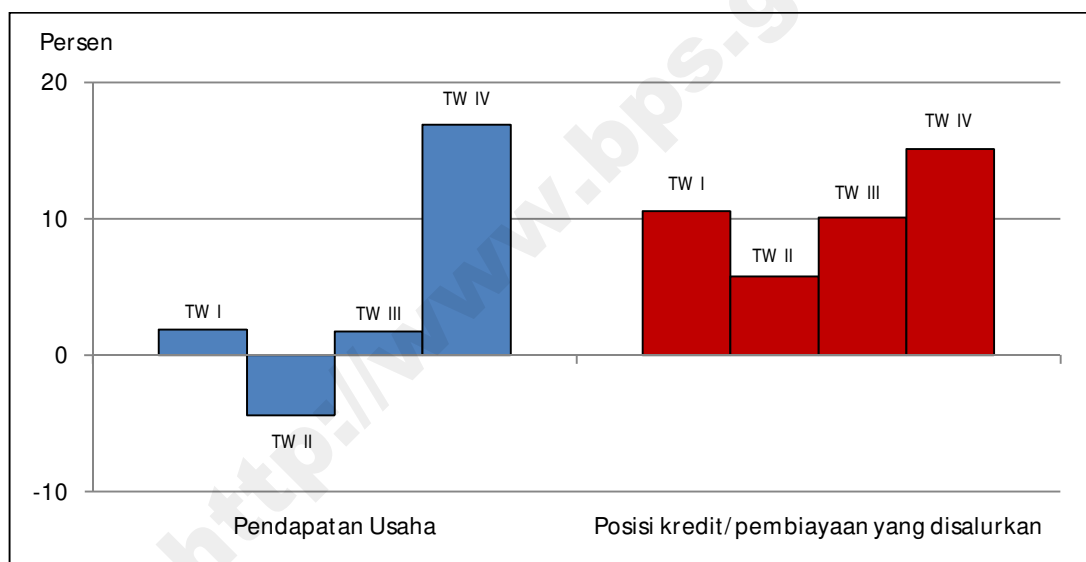
3.4.4. Pegadaian

Kinerja perusahaan pegadaian, dilihat dari pendapatan usaha, selama 2014 terlihat mengikuti pola tertentu, dimana pada triwulan I mengalami kenaikan tipis sebesar 1,90 persen, kemudian turun sebesar 4,36 persen pada triwulan II. Selanjutnya, pada triwulan III pendapatan pegadaian kembali mencatatkan kenaikan tipis sebesar 1,73 persen dan mencapai posisi tertinggi pada triwulan IV dengan kenaikan sebesar 16,89 persen (Tabel 3.4.4).

Tabel 3.4.4.
Indeks Indikator Usaha Perusahaan Pegadaian di Indonesia, 2014

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja (orang)	100.66	100.17	98.70	103.34
2.	Balas jasa pekerja	97.38	115.58	111.78	91.01
3.	Pendapatan usaha	101.90	95.64	101.73	116.89
4.	Jumlah nasabah pegadaian (orang)	105.51	103.35	105.54	103.74
5.	Posisi kredit/pembiayaan yang disalurkan	110.56	105.80	110.08	115.13

Grafik 3.4.4.
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Perusahaan Pegadaian di Indonesia, 2014



Indikator jumlah nasabah dan posisi kredit yang disalurkan selama 2014 cenderung mengalami kenaikan di tiap triwulannya. Kenaikan tertinggi pada indikator jumlah nasabah terjadi pada triwulan III, yaitu naik sebesar 5,54 persen. Sementara itu, kenaikan tertinggi pada indikator posisi kredit yang disalurkan terjadi pada triwulan IV, yakni naik sebesar 15,13 persen.

3.4.5. Pedagang Valuta Asing

Pada tabel 3.4.5 terlihat bahwa jumlah pekerja pedagang valuta asing pada tahun 2014 berfluktuasi namun tidak begitu signifikan. Pada triwulan I dan III jumlah pekerja mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,10 persen dan 2,64 persen. Sedangkan pada triwulan II dan triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen dan 1,27 persen. Sama halnya dengan jumlah pekerja, balas

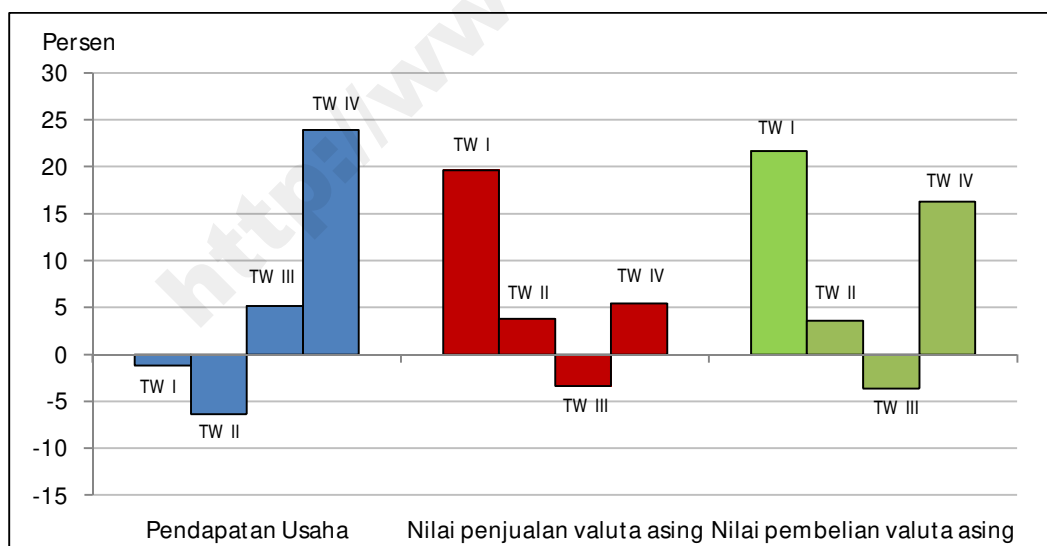
jasa pekerja juga menunjukkan fluktuasi. Pada triwulan I dan triwulan IV balas jasa pekerja mengalami penurunan tipis, masing-masing sebesar 0,09 persen dan 0,01 persen. Sementara itu, pada triwulan II dan III mengalami kenaikan.

Kinerja perusahaan pedagang valuta asing dilihat dari sisi pendapatan usaha menunjukkan terjadinya penurunan pada dua triwulan awal, kemudian naik di dua triwulan akhir. Penurunan terbesar terjadi pada II sebesar 6,38 persen. Sementara itu, kenaikan terbesar terjadi pada triwulan IV sebesar 23,91 persen.

Tabel 3.4.5
Indeks Indikator Usaha Pedagang Valuta Asing di Indonesia 2014

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja (orang)	98.90	100.76	97.36	101.27
2.	Balas jasa pekerja	99.91	111.15	103.50	99.99
3.	Pendapatan usaha	98.82	93.62	105.18	123.91
4.	Nilai penjualan valuta asing	119.61	103.81	96.64	105.42
5.	Nilai pembelian valuta asing	121.69	103.58	96.32	116.24

Grafik 3.4.5
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Pedagang Valuta Asing di Indonesia, 2014



Nilai penjualan dan pembelian valuta asing pada tahun 2014 menunjukkan pola yang sama, yakni mengalami kenaikan pada triwulan I dan II, kemudian turun di triwulan III, dan kembali mengalami kenaikan di triwulan IV. Puncak kenaikan nilai penjualan dan pembelian valuta asing terjadi pada triwulan I, masing-masing sebesar 19,61 persen dan 21,69 persen. Sedangkan penurunan nilai penjualan dan pembelian valuta asing pada triwulan III masing-masing sebesar 3,36 persen dan 3,68 persen.

3.4.6. Pembiayaan dan Modal Ventura

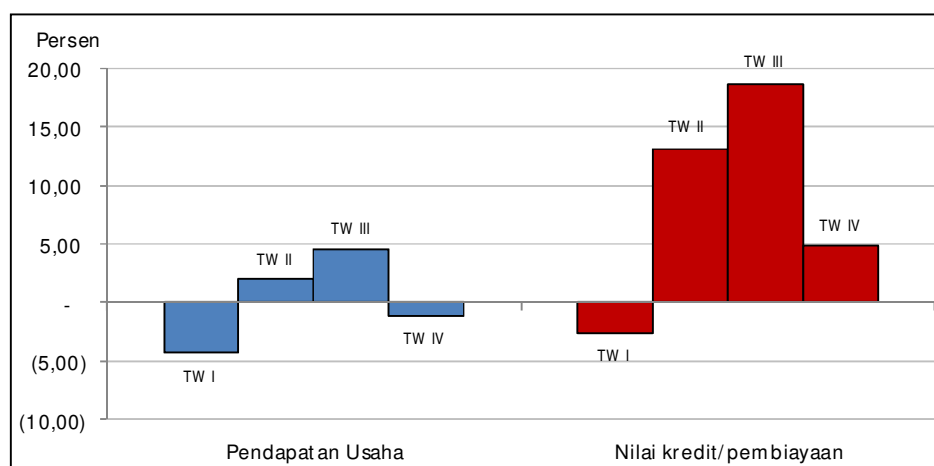
Indeks indikator usaha perusahaan pembiayaan dan modal ventura ditunjukkan tabel 3.4.6. Jenis usaha ini memang mengalami perkembangan yang cukup baik. Dari sisi jumlah pekerja, perusahaan pembiayaan dan modal ventura menunjukkan kestabilan, hanya saja pada triwulan IV mengalami penurunan tipis sebesar 1,38 persen. Berbeda dengan jumlah pekerja, balas jasa pekerja menunjukkan adanya penurunan pada triwulan I dan II, namun pada triwulan III dan IV menunjukkan terjadinya kenaikan.

Pendapatan usaha perusahaan pembiayaan dan modal ventura mengalami fluktuasi yang tidak begitu signifikan dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan. Pada triwulan I dan IV pendapatan usaha perusahaan pembiayaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,35 persen dan 1,12 persen. Untuk triwulan II dan III terjadi kenaikan masing-masing sebesar 2,02 persen dan 4,63 persen.

Tabel 3.4.6
Indeks Indikator Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura di Indonesia, 2014

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja (orang)	101,94	102,49	101,76	98,62
2.	Balas jasa pekerja	92,90	95,64	117,09	110,98
3.	Pendapatan usaha	95,65	102,02	104,63	98,88
4.	Nilai kredit/pembiayaan	97,31	113,18	118,62	104,84

Grafik 3.4.6
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura di Indonesia, 2014



Nilai kredit/pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan dan modal ventura pada tahun 2014 menunjukkan tren kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan III sebesar 18,62 persen. Sedangkan pada triwulan I nilai kredit yang disalurkan mengalami penurunan sebesar 2,69 persen.

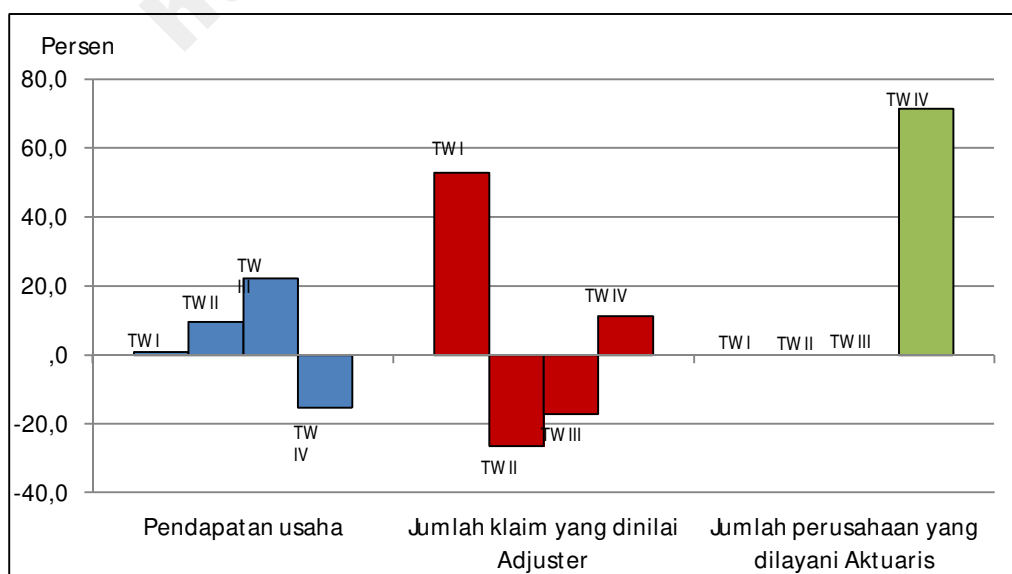
3.4.7. Jasa Penunjang Asuransi (Aktuaris dan *Adjuster*)

Dilihat dari jumlah klaim yang dinilai, kinerja perusahaan adjuster dan aktuaris berfluktuasi di setiap triwulan, dimana pada triwulan I dan IV meningkat sebesar 52,79 persen dan 11,32 persen, sedangkan pada triwulan II dan III menurun. Sementara itu, pada perusahaan aktuaris, kinerja perusahaan relatif stagnan, kecuali pada triwulan IV mengalami peningkatan yang relatif tinggi sebesar 71,43 persen.

Tabel 3.4.7.
Indeks Indikator Usaha Jasa Penunjang Asuransi di Indonesia, 2014

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja	100,00	100,00	100,00	92,31
2.	Balas jasa pekerja	99,35	100,26	100,00	110,57
3.	Pendapatan usaha	100,77	109,60	122,22	84,62
4.	Jumlah klaim yang dinilai <i>Adjuster</i>	152,79	73,56	82,81	111,32
5.	Jumlah perusahaan yang dilayani Aktuaris	100,00	100,00	100,00	171,43

Grafik 3.4.7.
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Jasa Penunjang Asuransi di Indonesia, 2014



Kedua perusahaan penunjang asuransi tersebut memulai tahun 2014 dengan meningkatnya jumlah pendapatan secara moderat dengan peningkatan tertinggi pada triwulan III sebesar 22,22 persen dan hanya pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 15,38 persen. Sementara itu dari sisi jumlah pekerja relatif tetap di setiap triwulannya. Demikian pula dengan balas jasa pekerja yang mengalami kenaikan sepanjang tahun 2014 kecuali pada triwulan I yang turun tipis sebesar 0,65 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2013.

3.5 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha untuk Kategori O (STKU-O), merupakan survei yang dilakukan untuk mencatat kinerja keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Responden pada survei ini mencakup 194 kantor pemerintahan yang terdiri dari 33 pemerintah provinsi dan 161 pemerintah kabupaten/kota. Survei ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah dari sisi pendapatan dan belanjanya.

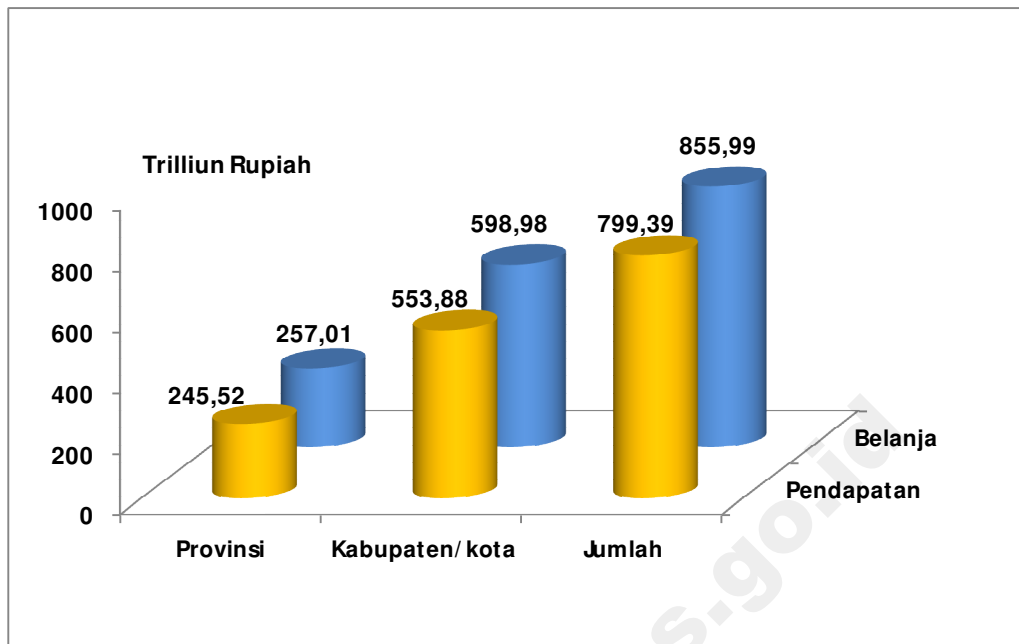
Tingkat respon STKU-O secara tahunan tercatat cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat respon survei setiap triwulanan dimana masing-masing sebesar 93,81 persen pada triwulan I; 92,78 persen pada triwulan II; 87,63 persen pada triwulan III dan sebesar 62,88 persen pada triwulan IV.

3.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD secara baku terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sehingga struktur APBD pada laporan dikelompokkan dalam rincian-rincian tersebut, dengan alasan kebutuhan terhadap analisis datanya.

Grafik 3.5.1 menunjukkan besaran APBD provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2014 dalam trilliun rupiah. Besaran APBD kabupaten/kota masih mendominasi dalam anggaran daerah secara nasional yaitu sebesar 553,88 triliun rupiah atau 69,29 persen dalam sisi pendapatan daerah, sedangkan dalam sisi belanja daerah, APBD kabupaten/kota mempunyai nilai sebesar 598,98 triliun rupiah atau 69,98 persen dari total anggaran. Namun bila dibandingkan dengan jumlah pemerintahannya dimana provinsi terdiri dari 33 pemerintahan dan kabupaten/kota terdiri dari 491 pemerintahan, kontribusi anggaran provinsi mempunyai nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar 245,52 triliun rupiah atau 30,71 persen dalam sisi pendapatan dan sebesar 257,01 triliun rupiah atau 30,02 persen dalam sisi belanja daerah terhadap total anggaran daerah secara nasional.

Grafik 3.5.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota di Indonesia, 2014



Pada tahun 2014, anggaran pendapatan pemerintahan provinsi mencapai 245,52 triliun rupiah dengan anggaran belanja sebesar 257,01 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi defisit anggaran dalam periode tahun 2014. Hal yang sama juga terjadi pada pemerintah kabupaten/kota, yang mempunyai anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan daerahnya. Kondisi defisit anggaran pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota tidak berarti seluruh provinsi dan kabupaten/kota merencanakan defisit pada anggarannya, karena pada umumnya pemerintah daerah merencanakan anggaran yang berimbang bahkan anggaran surplus.

Pada pemerintah provinsi, pendapatan asli daerah memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan anggaran pendapatan daerah yaitu sebesar 120,38 triliun rupiah atau sebesar 49,03 persen terhadap total anggaran pendapatan provinsi. Sedangkan pada pemerintahan kabupaten/kota pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan dengan kontribusi sebesar 72,93 persen terhadap total anggaran pendapatan kabupaten/kota.

Tabel 3.5.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota di Indonesia (triliun rupiah), 2014

Uraian	Anggaran		
	Provinsi	Kab/ Kota	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Daerah	245,52	553,88	799,40
a. Pendapatan Asli Daerah	120,38	62,56	182,94
1) Pajak Daerah	103,49	31,66	135,15
2) Retribusi Daerah	2,72	10,63	13,35
3) BUMD	3,12	3,25	6,37
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	11,05	17,02	28,07
b. Dana Perimbangan	77,47	403,94	481,41
c. Lain-lain pendapatan	47,67	87,38	135,05
2. Belanja Daerah	257,01	598,98	855,99
a. Belanja Pegawai	42,60	283,87	326,47
b. Belanja Barang Jasa	58,97	124,03	183,00
c. Belanja Modal	60,92	153,06	213,98
d. Belanja Bantuan Sosial	2,62	4,95	7,57
e. Belanja lainnya	91,90	33,07	124,97

Dilihat dari anggaran belanja daerah, pengeluaran pemerintah provinsi didominasi oleh belanja lainnya yaitu sebesar 91,90 triliun rupiah atau sebesar 35,76 persen dari total anggaran. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota, belanja pegawai mempunyai kontribusi yang terbesar yaitu sebesar 283,87 triliun rupiah atau sebesar 47,39 persen. Belanja bantuan sosial adalah belanja yang memiliki kontribusi paling kecil dalam tahun anggaran 2014, baik untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

3.5.2 Pendapatan Triwulanan Daerah

Realisasi tingkat penyerapan menunjukkan nilai yang berhasil diserap oleh pemerintah daerah dari anggaran tahun berjalan. Pada tahun 2014, secara umum pemerintah kabupaten/kota memiliki tingkat penyerapan pendapatan kumulatif yang lebih tinggi daripada pemerintah provinsi. Pada triwulan IV, pemerintah provinsi menyerap sebesar 112,70 persen dan pemerintah Kabupaten/Kota mampu mencapai 105,46 persen.

Pendapatan asli daerah adalah jenis pendapatan yang mempunyai kontribusi besar dalam tingkat penyerapan pendapatan pemerintah provinsi, yaitu sebesar 20,56 persen di triwulan I; 45,89 persen pada triwulan II; 82,50 persen di triwulan III dan 128,40 persen di triwulan IV. Seperti halnya dengan pemerintah provinsi, tingkat penyerapan pendapatan pemerintah kabupaten/kota juga masih didominasi dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan pada setiap triwulannya.

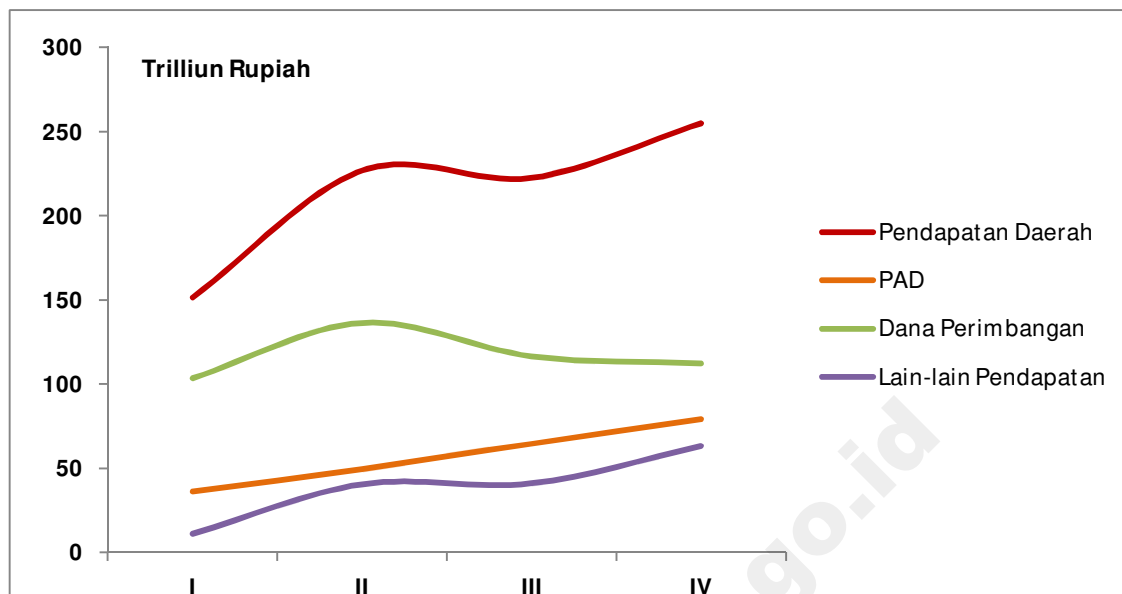
Tabel 3.5.2.1

Tingkat Penyerapan Pendapatan Kumulatif Triwulanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2014

Jenis Pendapatan	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi				
1. Pendapatan Daerah	16,54	43,18	74,30	112,70
a. Pendapatan Asli Daerah	20,65	45,89	82,50	128,40
b. Dana Perimbangan	11,45	41,46	62,98	91,36
c. Lain-lain Pendapatan	13,06	37,89	69,54	102,98
Kabupaten/ Kota				
2. Pendapatan Daerah	19,97	49,03	75,96	105,46
a. Pendapatan Asli Daerah	18,16	47,93	81,04	117,72
b. Dana Perimbangan	23,47	51,49	76,23	98,59
c. Lain-lain Pendapatan	5,83	38,89	68,77	123,07

Tingkat penyerapan pendapatan terkecil tiap triwulannya pada pemerintah provinsi adalah dana perimbangan kecuali pada triwulan II dimana lain-lain pendapatan berada pada posisi terbawah dalam tingkat penyerapan. Dana perimbangan memiliki tingkat penyerapan sebesar 11,45 persen pada triwulan I; 41,46 persen pada triwulan II; 62,98 persen pada triwulan III; dan sebesar 91,36 persen pada triwulan IV. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota lain-lain pendapatan mempunyai tingkat penyerapan terkecil sebesar 5,83 persen pada triwulan I; 38,89 persen pada triwulan II; dan 68,77 persen pada triwulan III, sedangkan pada triwulan IV meningkat tajam menjadi 123,07 persen.

Grafik 3.5.2
Perkiraan Penyerapan Pendapatan Triwulanan Pemerintah Daerah
di Indonesia, 2014



Selanjutnya Grafik 3.5.2 menunjukkan besarnya perkiraan pendapatan triwulanan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota pada periode tahun 2014. Secara total/nasional, perkiraan pendapatan pemerintah daerah pada triwulan I sebesar 151,31 triliun rupiah, naik menjadi 226,78 triliun rupiah pada triwulan II, turun menjadi 222,37 triliun rupiah pada triwulan III, dan pada triwulan IV mencapai 254,81 triliun rupiah.

Dana perimbangan merupakan jenis pendapatan daerah yang mempunyai nilai perkiraan pendapatan paling tinggi dan pola pendapatan yang cukup berfluktuatif dibandingkan dengan komponen penyusun pendapatan lainnya, yaitu sebesar 103,67 triliun rupiah pada triwulan I; 136,43 triliun rupiah pada triwulan II; 116,63 triliun rupiah pada triwulan III dan sebesar 112,31 triliun rupiah pada triwulan IV. Sedangkan perkiraan pendapatan untuk dua jenis lainnya cenderung meningkat setiap triwulannya.

Tabel 3.5.2.2

**Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Triwulanan Pemerintah Daerah
Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2014**

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Quarter to Quarter (Q to Q)				
Pendapatan Daerah	-27,90	49,88	-1,94	14,59
a. Pendapatan Asli Daerah	-38,40	36,65	30,07	22,57
b. Dana Perimbangan	-0,51	31,60	-14,51	-3,70
c. Lain-lain Pendapatan	-75,76	259,71	1,14	53,88

Tingkat pertumbuhan pendapatan menunjukkan perubahan pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pendapatan triwulanan (Q to Q) mempunyai nilai yang sangat fluktuatif, baik pada PAD, dana perimbangan ataupun lain-lain pendapatan. Pada triwulan I, pendapatan daerah mempunyai tingkat pertumbuhan sebesar -27,90 persen yang artinya pendapatan daerah triwulan I tahun 2014 mempunyai nilai lebih kecil 27,90 persen bila dibandingkan dengan pendapatan pada triwulan IV tahun 2013. Pada triwulan II, pendapatan daerah mempunyai tingkat pertumbuhan sebesar 49,88 persen, dan pada triwulan III sebesar -1,94 persen. Sedangkan pada triwulan IV, pendapatan daerah mampu tumbuh sebesar 14,59 persen yang artinya pendapatan daerah pada triwulan IV 14,59 persen lebih besar dari pendapatan daerah pada triwulan III. Tingkat pertumbuhan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5.2.2.

3.5.3 Belanja Triwulanan Daerah

Belanja daerah adalah jenis pengeluaran pemerintah yang secara rutin dikeluarkan untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Tabel 3.5.3.1 menunjukkan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai tingkat penyerapan belanja kumulatif triwulan IV di bawah 100 persen yaitu sebesar 99,57 persen dan 94,73 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi pengeluaran belanja pemerintah provinsi lebih kecil 0,43 persen dan pemerintah kabupaten/kota lebih kecil 5,27 persen dari anggarannya.

Dilihat dari kontribusi masing-masing rincian belanja, tingkat penyerapan belanja pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pola yang sama dimana secara umum belanja pegawai mendominasi penyerapan belanja pada setiap triwulannya. Pada pemerintah provinsi, belanja pegawai mempunyai tingkat penyerapan sebesar 14,77 persen pada triwulan I; 37,24 persen pada

triwulan II; 69,21 persen pada triwulan III; dan 105,27 persen pada triwulan IV. Sedangkan pada pemerintah kabupaten/kota, belanja pegawai menyerap sebesar 15,66 persen pada triwulan I; 36,87 persen pada triwulan II; 66,37 persen pada triwulan III; dan 96,91 persen pada triwulan IV.

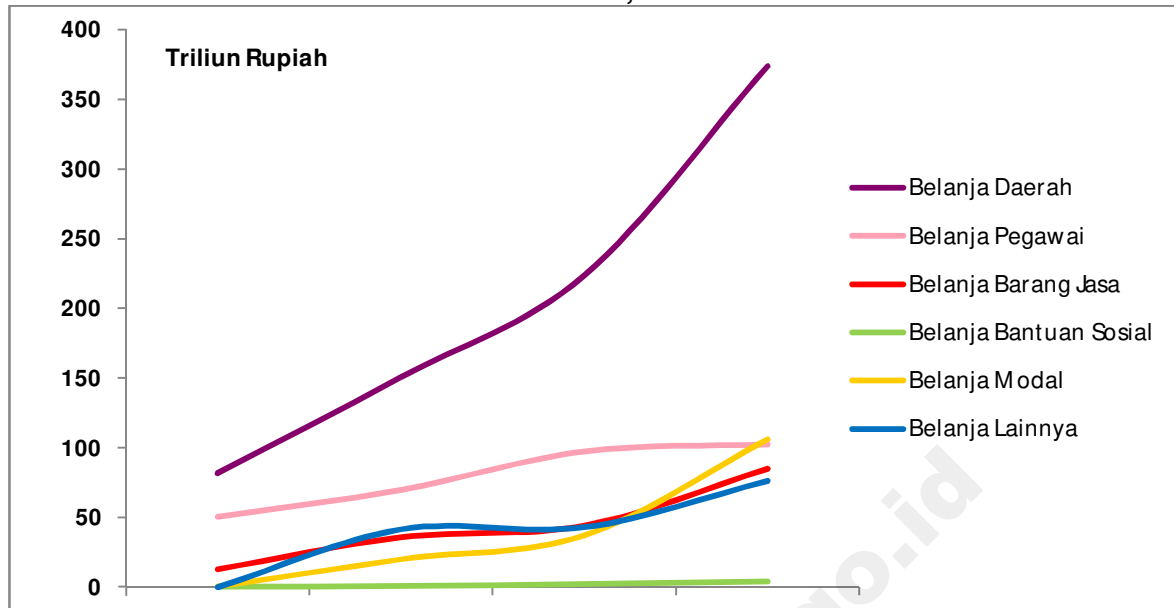
Tabel 3.5.3.1

Tingkat Penyerapan Belanja Kumulatif Triwulanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Menurut Jenis Belanja (persen), 2014

Jenis Belanja	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi				
1. Belanja Daerah	8,45	24,30	49,65	99,57
a. Belanja Pegawai	14,77	37,24	69,21	105,27
b. Belanja Bantuan Sosial	10,77	14,95	45,30	73,84
c. Belanja Barang Jasa	7,01	27,59	51,95	102,05
d. Belanja Modal	0,53	5,50	13,97	57,67
e. Belanja Lainnya	12,56	31,08	67,51	131,43
Kabupaten/ Kota				
2. Belanja Daerah	10,00	28,24	54,41	94,73
a. Belanja Pegawai	15,66	36,87	66,37	96,91
b. Belanja Bantuan Sosial	3,86	16,59	43,12	111,45
c. Belanja Barang Jasa	7,10	26,26	50,37	95,17
d. Belanja Modal	1,79	10,95	31,80	83,74
e. Belanja Lainnya	9,40	39,83	68,61	121,06

Belanja modal merupakan jenis belanja yang mempunyai tingkat penyerapan terkecil pada tiap triwulannya baik untuk pemerintah provinsi maupun untuk pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan belanja modal merupakan belanja yang memerlukan perencanaan cukup panjang dan pelaksanaannya memerlukan prosedur-prosedur khusus seperti pengadaan, lelang dan lain-lainnya, sehingga tidak setiap tahun belanja modal mempunyai nilai penyerapan yang cukup besar. Pada triwulan I pemerintah provinsi mampu menyerap sebesar 0,53 persen; 5,50 persen untuk triwulan II; 13,97 persen untuk triwulan III dan 57,67 persen untuk triwulan IV. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota belanja modal mampu menyerap sebesar 1,79 persen pada triwulan I; 10,95 persen pada triwulan II; 31,80 persen pada triwulan III; dan 83,74 persen pada triwulan IV.

Grafik 3.5.3
Perkiraan Penyerapan Belanja Triwulanan Pemerintah Daerah di
Indonesia, 2014



Dalam hal besarnya nilai penyerapan belanja pemerintah daerah setiap triwulannya, terlihat bahwa penyerapan cenderung meningkat tajam pada triwulan IV. Belanja pegawai menjadi komponen yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pengeluaran belanja daerah sedangkan belanja bantuan sosial adalah belanja yang mempunyai kontribusi terkecil dalam perkiraan penyerapannya. Pada triwulan I, belanja bantuan sosial mempunyai perkiraan penyerapan sebesar 0,47 triliun rupiah; 0,74 triliun rupiah pada triwulan II; 2,11 triliun rupiah pada triwulan III; dan 4,13 triliun rupiah pada triwulan IV.

Tabel 3.5.3.2
Tingkat Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Menurut Jenis Belanja
(persen), 2014

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Quarter to Quarter (Q to Q)</i>				
Belanja Daerah	-75,74	84,40	48,52	67,12
a. Belanja Pegawai	-45,02	38,14	39,23	5,27
b. Belanja Barang Jasa	-83,31	177,49	23,29	92,24
c. Belanja Bantuan Sosial	-88,09	56,26	185,13	95,92
d. Belanja Modal	-97,13	456,31	117,59	186,23

Sama halnya dengan pendapatan pemerintah, pengeluaran belanja pemerintah juga menunjukkan pertumbuhan tiap triwulanannya. Pertumbuhan triwulanan (Q to Q) memiliki nilai yang fluktuatif, dimana triwulan I mempunyai nilai sebesar -75,74 persen; naik menjadi 84,40 persen pada triwulan II; 48,52 persen pada triwulan III dan tumbuh cukup signifikan pada triwulan IV yaitu sebesar 67,12 persen, yang artinya belanja daerah triwulan IV lebih besar 67,12 persen dari belanja daerah untuk triwulan III. Tingkat pertumbuhan belanja daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5.3.2.

Pertumbuhan belanja daerah pada triwulan I selalu menunjukkan nilai yang negatif karena mayoritas pemerintah daerah belum menyerap belanja daerah secara maksimal pada triwulan I. Belanja daerah juga selalu mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan pada triwulan IV. Hal ini disebabkan karena pada triwulan IV banyak kegiatan-kegiatan daerah yang sudah terealisasi sehingga belanja daerah dapat terserap maksimal.

<http://www.bps.go.id>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil STKU Terintegrasi 2014, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perdagangan

- Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) sektor perdagangan tahun 2014 dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia sama bila dibanding tahun 2013 dengan unit penelitian survei adalah perusahaan menengah dan besar yang dikategorikan dalam jenis kegiatan usaha Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor, Perdagangan Besar (PB) Selain Mobil dan Sepeda Motor, dan Perdagangan Eceran (PE) Selain Mobil dan Sepeda Motor (*Swalayan, Department Store*, dan PE Lainnya).
- Dari 4.360 target sampel didapat 3.980 sampel responden valid yang terdiri atas 681 perdagangan mobil dan sepeda motor, 919 perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor dan 2.380 perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor.
- Penyerapan tenaga kerja pada usaha perdagangan tahun 2014 sebanyak 99.873 orang terdiri dari 28.199 orang bekerja pada usaha perdagangan mobil & sepeda motor, 15.535 orang bekerja pada perdagangan besar selain mobil & sepeda motor dan 56.139 orang bekerja di pedagang eceran selain mobil & selain mobil & sepeda motor.
- Indeks Penjualan Triwulanan Indonesia, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku secara keseluruhan memperlihatkan angka tertinggi pada triwulan III 2014, yang mengindikasikan terjadinya kenaikan omset pada pelaku kegiatan usaha perdagangan dengan kisaran sebesar 7,88 hingga 10,46 persen.
- Indeks Pembelian Triwulanan Indonesia baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku menunjukkan pencapaian nilai tertinggi pada triwulan II 2014, yakni masing-masing sebesar 119,1 dan 119,62.
- Sedangkan untuk Indeks Produktivitas Triwulanan atas dasar harga berlaku secara keseluruhan memperlihatkan angka tertinggi pada triwulan III 2014, yakni sebesar 110,22.
- Pada triwulan akhir pengamatan (triwulan IV 2013), optimisme pelaku kegiatan usaha perdagangan terhadap prospek usaha pada triwulan

selanjutnya cukup tinggi. Sebanyak 40,30 persen responden optimis dan berkeyakinan bahwa prospek usaha pada triwulan selanjutnya akan menjadi lebih baik, sementara sebanyak 51,68 persen menyatakan bahwa prospek usaha akan sama dan tidak mengalami perubahan, dan sebagian kecil lainnya, yakni sebanyak 8,02 persen responden, merasa pesimis dan menyatakan bahwa prospek usaha akan menjadi lebih buruk.

2. Transportasi dan Pergudangan

- Pada triwulan I tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah pekerja di semua kegiatan usaha transportasi dan pergudangan. Khusus untuk kegiatan usaha pergudangan dan kurir peningkatan jumlah pekerja terjadi terus menerus dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.
- Balas jasa pekerja kegiatan usaha angkutan penumpang jalan raya dan perpakiran menunjukkan peningkatan setiap triwulan. Pada triwulan III tahun 2014 terjadi penurunan balas jasa pekerja di beberapa kegiatan usaha transportasi dan pergudangan yaitu angkutan barang jalan raya, ASDP (Non PT ASDP Persero), dan pergudangan/cold storage.
- Pendapatan pada kegiatan usaha ekspedisi menunjukkan peningkatan setiap triwulannya. Pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada triwulan I tahun 2014 yaitu pada kegiatan angkutan barang jalan raya sebesar 36,68 persen.
- Produktivitas pekerja pada semua kegiatan usaha transportasi dan pergudangan menunjukkan pola yang cenderung berfluktuasi antar triwulannya, kecuali pada kegiatan ekspedisi yang terus menerus meningkat setiap triwulannya.
- Pertumbuhan jumlah penumpang yang diangkut bus dan jumlah order angkutan taksi menunjukkan tren yang cenderung berfluktuasi setiap triwulannya. Sebaliknya jumlah penumpang yang diangkut mobil penumpang umum mengalami peningkatan setiap triwulannya, kecuali pada triwulan III.
- Jumlah barang yang diangkut oleh kegiatan usaha angkutan barang jalan raya khususnya truk mengalami peningkatan setiap triwulannya sementara barang yang diangkut moda pick up mengalami tren yang menurun setiap triwulannya kecuali pada triwulan III naik sebesar 5,83 persen.
- Pertumbuhan jumlah penumpang, barang, dan kendaraan yang diangkut kegiatan usaha ASDP-Non PT. ASDP (Persero) meningkat cukup tinggi

pada triwulan II tahun 2014 masing-masing sebesar 14,32 persen, 3,13 persen, dan 7,41 persen.

- Pada kegiatan usaha pergudangan, volume gudang tertutup/cold storage yang disewakan terjadi peningkatan setiap triwulannya kecuali pada triwulan IV terjadi penurunan sebesar 1,38 persen. Sementara untuk luas gudang terbuka yang disewakan, penurunannya hanya terjadi pada triwulan III tahun 2014 yaitu 6,10 persen.
- Peningkatan karcis parkir yang terjual pada kegiatan usaha perparkiran terjadi pada triwulan II dan III tahun 2014 dimana peningkatan tertinggi terjadi pada triwulan II sebesar 6,01 persen. Sedangkan pada triwulan I dan IV mengalami penurunan.
- Pada kegiatan usaha bongkar muat, jumlah barang yang dibongkar dan dimuat mengalami penurunan pada triwulan I sampai dengan triwulan III, sedangkan pada triwulan IV jumlah barang yang dibongkar dan dimuat mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 15,87 persen.
- Jumlah barang yang dikirim oleh perusahaan ekspedisi selama tahun 2014 secara keseluruhan mengalami penurunan kecuali pada triwulan II terjadi peningkatan sebesar 5,01 persen.
- Jumlah paket yang dikirim oleh perusahaan kurir mengalami tren yang berfluktuasi setiap triwulannya. Pada triwulan I dan III terjadi peningkatan jumlah paket yang dikirim, sebaliknya pada triwulan II dan IV terjadi penurunan jumlah paket yang dikirim. Peningkatan terbesar jumlah paket dikirim terjadi pada triwulan I sebesar 35,07 persen.

3. Informasi

- Pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar, terdapat indikasi adanya kenaikan tingkat kesejahteraan pekerja pada triwulan III, sedangkan pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, indikasi adanya kenaikan tingkat kesejahteraan pekerja terjadi pada triwulan II.
- Indeks output selalu searah dengan indeks pendapatan pada setiap triwulan, baik pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar maupun perusahaan/usaha penyiaran radio swasta.
- Fenomena positif untuk kenaikan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya pekerja pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar tampak terjadi pada triwulan I, sedangkan pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta tampak terjadi pada triwulan II dan III.

4. Lembaga Keuangan Bukan Bank

- Rata-rata tingkat respon sampel perusahaan STKU Lembaga Keuangan pada tahun 2014 adalah sebesar 78,69 persen atau menunjukkan penurunan dibanding tahun 2013 yang sebesar 83,59 persen.
- Penyerapan tenaga kerja usaha lembaga keuangan yang disurvei menunjukkan bahwa pada usaha asuransi jumlah pekerjanya meningkat sepanjang triwulan di tahun 2014. Sedangkan pada usaha/perusahaan koperasi simpan pinjam, jumlah pekerjanya cenderung menurun di setiap triwulan. Usaha/perusahaan dana pensiun, pembiayaan dan modal ventura serta jasa penunjang asuransi (aktuaris dan *adjuster*) menunjukkan tren yang peningkatan jumlah pekerja pada triwulan I sampai dengan triwulan III kenaikan tertinggi sebesar 2,49 persen. Namun demikian pada triwulan IV terjadi penurunan sebesar 7,69 persen.
- Selaras dengan penyerapan tenaga kerja, balas jasa yang diberikan pada usaha/perusahaan asuransi juga meningkat di semua triwulan pada tahun 2014. Berbeda dengan penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada usaha/perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam dan jasa penunjang asuransi terutama pada posisi triwulan I pada usaha ini mengalami penurunan, demikian pula pada IV tahun 2014.
- Pendapatan usaha terlihat berfluktuasi di setiap triwulan pada tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan di hampir semua usaha kecuali pada jenis usaha tertentu yang mengalami penurunan seperti pada usaha/perusahaan pegadaian dan pedagang valuta asing di triwulan II dan pada usaha/perusahaan dana pensiun dan asuransi di Triwulan III. Selanjutnya di triwulan IV, indeks pendapatan masing-masing jenis usaha kembali bervariasi.

5. Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah

- Pada pemerintah provinsi, kontribusi terbesar dalam menopang pendapatan daerahnya adalah pendapatan asli daerah, dengan kontribusi sebesar 120,38 triliun rupiah atau sebesar 49,03 persen terhadap total anggaran pendapatan provinsi.
- Pada pemerintah kabupaten/kota pendapatan daerahnya masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 403.94 triliun rupiah atau 72.93 persen terhadap total anggaran pendapatan kabupaten/kota.
- Pengeluaran pemerintah provinsi didominasi oleh belanja lainnya sebesar 91.90 triliun rupiah atau 35.76 persen dari anggaran belanja provinsi.

- Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 283,87 triliun rupiah atau 47,39 persen dari anggaran belanja kabupaten/kota.
- Pada tahun 2014, realisasi tingkat pencapaian pendapatan dan belanja daerah provinsi lebih rendah dibandingkan realisasi tingkat pencapaian daerah kabupaten/kota kecuali pada triwulan IV.

4.2 Saran

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk penyempurnaan dan perbaikan STKU Terintegrasi di tahun mendatang, yaitu:

1. Perlu adanya perbaikan dalam pemilihan sampel, cakupan wilayah/area sampel ditambah dan unit sampel yang dipilih sebaiknya berskala menengah besar karena pada STKU 2013 ini masih adanya responden terpilih yang berskala kecil.
2. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara kontinyu di awal, tengah, dan akhir tiap periode karena pengalaman pelaksanaan STKU 2013 ini masih belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pencacahan sehingga hasil isian sering tidak konsisten, salah satuan, tidak lengkap, dan tidak tepat waktu. Salah satunya dengan melakukan *Video Conference (Vicon)* dengan daerah.
3. Perlu adanya *refreshing* kembali untuk petugas STKU di Daerah seiring dengan banyaknya petugas yang baru (karena rotasi, promosi). Dengan *refreshing* ini pada akhirnya akan menghasilkan data STKU yang lebih akurat, konsisten, dan tepat waktu.
4. Perlu dibahas dengan *intens* antara *user* dan *compiler*.
5. Perlu dijembatani kepentingan antara penyedia data (perusahaan) dengan pengumpul data.

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Kuesioner STKU-G 2014

RAHASIA



STKU - G
TRIWULAN - 2014

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA
PERDAGANGAN
2014

Tujuan Survei : Untuk memperoleh data mengenai perkembangan margin perdagangan dan pengangkutan yang akan digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB sektor perdagangan

Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Kerahasiaan : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

Kewajiban : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Provinsi	:	<small>diisi oleh pencacah</small>														
2. Kabupaten/Kota*)	:	<input type="text"/>														
3. Nomor Urut Perusahaan	:	<input type="text"/>														
4. Nama Perusahaan	:	<input type="text"/>														
a. Alamat	:	<input type="text"/>														
b. E-mail	:	<input type="text"/>														
c. Nomor Telepon	:	(.....)	<input type="text"/>														
5. Kegiatan Utama	:	<table border="0"> <tr> <td>Perdagangan Mobil</td> <td>-1</td> <td>Perdagangan Eceran**)</td> <td>-4</td> <td rowspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Perdagangan Sepeda Motor</td> <td>-2</td> <td>Swalayan</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>Perdagangan Besar**)</td> <td>-3</td> <td>Department Store</td> <td>-6</td> </tr> </table>	Perdagangan Mobil	-1	Perdagangan Eceran**)	-4	<input type="text"/>	Perdagangan Sepeda Motor	-2	Swalayan	-5	Perdagangan Besar**)	-3	Department Store	-6		
Perdagangan Mobil	-1	Perdagangan Eceran**)	-4	<input type="text"/>													
Perdagangan Sepeda Motor	-2	Swalayan	-5														
Perdagangan Besar**)	-3	Department Store	-6														
6. Jenis/Kelompok Komodii	:	KBLI Lapangan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
7. Hasil pencacahan	:	<small>diisi pengawas</small>														
			<small>diisi pencacah</small>														
			<input type="text"/>														

Ket: *) Coret yang tidak sesuai

**) Tidak termasuk perdagangan mobil dan sepeda motor

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN

Blok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang identitas perusahaan.

Rincian 1: **Provinsi:** tuliskan nama dan kode provinsi.

Rincian 2: **Kabupaten/Kota:** tuliskan nama dan kode kabupaten/kota.

Rincian 3: **Nomor Urut Perusahaan:** tuliskan nomor urut perusahaan.

Rincian 4: **Nama Perusahaan:** tuliskan nama perusahaan, dan alamat lengkap perusahaan pada R.4a, *E-mail* perusahaan pada R.4b, serta nomor telepon perusahaan pada R.4.c.

Rincian 5: **Kegiatan Utama:** pilih salah satu jenis kegiatan utama perusahaan dan tuliskan kodenya.

Rincian 6: **Jenis/Kelompok Komoditi:** tuliskan jenis/kelompok komoditi dan lima digit kode KBLI 2009 pada kotak yang tersedia

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan. Informasi yang ditanyakan adalah nilai penjualan barang dagangan (omset), nilai pembelian barang dagangan yang terjual, nilai pendapatan dari fee/komisi barang konsinyasi, dan jumlah pekerja per bulan pada triwulan sebelumnya dan triwulan sekarang.

Rincian 1: **Nilai Penjualan Barang Dagangan (Omset):** isikan seluruh nilai hasil penjualan barang dagangan, tidak termasuk barang konsinyasi.

Rincian 2: **Nilai Pembelian Barang Dagangan yang Terjual:** isikan seluruh nilai pembelian dari barang dagangan yang terjual termasuk biaya pengangkutan dan tidak termasuk barang konsinyasi.

Rincian 3: **Pendapatan dari Fee/Komisi Barang Konsinyasi:** isikan pendapatan dari fee/komisi barang konsinyasi yang diterima.

Rincian 4: **Jumlah Pekerja:** isikan seluruh pekerja yang biasanya terlibat dalam kegiatan di perusahaan ini. Pekerja yang diisikan disini adalah seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan usaha perdagangan baik yang mendapatkan upah/gaji maupun yang tidak mendapat upah/gaji (pemilik dan pekerja keluarga).

BLOK III. PROSPEK USAHA

Rincian 1: Rincian ini terisi jika ada perbedaan isian Blok II R1 antar triwulan (jumlah masing-masing triwulan).

Penyebab perubahan nilai, bisa karena perubahan volume dan/atau harga.

- Volume:** Volume barang yang terjual triwulan sekarang naik/turun/tetap dari triwulan sebelumnya.
- Harga :** Harga barang yang terjual triwulan sekarang naik/turun/tetap dari triwulan sebelumnya.

Rincian 2: Rincian ini terisi jika ada kenaikan/penurunan harga dan yang diperdagangkan lebih dari satu komoditi,

- Rincian ini terisi jika barang yang diperdagangkan lebih dari satu komoditi. Tuliskan nama komoditi yang menjadi penyebab utama kenaikan/penurunan harga tersebut. Jika satu komoditi, rincian ini tidak perlu diisi.
- Tuliskan besarnya persentase kenaikan/penurunan harga komoditi tersebut.

Rincian 3: Rincian ini terisi jika ada kenaikan/penurunan harga, tuliskan persentase kenaikan/penurunan harga tersebut.

Rincian 4: Opini pengusaha terhadap keadaan usaha pada triwulan mendatang.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan tambahan yang dianggap penting dan perlu yang masih ada kaitannya dengan data yang dituliskan dalam kuesioner.

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA							
Uraian	Satuan	Triwulan Sebelumnya (..... - 201....)			Triwulan Sekarang (..... - 201....)		
		Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Nilai Penjualan Barang Dagangan (Omset)	Juta Rp						
2. Nilai Pembelian Barang Dagangan yang Terjual	Juta Rp						
Pendapatan dari <i>Fee</i> / 3. Komisi Barang Konsinyasi	Juta Rp						
4. Jumlah Pekerja	orang						

BLOK III. PROSPEK USAHA																			
<p>1. Jika nilai penjualan barang dagangan (Blok II R1) mengalami perubahan pada triwulan sekarang dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, apa penyebabnya?</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Naik</td> <td>Turun</td> <td>Tetap</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Volume</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b. Harga</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Naik	Turun	Tetap		a. Volume	1	2	3	<input type="checkbox"/>	b. Harga	1	2	3	<input type="checkbox"/>
	Naik	Turun	Tetap																
a. Volume	1	2	3	<input type="checkbox"/>															
b. Harga	1	2	3	<input type="checkbox"/>															
<p>2. Jika ada kenaikan/penurunan harga (R1b kode 1 atau 2) dan yang diperdagangkan lebih dari satu komoditi,</p> <p>a. Komoditi apa yang menjadi penyebab utama kenaikan/penurunan harga tersebut?</p> <p>.....</p> <p>b. Berapa persen kenaikan/penurunan harga tersebut?</p> <p>..... %</p>																			
<p>3. Secara umum berapa persen kenaikan/penurunan harga pada triwulan sekarang dibanding triwulan sebelumnya?</p> <p>..... %</p>																			
<p>4. Bagaimana prospek omset triwulan yang akan datang dibanding triwulan sekarang?</p> <table border="0"> <tr> <td>lebih baik</td> <td>1</td> <td>lebih buruk</td> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>sama</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					lebih baik	1	lebih buruk	3	<input type="checkbox"/>	sama	2								
lebih baik	1	lebih buruk	3	<input type="checkbox"/>															
sama	2																		

BLOK IV. CATATAN

Nama *Contact Person* : Diisi dengan sebenarnya,
..... 201....

Nomor Telepon/HP :
(.....)
Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal :
Pencacah
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>

Tanggal :
Pengawas/Pemeriksa
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>


Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama :

Alamat/ No. Telp. :

.....

Lampiran 2. Kuesioner STKU-H 2014

RAHASIA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> STKU - H TRIWULAN - 2014 </div>								
 REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 2014									
<table style="width: 100%; border: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tujuan Survei</td> <td>: Memperoleh informasi tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan</td> </tr> <tr> <td>Dasar Hukum</td> <td>: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik</td> </tr> <tr> <td>Kerahasiaan</td> <td>: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)</td> </tr> <tr> <td>Kewajiban</td> <td>: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)</td> </tr> </table>		Tujuan Survei	: Memperoleh informasi tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan	Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)	Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
Tujuan Survei	: Memperoleh informasi tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan								
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik								
Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)								
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)								

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN			
1. Provinsi	:		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
2. Kabupaten/Kota *)	:		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
3. Nomor Urut Perusahaan	:		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
4. Nama Perusahaan	:		
a. Alamat	:		
b. E-mail	:		
c. Nomor Telepon	: (.....)		
5. Kegiatan Utama	: Angkutan Penumpang 1 Angkutan Barang 2 ASDP [Non PT ASDP (Persero)] 3 Pergudangan/Cold Storage 4	Perparkiran 5 Bongkar Muat 6 Ekspedisi 7 Kurir 8	<input style="width: 30px; height: 30px;" type="text"/>
6. Uraian Kegiatan Utama	: KBLI Lapangan	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	diisi pengawas
7. Hasil Pencacahan	:		<input style="width: 30px; height: 30px;" type="text"/> <small>diisi pencacah</small>

*) coret yang tidak sesuai

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN

Blok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang identitas perusahaan.

Rincian 1: Provinsi: tuliskan nama dan kode provinsi.

Rincian 2: Kabupaten/Kota: tuliskan nama dan kode kabupaten/kota.

Rincian 3: Nomor Urut Perusahaan: tuliskan nomor urut perusahaan.

Rincian 4: Nama Perusahaan: tuliskan nama perusahaan, dan alamat lengkap perusahaan pada Rincian 4a, E-mail perusahaan pada Rincian 4b, serta nomor telepon perusahaan pada Rincian 4.c.

Rincian 5: Kegiatan Utama: pilih salah satu jenis kegiatan utama perusahaan dan tuliskan kodenya.

- Angkutan penumpang, terdiri dari angkutan bus dan angkutan non bus (mobil penumpang umum, taksi).
- Angkutan barang, terdiri dari angkutan barang umum dan barang khusus, menggunakan truk dan pick up.
- ASDP, yang dicakup disini adalah perusahaan selain PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- Perdagangan, dapat berupa gudang tertutup dan gudang terbuka, termasuk *cold storage*.
- Perparkiran, terdiri dari perparkiran di badan jalan (*on street*) dan di luar badan jalan (*off street*).
- Bongkar muat, mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang).
- Ekspedisi, terdiri dari Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), EMKA & EAD, EMKL, dan EMPU.
- Kurir, mencakup usaha jasa pelayanan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar, paket, dan uang.

Rincian 6: Uraian kegiatan utama: tuliskan uraian kegiatan utama, dengan mengacu pada kegiatan utama perusahaan pada Rincian 5, dan isikan kode KBLI (diisi pengawas) sesuai hasil pencacahan di lapangan.

Rincian 7: Hasil Pencacahan : tuliskan hasil pencacahan sesuai dengan keadaan perusahaan pada saat pencacahan dan tuliskan kodenya pada kotak yang tersedia. Hasil pencacahan adalah informasi yang diperoleh petugas di lapangan. Penjelasan Rincian 7 dapat dilihat di buku pedoman.

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan. Informasi yang ditanyakan adalah jumlah pekerja, nilai balas jasa pekerja, pendapatan, dan produksi perusahaan per bulan pada triwulan sebelumnya dan triwulan sekarang.

Rincian 1: **Jumlah Pekerja**: tuliskan jumlah pekerja per bulan.

Pekerja adalah semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan proses produksi di perusahaan, baik pekerja dibayar maupun tidak dibayar (pemilik dan pekerja keluarga).

Rincian 2: **Nilai Balas Jasa Pekerja**: tuliskan nilai balas jasa untuk seluruh pekerja yang dibayar per bulan, dalam satuan juta rupiah.

Balas jasa adalah seluruh pengeluaran yang diberikan kepada pekerja yang dibayar, seperti: upah/gaji, upah lembur, tunjangan, bonus dan sejenisnya, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain baik dalam bentuk uang atau barang.

Rincian 3: **Pendapatan** : tuliskan jumlah pendapatan perusahaan per bulan, dalam satuan juta rupiah.

Pendapatan disini adalah total seluruh pendapatan dari kegiatan utama perusahaan (seperti yang tertera pada Blok I Rincian 5) dan pendapatan lainnya seperti bunga atas simpanan, deviden, royalti, dan sejenisnya.

Rincian 4: **Produksi Perusahaan**: tuliskan jumlah dari produksi perusahaan transportasi per bulan.

Responden hanya mengisi **satu kelompok sub rincian** saja, sesuai dengan kegiatan utama responden pada Blok I Rincian 5.

BLOK III. PROSPEK USAHA

Blok ini digunakan untuk mengetahui pendapat dari masing-masing responden mengenai keadaan perusahaannya.

Rincian 1: **Jika pendapatan usaha mengalami perubahan (meningkat/menurun), disebabkan karena**
Rincian ini terisi jika pendapatan usaha pada Blok II R.3 mengalami peningkatan/penurunan pada triwulan sekarang dibanding triwulan sebelumnya (jumlah masing-masing triwulan).
Tuliskan penyebab dari peningkatan/penurunan pendapatan usaha tersebut.

Rincian 2.a: **Bagaimana perkiraan pendapatan usaha triwulan yang akan datang dibanding triwulan sekarang**
Pilih salah satu kode mengenai perkiraan pendapatan usaha sesuai dengan pendapat dari responden.

Rincian 2.b: **Berapa persen peningkatan/penurunan pendapatan tersebut**

Rincian ini terisi jika perkiraan pendapatan usaha pada Rincian 2.a meningkat (kode 1) atau menurun (kode 3)
Isikan besarnya persentase peningkatan/penurunan pendapatan usaha tersebut.

BLOK IV. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan tambahan yang dianggap penting dan perlu yang masih ada kaitannya dengan data yang dituliskan dalam daftar isian ini.

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA							
Uraian	Satuan	Triwulan Sebelumnya (..... - 201.....)			Triwulan Sekarang (..... - 201.....)		
		Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Jumlah Pekerja	Orang						
2. Nilai Balas Jasa Pekerja	Juta Rp						
3. Pendapatan	Juta Rp						
4. Produksi Perusahaan:							
a. Angkutan Penumpang Jumlah order / penumpang yang diangkut							
1) Bus	Orang						
2) Mobil penumpang umum	Orang						
3) Taksi	Order						
b. Angkutan Barang Jumlah order barang yang diangkut:							
1) Truk	Order						
2) Pick up	Order						
c. ASDP [Non PT ASDP (Persero)]							
1) Jumlah penumpang yang diangkut	Orang						
2) Jumlah barang yang diangkut	Ton						
3) Jumlah kendaraan yang diangkut	Unit						
d. Pergudangan/ Cold Storage Volume / luas gudang yang disewakan:							
1) Gudang tertutup/ Cold Storage	M ³						
2) Gudang terbuka	M ²						
Rata-rata tarif sewa:							
3) Gudang tertutup/ Cold Storage per m ³ per hari	Ribu Rp						
4) Gudang terbuka per m ² per hari	Ribu Rp						
e. Perparkiran Jumlah karcis yang terjual	Lembar						
f. Bongkar Muat Jumlah barang yang dibongkar muat	Ton						
g. Ekspedisi Jumlah barang yang dikirim	Ton						
h. Kurir Jumlah paket yang dikirim	Kg						

BLOK III. PROSPEK USAHA	
<p>1. Jika pendapatan usaha (Blok II R3) mengalami perubahan (meningkat/menurun) pada <u>triwulan sekarang</u> dibanding <u>triwulan sebelumnya</u>, disebabkan karena :</p> <p>.....</p>	
<p>2. a. Bagaimana <u>perkiraan pendapatan usaha triwulan yang akan datang</u> dibanding triwulan sekarang?</p> <p>Meningkat 1 Menurun 3</p> <p>Sama 2</p> <p>b. Jika perkiraan pendapatan usaha meningkat atau menurun (Rincian 2.a kode 1 atau 3), berapa persen peningkatan/penurunan pendapatan tersebut ?</p> <p>..... %</p>	<div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>

BLOK IV. CATATAN

Nama *Contact Person* : Diisi dengan sebenarnya,
..... 201....

Nomor Telepon/HP :
(.....)
Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal :
Pencacah
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>

Tanggal :
Pengawas/Pemeriksa
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama :

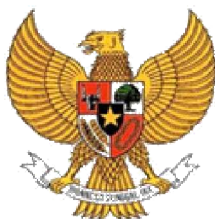
Alamat/ No. Telp. :

.....

Lampiran 3. Kuesioner STKU-J 2014

RAHASIA

STKU - J
Triwulan - 2014



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA
INFORMASI
2014

Tujuan Survei : Untuk memperoleh data mengenai perkembangan usaha/perusahaan untuk mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan

Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Kerahasiaan : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik)

Kewajiban : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik)

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi :		diisi pencacah	<input type="text"/>
2. Kabupaten / Kota * :			<input type="text"/>
3. Nomor Urut Perusahaan :			<input type="text"/>
4. Nama Perusahaan :			
a. Alamat :			
b. E-mail :			
c. Nomor Telepon :			
5. Kegiatan Usaha :	Penerbitan Surat Kabar -1		<input type="text"/>
	Penyiaran Radio Swasta -2		
6. Kode KBLI :			<input type="text"/>
7. Hasil Pencacahan :		diisi pengawas	<input type="text"/>
		diisi pencacah	<input type="text"/>

*) Coret yang Tidak Sesuai

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang identitas perusahaan.

- Rincian 1 : Provinsi : Tuliskan nama dan kode provinsi.
- Rincian 2 : Kabupaten/Kota : Tuliskan nama dan kode kabupaten/kota.
- Rincian 3 : Nomor Urut Perusahaan : Tuliskan nomor urut perusahaan yang disalin dari daftar sampel perusahaan.
- Rincian 4 : Nama Perusahaan : Tuliskan nama lengkap perusahaan.
- Rincian 4a : Alamat : Tuliskan alamat lengkap perusahaan.
- Rincian 4b : Email : Tuliskan alamat email perusahaan.
- Rincian 4c : Nomor Telepon : Tuliskan nomor telepon perusahaan.
- Rincian 5 : Kegiatan Usaha : Pilih salah satu jenis kegiatan usaha yang sesuai dan masukkan kodenya pada kotak yang tersedia.
- Rincian 6 : KBLI Lapangan : Tuliskan kode KBLI lima digit sesuai dengan kegiatan usahanya.
- Rincian 7 : Hasil Pencacahan : Tuliskan salah satu kode yang sesuai dengan keadaan perusahaan pada saat pencacahan dan masukkan pada kotak yang tersedia (penjelasan kode lihat buku pedoman).

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Blok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan usaha perusahaan.

Informasi yang ditanyakan mencakup pekerja, balas jasa pekerja, pendapatan, dan indikator produksi per bulan pada triwulan sebelumnya dan triwulan sekarang.

- Rincian 1: Jumlah Pekerja/Karyawan : Tuliskan jumlah pekerja/karyawan per bulan.
Pekerja/Karyawan adalah semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan proses produksi di perusahaan, baik pekerja dibayar maupun tidak dibayar (pemilik dan pekerja keluarga).
- Rincian 2 : Balas Jasa Pekerja : Tuliskan nilai balas jasa untuk seluruh pekerja/karyawan yang dibayar, seperti : upah/gaji; upah lembur; tunjangan; bonus dan sejenisnya; asuransi, dana pensiun dan lain-lain baik dalam bentuk uang/barang.
- Rincian 3 : Pendapatan : Tuliskan jumlah pendapatan per bulan dalam satuan juta rupiah.
Pendapatan disini adalah total seluruh pendapatan yang mencakup pendapatan dari kegiatan utama dan pendapatan dari lainnya seperti pendapatan yang diperoleh dari iklan.
- Rincian 4: Indikator Usaha : Tuliskan jumlah indikator produksi yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- Rincian 4a: **Penerbitan Surat Kabar** : Jumlah Tiras/Oplah per Periode Terbit
Tuliskan banyaknya tiras/oplah surat kabar yang diproduksi per periode terbit per bulan. Rincian ini khusus untuk perusahaan penerbitan surat kabar, rincian dikosongkan jika perusahaan bergerak pada kegiatan penyiaran radio oleh swasta.
- Rincian 4b: **Penyiaran Radio Oleh Swasta** : Jumlah Durasi Iklan yang Disiarkan
Tuliskan jumlah durasi iklan yang disiarkan per bulan dalam satuan spot. Rincian ini khusus untuk perusahaan penyiaran radio oleh swasta, rincian dikosongkan jika perusahaan bergerak pada kegiatan penerbitan surat kabar.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan tambahan yang dianggap penting dan perlu yang masih ada kaitannya dengan data yang dituliskan dalam kuesioner ini.

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA								
No.	Uraian	Satuan	Triwulan Sebelumnya (..... - 201...)			Triwulan Sekarang (..... - 201...)		
			Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Pekerja	Orang						
2.	Balas Jasa Pekerja	Juta Rp						
3.	Pendapatan	Juta Rp						
4.	Indikator Usaha							
	a. Penerbitan Surat Kabar Jumlah Tiras/Oplah	Eksemplar						
	b. Penyiaran Radio Oleh Swasta Jumlah Durasi Iklan yang Disiarkan	Spot						

BLOK III. CATATAN	

Diisi dengan sebenarnya,

Nama Contact Person :

Nomor Telepon/HP :

Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal : Pencacah (.....) Nama dan Tanda tangan

Tanggal : Pengawas/Pemeriksa (.....) Nama dan Tanda tangan

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama :

Alamat/ No. Telp :

.....

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 4. Kuesioner STKU-K 2014

RAHASIA



STKU - K
TRIWULAN - 2014

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
TAHUN 2014

Tujuan Survei : Untuk memperoleh data mengenai perkembangan usaha lembaga keuangan bukan bank yang akan digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB

Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Kerahasiaan : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

Kewajiban : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN

diisi pencacah

1. Provinsi :

2. Kabupaten/Kota*) :

3. Nomor urut perusahaan :

4. Nama perusahaan :

a. Alamat :

b. E-mail :

c. No. Telepon : (.....) Ext:.....

5. Kegiatan utama:

Asuransi	- 1	Pedagang Valuta Asing	- 5
Dana Pensiun	- 2	Pembiayaan dan Modal Ventura	- 6
Koperasi Simpan Pinjam	- 3	Penunjang Asuransi	- 7
Pegadaian	- 4		

6. Uraian kegiatan utama : KBLI Lapangan

diisi pengawas

7. Hasil pencacahan :

diisi pencacah

*) Coret yang tidak sesuai

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Tujuan blok ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan usaha perusahaan. Isikan jawaban pada pada tempat yang tersedia. Perhatikan satuan (kolom 2) di setiap rincian pertanyaan.

PERHATIAN

Unit sampel pada survei ini menggunakan pendekatan *establishment*, untuk itu seluruh rincian pada blok ini diisi sesuai dengan kondisi kantor perusahaan responden yang sedang dicacah, bukan merupakan konsolidasi dengan cabang lain.

Rincian 1: Jumlah pekerja

Pekerja adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan tersebut, baik berupa uang maupun barang. Yang termasuk dalam pekerja adalah pekerja tetap, pekerja kontrak dan pekerja tidak tetap.

Dana Pensiun: Pada usaha Dana Pensiun, pekerja yang dimaksud adalah pengelola usaha Dana Pensiun yang memperoleh gaji/upah dari kegiatan usaha dana pensiun.

Koperasi Simpan Pinjam: Pekerja yang dimaksud pada kegiatan ini adalah pengelola koperasi, yakni orang yang diangkat dan diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus koperasi untuk mengelola usaha.

Rincian 2: Balas jasa pekerja

Balas jasa pekerja adalah seluruh pengeluaran perusahaan untuk balas jasa pekerja, seperti: upah/gaji; upah lembur, tunjangan, bonus dan sejenisnya; asuransi, dana pensiun dan lain-lain baik dalam bentuk uang maupun barang.

Rincian 3: Pendapatan

Pendapatan adalah posisi seluruh pendapatan yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan usaha pada periode pencacahan.

Rincian 4: Indikator usaha

Responden hanya dapat mengisi **satu** kelompok sub rincian saja yang sesuai dengan kegiatan usaha responden.

Khusus kegiatan usaha penunjang asuransi, responden hanya memilih satu rincian pertanyaan dari rincian 4.g, yakni 4.g.1 atau 4.g.2.

BLOK III. PROSPEK USAHA

Blok ini untuk mengetahui pendapat masing-masing responden tentang keadaan perusahaannya.

Rincian 1: Perkiraan pendapatan usaha di triwulan yang akan datang

Pilih salah satu kode perkiraan pendapatan usaha dan isikan ke dalam kotak yang tersedia.

Rincian 2: Persentase kenaikan/penurunan

Isikan persentase penurunan/kenaikan pendapatan tersebut pada kotak yang tersedia.

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Uraian	Satuan	Triwulan Sebelumnya	Triwulan Sekarang
		Triwulan	Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah pekerja	Orang
2. Balas jasa pekerja	Juta Rupiah
3. Pendapatan	Juta Rupiah
4. Indikator usaha			
a. Khusus Kegiatan Asuransi			
1) Jumlah peserta	Orang
2) Premi yang diterima	Juta Rupiah
3) Klaim yang dibayarkan	Juta Rupiah
b. Khusus Kegiatan Dana Pensiun			
1) Jumlah peserta	Orang
2) Iuran yang diterima	Juta Rupiah
3) Manfaat yang dibayarkan	Juta Rupiah
c. Khusus Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam			
1) Jumlah anggota	Orang
2) Posisi kredit/pembiayaan yang disalurkan	Juta Rupiah
3) Posisi simpanan yang diterima	Juta Rupiah
d. Khusus Kegiatan Pegadaian			
1) Jumlah nasabah	Orang
2) Posisi kredit/pembiayaan yang disalurkan	Juta Rupiah
e. Khusus Kegiatan Pedagang Valuta Asing			
1) Nilai penjualan	Juta Rupiah
2) Nilai pembelian	Juta Rupiah
f. Khusus Kegiatan Pembiayaan dan Modal Ventura			
1) Posisi kredit/pembiayaan yang disalurkan	Juta Rupiah
g. Khusus Kegiatan Penunjang Asuransi			
1) Jumlah klaim yang dinilai Adjuster	Unit
2) Jumlah perusahaan yang dilayani Aktuaris	Perusahaan

BLOK III. PROSPEK USAHA

<p>1. Bagaimana perkiraan pendapatan usaha triwulan yang akan datang dibanding triwulan sekarang?</p> <p>lebih baik - 1 lebih buruk - 3</p> <p>sama - 2</p> <p>2. Jika perkiraan pendapatan usaha lebih baik atau lebih buruk (berkode '1' atau '3'), berapa persen kenaikan/penurunan pendapatan tersebut?</p> <p>..... %</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; margin-bottom: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; justify-content: space-between;"> </div>
--	--

BLOK IV. CATATAN

Nama *Contact Person* : Diisi dengan sebenarnya,
..... 201....

Nomor Telepon/HP :
(.....)
Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal :
Pencacah
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>

Tanggal :
Pengawas/Pemeriksa
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama :

Alamat/ No. Telp. :

.....

Lampiran 5. Kuesioner STKU-O 2014

RAHASIA



STKU - O
TRIWULAN - 2014

**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
2014**

Tujuan Survei : Untuk memperoleh data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara Triwulanan yang akan digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB

Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Kerahasiaan : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

Kewajiban : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

BLOK I. KETERANGAN UMUM

diisi oleh pencacah

1. Provinsi :
2. Kabupaten/Kota *) :
3. Alamat Kantor :
- E-mail :
- Nomor Telepon : (.....)

**) Coret yang tidak sesuai*

A. PENDAPATAN DAERAH

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Rincian 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rincian 2 Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

B. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Rincian 1 Belanja Tidak Langsung

Rincian 1.1 Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Rincian 1.2 Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

Rincian 1.3 Belanja Tidak Langsung Lainnya

Adalah belanja yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Rincian 2 Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah

Rincian 2.1 Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Rincian 2.2 Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah

Rincian 2.3 Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

C. PEMBIAYAAN

Blok ini digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (D) = Pendapatan (A) - Belanja (B) + Pembiayaan (C)

BLOK II. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH				
TAHUN ANGGARAN 2014				
Rincian		Anggaran 2014 (Juta Rp)	Penyerapan (Juta Rp)	
			s/d Triwulan Sebelumnya *) Bulan Januari. -	s/d Triwulan Sekarang Bulan Januari -
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1	Pajak Daerah			
1.2	Retribusi Daerah			
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2	DANA PERIMBANGAN			
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
B	BELANJA DAERAH (1 + 2)			
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1.1	Belanja Pegawai			
1.2	Belanja Bantuan Sosial			
1.3	Belanja Tidak Langsung Lainnya			
2	BELANJA LANGSUNG			
2.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3	Belanja Modal			
C	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
D	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			

*) Untuk pencacahan Triwulan 2014 kolom (3) tidak diisi

BLOK IV. CATATAN

Nama *Contact Person* : Diisi dengan sebenarnya,
..... 201....

Nomor Telepon/HP :
(.....)
Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal :
Pencacah
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>

Tanggal :
Pengawas/Pemeriksa
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama :

Alamat/ No. Telp. :

.....



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710

Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 – 5/ Fax: 021-3857048

E-mail: bpshq@bps.go.id

Homepage: <http://www.bps.go.id>



9 772460 982004